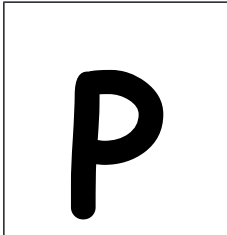


# KATA PENGANTAR



uji Syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT atas limpahan rahmat dan KaruniaNya sehingga Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) 2017 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bima dapat di selesaikan dengan baik.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) merupakan suatu laporan yang akan digunakan untuk mengetahui sejauhmana kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan yang telah ditetapkan dan mengevaluasi kegiatan yang telah direncanakan selama 1 Tahun Anggaran berjalan. Menyadari hal itu maka penyusunannya senantiasa melibatkan setiap level organisasi/bidang yang ada dan hasilnya telah disosialisasikan kepada masing-masing bidang sebagai penanggung jawab dari kegiatan yang ada maupun unsur organisasi lainnya guna mendapat masukan agar keberhasilan dalam penyusunan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pada Tahun 2015 dapat dicapai secara maksimal.

Dalam kesempatan ini tidak lupa kami menyampaikan ucapan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu sehingga penyusunan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Tahun 2015 ini dapat disusun dengan baik.

Saran dan masukan dari berbagai pihak sangat kami harapkan guna penyempurnaan penyusunan LAKIP Tahun 2016 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bima di masa mendatang.

**Bima, Februari 2018**  
**KEPALA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH**  
**KOTA BIMA,**

**Ir. Sarafuddin, MM**  
Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP. 19680828 199203 1 010





# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. LATAR BELAKANG

Sebagaimana diketahui bahwa Bangsa Indonesia pada umumnya, saat ini dihadapkan pada perubahan lingkungan setrategis yang sangat dinamis dan mempengaruhi birokrasi dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Salah satu perubahan lingkungan strategis dimaksud adalah penerapan paradigma pemerintahan yang baik (Good Governance) yang memberikan peran dan fungsi yang seimbang antara pemerintah, swasta dan masyarakat dengan prinsip-prinsip yang mendasarinya antara lain: Transparansi, partisipasi dan akuntabilitas. Apabila keseimbangan peran dari ketiga alasan tersebut dapat diterapkan maka prinsip dasar dari Good Governance tersebut dapat dirasakan oleh pihak-pihak yang terkait. Hal ini juga memudahkan institusi pemerintah dalam melaksanakan pemerintahan dan mempertanggung jawabkan kinerja kepada masyarakat. Terselenggaranya pemerintahan yang baik (Good Governance) merupakan persyaratan bagi setiap pemerintah untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan seta cita-cita bangsa.

Dalam rangka itu diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggung jawaban yang tepat, jelas, terukur dan legitimate, sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari korupsi, kolosi dan nepotisme sesuai dengan undang-undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolosi dan Nepotisme dan tata cara penyusunannya mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2015 tentang Tata cara revidi Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, sebagai perwujudan pertanggung jawaban keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan maka disusunlah Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Badan Penanggulangan Bencana

Daerah Kota Bima Tahun 2015 sebagai perwujudan Akuntabilitas Kinerja yang tercermin dari hasil pencapaian Kinerja berdasarkan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran yang telah ditetapkan.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ( LAKIP ) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bima tahun 2017 ini disusun berdasarkan Rencana Setrategis tahun ke empat dari Renstra tahun 2014 – 2018.

Dalam melaksanakan tugasnya BPBD didukung oleh 40 pegawai yang terdiri dari 41 Pegawai Negeri Sipil dan 23 pegawai tidak tetap. Jumlah pegawai, pendidikan, golongan dan jabatannya sesuai tabel berikut ;

1. Jumlah PNS dan Non PNS Badan penanggulangan Bencana berjumlah 64 orang dengan rincian sesuai table berikut :

Tabel 3.2. Jumlah Pegawai Badan Penanggulangan Bencana Daerah

No	Pegawai	Jumlah	%
1	PNS	28	70
2	CPNSD	-	0
3	Honoror	12	30
	Total	40	100

2. Susunan Pegawai berdasarkan:

- a. Golongan:

Tabel 3.2. Susunan Pegawai berdasarkan Golongan

No	Golongan	Jumlah	
		PNS/Non PNS	CPNS
1	Golongan IV	5	-
2	Golongan III	17	-
3	Golongan II	6	-
4	Golongan I	-	-
5	Non Golongan	12	

	Total	40	-
--	-------	----	---

b. Jabatan Struktural :

Tabel 3.3. Susunan Pegawai berdasarkan Jabatan Struktural

No	Eselon	Jumlah
1	Eselon II	1
2	Eselon III	4
3	Eselon IV	8
	Jumlah	13

c. Tingkat Pendidikan :

Tabel 3.4. Susunan Pegawai berdasarkan Pendidikan

No	Pegawai	Jumlah	%
1	S3	0	0
2	S2	4	10
3	S1	19	47,5
4	D3	1	2,5
5	SMA/Sederajat	16	40
6	SMP/Sederajat	0	0
7	SD/Sederajat	0	0
	Total	40	100

Disamping sumber daya manusia keberhasilan dan kegagalan suatu kegiatan dipengaruhi juga oleh sarana dan prasarana pendukung. Sarana dan Prasarana pendukung kantor antara lain terlihat pada tabel 8 pada Lampiran LAKIP ini

## **B. MAKSUD, TUJUAN DAN LANDASAN HUKUM**

### **1. Maksud dan Tujuan**

Maksud penyusunan LAKIP BPBD Kota Bima Tahun 2017 adalah Sebagai penjabaran dari visi dan misi BPBD yang terwujud dalam tingkat keberhasilan/kegagalan pelaksanaan kegiatan - kegiatan sesuai dengan Program dan kebijakan yang telah ditetapkan.

Tujuan penyusunan LAKIP BPBD Kota Bima Tahun 2017 adalah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi BPBD dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui pertanggungjawaban secara periodik.

### **2. Landasan Hukum**

1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
3. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme;
4. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
7. Instruksi Presiden RI Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan dan tata cara Reviu atas laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor .... tentang Revisi RPJMD Kota Bima tahun 2013-2018;
13. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pembentukan Lembaga Lain Sebagai Bagian dari Perangkat Daerah;
14. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Kota Bima;
15. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bima (Lembaran Daerah Kota Bima tahun 2016 Nomor 183, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bima Nomor 88);
16. Peraturan Walikota Kota Bima Nomor 58 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bima Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2017 Nomor 386).

### **C. KEDUDUKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI**

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 05 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain Sebagai Bagian dari Perangkat Daerah ( BPBD) sebagai berikut:

Badan Penanggulangan Bencana Daerah merupakan unsur pelaksana otonomi daerah dipimpin oleh seorang Kepala Pelaksana yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Daerah melalui Kepala BPBD (Sekretaris Daerah – ex-officio). (Peraturan Kepala BNPB No. 3 tahun 2008)

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bima sebagai Lembaga Teknis Daerah diposisikan sebagai institusi yang melaksanakan penanggulangan bencana daerah, membantu WaliKota Bima dalam:

- a. Perumusan kebijakan teknis dibidang Penanggulangan Bencana Daerah;



- b. Perumusan dan penyusunan kebijakan program pengembangan dibidang Penanggulangan Bencana Daerah;
- c. Pembinaan dan Pengawasan di bidang Penanggulangan Bencana Daerah;
- d. Menyelenggarakan pendidikan dan latihan keterampilan teknis dan manajemen sesuai dengan ruang lingkup tugasnya;
- e. Pengolaan dan pemberian Bantuan sesuai dengan ruang lingkup tugasnya;
- f. Pemetaan kawasan Rawan Bencana;
- g. Pembinaan terhadap seluruh perangkat .

Untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi tersebut Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bima mempunyai tugas :

#### **1. UNSUR PENGARAH**

Unsur Pengarah dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BPBD (Sekretaris Daerah – ex-officio), mempunyai tugas :

- 1) Unsur Pengarah mempunyai tugas memberikan masukan dan saran kepada Kepala BPBD dalam hal penanggulangan bencana;
- 2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), unsur pengarah menyelenggarakan fungsi:
  - a) Perumusan kebijakan penanggulangan bencana daerah;
  - b) Pemantauan
  - c) Evaluasi dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.

## 2. KEPALA PELAKSANA

Kepala Pelaksana Badan dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BPBD (Sekretaris Daerah – ex-officio). (Peraturan Kepala BNPB No. 3 tahun 2008). Kepala Pelaksana mempunyai tugas :

- a. Menetapkan program kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- b. Membuat perumusan kebijakan teknis Bidang Penanggulangan Bencana Daerah;
- c. Melaksanakan pembinaan ketatausahaan;
- d. Mengatur, mendistribusikan dan mengkoordinasi tugas-tugas staf sesuai dengan bidangnya masing-masing;
- e. Memberikan petunjuk dan bimbingan serta pengawasan kepada staf;
- f. Memeriksa hasil kerja staf ;
- g. Menetapkan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencanayang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi, serta rekonstruksi secara adil dan setara;
- h. Menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- i. Menyusun, menetapkan dan menginformasikan peta rawan bencana;
- j. Menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana;
- k. Melaksanakan penanggulangan bencana secara terintegrasi yang meliputi pra bencana, saat tanggap darurat dan pasca bencana;
- l. Melaksanakan pendidikan dan pelatihan penanggulangan bencana;
- m. Mengevaluasi dan mempertanggungjawabkan hasil kerja staf ;
- n. melaporkan pertanggungjawaban kinerja kepada Walikota;
- o. Melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan oleh Pimpinan.
- p. Membentuk Satuan Tugas Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana.

### **3. SEKRETARIAT**

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris Badan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

#### **Sekretariat mempunyai tugas :**

- a. Menyusun program kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- b. Menyusun laporan pertanggungjawaban kinerja Badan berdasarkan laporan hasil kegiatan masing -masing Bidang dan Sekretariat;
- c. Mengatur, mendistribusikan dan mengkoordinasikan tugas-tugas staf sesuai dengan Sub Bagian masing-masing;
- d. Memberikan petunjuk dan bimbingan teknis serta pengawasan kepada staf ;
- e. Memeriksa hasil kerja staf ;
- f. Memeriksa pelayanan teknis dan administrasi kepada seluruh bidang dalam lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- g. Melaksanakan pengelolaan urusan umum dan kepegawaian;
- h. Melaksanakan pengelolaan urusan keuangan;
- i. Mengevaluasi dan mempertanggungjawabkan hasil kerja staf ;
- j. Melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan oleh Pimpinan.

#### **Sekretariat terdiri dari :**

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
2. Sub Bagian Keuangan;
3. Sub Bagian Program.

#### **1. Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas :**

- a. Menyiapkan rencana kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- b. Menyusun laporan hasil kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagai bahan penyusunan laporan hasil kegiatan sekretariat;
- c. Mengatur, mendistribusikan dan mengkoordinasikan tugas-tugas staf sesuai dengan bidangnya masing-masing;
- d. Memberikan petunjuk dan bimbingan teknis serta pengawasan kepada staf ;

- e. Memeriksa hasil kerja staf ;
- f. Menyiapkan rencana kebutuhan, pengembangan dan mutasi pegawai di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- g. Melaksanakan urusan surat-menyurat dan pengadaan naskah dinas;
- h. Melaksanakan pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan kantor;
- i. Melaksanakan urusan hubungan masyarakat, perjalanan dinas dan keprotokolan;
- j. Menyiapkan data dan membuat laporan kepegawaian;
- k. Melakukan upaya-upaya peningkatan kesejahteraan dan disiplin pegawai;
- l. Mengevaluasi dan mempertanggungjawabkan hasil kerja staf ;
- m. Melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan oleh Pimpinan.

**2. Sub. Bagian Keuangan mempunyai tugas :**

- a. Menyiapkan rencana kegiatan Sub Bagian Keuangan;
- b. Menyusun laporan hasil kegiatan Sub Bagian Keuangan sebagai bahan penyusunan laporan hasil kegiatan Sekretariat;
- c. Mengatur, mendistribusikan dan mengkoordinasikan tugas-tugas staf sesuai dengan bidangnya masing-masing;
- d. Memberikan petunjuk dan bimbingan teknis serta pengawasan kepada staf ;
- e. Memeriksa hasil kerja staf ;
- f. Menyusun rencana anggaran biaya langsung dan tak langsung;
- g. Menyelenggarakan tata usaha keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku dan pedoman yang telah ditetapkan;
- h. Membuat laporan pertanggungjawaban keuangan;
- i. Mengevaluasi dan mempertanggungjawabkan hasil kerja staf ;
- j. Melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan oleh Pimpinan.

**3. Sub. Bagian Program mempunyai tugas :**

- a. Menyiapkan rencana hasil kegiatan Sub. Bagian sebagai bahan penyusunan rencana kegiatan sekretariat;
- b. Menyusun laporan hasil kegiatan Sub. Bagian sebagai bahan penyusunan laporan hasil kegiatan sekretariat;
- c. Mengatur, mendistribusikan, dan mengkoordinasikan tugas-tugas staf sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing;
- d. Memberikan petunjuk dan bimbingan teknis serta pengawasan kepada staf ;
- e. Memeriksa hasil kerja staf ;
- f. Mengadakan koordinasi dengan kepala Sub Bagian dan Bidang untuk kerhamonisan kerja;
- g. Melakukan pengumpulan, analisis dan penyajian data dibidang penanggulangan bencana;
- h. Menyiapkan bahan perumusan rencana dan program kerja berdasarkan rencana kegiatan masing-masing Bidang dan Sekretariat;
- i. Menyiapkan bahan laporan badan sebagai bahan pertanggungjawaban kepada Walikota;
- j. Menyiapkan bahan pembinaan organisasi dan tatalaksana dalam peningkatan kinerja badan;
- k. Membuat hasil laporan kegiatan sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban hasil kerja staf ;
- l. Mengevaluasi dan mempertanggungjawabkan hasil kerja staf ;
- m. Melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan oleh Pimpinan.

Masing-masing Sub. Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub. Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretariat Badan.

#### **4. BIDANG-BIDANG**

##### **4.1 Pencegahan dan Kesiapsiagaan mempunyai tugas :**

- a. Menyiapkan rencana kegiatan Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan;
- b. Menyusun laporan hasil kegiatan bidang berdasarkan laporan hasil kegiatan masing- masing Kepala Seksi dilingkungan Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan sebagai bahan penyusunan laporan pertanggungjawaban kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- c. Mengatur, mendistribusikan dan mengkoordinasikan tugas-tugas staf sesuai dengan bidangnya masing-masing;
- d. Memberikan petunjuk dan bimbingan teknis serta pengawasan kepada staf ;
- e. Memeriksa hasil kerja staf ;
- f. Melakukan serangkaian kegiatan sebagai upaya untuk menghilangkan dan atau mengurangi ancaman bencana;
- g. Melaksanakan serangkaian kegiatan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat dan berdaya guna;
- h. Mengevaluasi dan mempertanggungjawabkan hasil kerja staf ;
- i. Melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan oleh Pimpinan.

Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Pelaksana.

Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan terdiri dari :

##### **1. Seksi Pencegahan;**

##### **2. Seksi Kesiapsiagaan.**

###### **1.Seksi Pencegahan mempunyai tugas :**

- a. Menyiapkan rencana Kegiatan Seksi Pencegahan;
- b. Menyusun laporan hasil kegiatan Seksi sebagai bahan penyusunan laporan hasil kegiatan Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan;
- c. Mengatur, mendistribusikan dan mengkoordinasikan tugas-tugas staf sesuai dengan bidangnya masing-masing;

- d. Memberikan petunjuk dan bimbingan teknis serta pengawasan kepada staf ;
- e. Memeriksa hasil kerja staf ;
- f. Melakukan identifikasi dan pengenalan secara pasti terhadap sumber bahaya atau ancaman bencana;
- g. Melaksanakan kontrol terhadap penguasaan dan pengelolaan sumber daya alam yang secara tiba-tiba dan/atau berangsur berpotensi menjadi sumber bahaya bencana;
- h. Melakukan pemantauan penggunaan teknologi yang secara tiba-tiba dan/atau berangsur berpotensi menjadi sumber ancaman atau bahaya bencana;
- i. Melakukan koordinasi pengelolaan tata ruang dan lingkungan hidup;
- j. Melaksanakan penguatan ketahanan sosial masyarakat;
- k. Mengevaluasi dan mempertanggungjawabkan hasil kerja staf ;
- l. Melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan oleh Pimpinan.

**2. Seksi Kesiapsiagaan mempunyai tugas :**

- a. Menyiapkan rencana kegiatan Seksi Kesiapsiagaan;
- b. Menyusun laporan hasil kegiatan Seksi sebagai bahan penyusunan laporan hasil kegiatan Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan;
- c. Mengatur, mendistribusikan dan mengkoordinasikan tugas-tugas staf sesuai dengan bidangnya masing-masing;
- d. Memberikan petunjuk dan bimbingan teknis serta pengawasan kepada staf ;
- e. Memeriksa hasil kerja staf ;
- f. Menyiapkan penyusunan dan uji coba rencana penanggulangan kedaruratan bencana;
- g. Menyiapkan pengorganisasian, pemasangan dan pengujian peringatan dini;

- h. Menyiapkan penyediaan dan penyiapan barang pasokan pemenuhan kebutuhan dasar;
  - i. Menyiapkan pengorganisasian, penyuluhan, pelatihan dan gladi tentang mekanisme tanggap darurat;
  - j. Menyiapkan lokasi evakuasi;
  - k. Melakukan penyusunan data akurat, informasi dan pemutahiran prosedur tetap tanggap darurat bencana;
  - l. Melaksanakan penyediaan dan penyiapan bahan, barang dan peralatan untuk pemenuhan pemulihan prasarana dan sarana;
  - m. Mengevaluasi dan mempertanggungjawabkan hasil kerja staf ;
  - n. Melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan oleh Pimpinan.
- Masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan.

#### **4.2 Bidang Kedaruratan dan Logistik mempunyai tugas :**

- a. Menyiapkan rencana kegiatan Bidang Kedaruratan dan Logistik;
- b. Menyusun laporan hasil kegiatan bidang berdasarkan laporan hasil kegiatan masing masing Kepala Seksi di lingkungan Bidang Kedaruratan dan Logistik sebagai bahan penyusunan laporan pertanggungjawaban kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- c. Mengatur, mendistribusikan dan mengkoordinasikan tugas-tugas staf sesuai dengan bidangnya masing-masing;
- d. Memberikan petunjuk dan bimbingan teknis serta pengawasan kepada staf ;
- e. Memeriksa hasil kerja staf ;
- f. Melakukan dan mengkoordinasikan serangkaian kegiatan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak yang ditimbulkan;
- g. Melakukan upaya memberikan bantuan untuk memenuhi kebutuhan dasar pada saat keadaan darurat;



- h. Mengevaluasi dan mempertanggungjawabkan hasil kerja staf ;
- i. Melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan oleh Pimpinan.

Bidang Kedaruratan dan Logistik dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pelaksana.

Bidang Kedaruratan dan Logistik terdiri dari :

**1. Seksi Tanggap Darurat;**

**2. Seksi Logistik**

**1. Seksi Tanggap Darurat mempunyai tugas :**

- a. Menyiapkan rencana kegiatan Seksi Tanggap Darurat;
- b. Menyusun laporan hasil kegiatan Seksi sebagai bahan penyusunan laporan hasil kegiatan Bidang Tanggap Darurat;
- c. Mengatur, mendistribusikan dan mengkoordinasikan tugas-tugas staf sesuai dengan bidangnya masing-masing;
- d. Memberikan petunjuk dan bimbingan teknis serta pengawasan kepada staf;
- e. Memeriksa hasil kerja staf;
- f. Menyiapkan penyusunan dan uji coba rencana penanggulangan kedaruratan bencana;
- g. Menyiapkan serangkaian kegiatan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak yang ditimbulkan;
- h. Mengkoordinasikan serangkaian kegiatan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak yang ditimbulkan;
- i. Mengevaluasi dan mempertanggungjawabkan hasil kerja staf ;
- j. Melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan oleh Pimpinan.

**2. Seksi Logistik mempunyai tugas :**

- a. Menyiapkan rencana kegiatan Seksi logistik;
- b. Menyusun laporan hasil kegiatan Seksi sebagai bahan penyusunan laporan hasil kegiatan Bidang Kedaruratan dan Logistik;
- c. Mengatur, mendistribusikan dan mengkoordinasikan tugas-tugas staf sesuai dengan bidangnya masing-masing;

- d. Memberikan petunjuk dan bimbingan teknis serta pengawasan kepada staf
  - e. Memeriksa hasil kerja staf;
  - f. Menyiapkan pelaksanaan distribusi logistik;
  - g. Melaksanakan pengaturan distribusi logistik;
  - h. Mengevaluasi dan mempertanggungjawabkan hasil kerja staf;
  - i. Melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan oleh Pimpinan.
- Masing-masing Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik.

#### **4.3 Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi mempunyai tugas :**

- a. Menyusun rencana kegiatan Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi;
- b. Menyusun laporan hasil kegiatan bidang berdasarkan laporan hasil masing-masing Kepala Seksi dilingkungan Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi sebagai bahan penyusunan laporan pertanggungjawaban kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- c. Mengatur, mendistribusikan dan mengkoordinasikan tugas-tugas staf sesuai dengan bidangnya masing-masing;
- d. Memberikan petunjuk dan bimbingan teknis serta pengawasan kepada staf;
- e. Memeriksa hasil kerja staf;
- f. Melaksanakan koordinasi pelaksanaan di bidang penanggulangan bencana pada saat pasca bencana dalam hal penanganan pengungsi dengan instansi terkait, lembaga serta masyarakat;
- g. Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan di bidang penanggulangan bencana pada saat pasca bencana;
- h. Mengevaluasi dan mempertanggungjawabkan hasil kerja staf;
- i. Melaksanakan tugas dinas lainnya yang di berikan oleh Pimpinan.

Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.

Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi terdiri dari :

**1. Seksi Rehabilitasi;**

**2. Seksi Rekonstruksi.**

**1. Seksi Rehabilitasi mempunyai tugas :**

- a. Menyiapkan rencana kegiatan Seksi Rehabilitasi ;
- b. Menyusun laporan hasil kegiatan Seksi sebagai bahan penyusunan laporan hasil kegiatan Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi;
- c. Mengatur, mendistribusikan dan mengkoordinasikan tugas-tugas staf sesuai dengan bidangnya masing-masing;
- d. Memberikan petunjuk dan bimbingan teknis serta pengawasan kepada staf;
- e. Memeriksa hasil kerja staf;
- f. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan program rehabilitasi dan penanganan pasca bencana;
- g. Melaksanakan koordinasi pelaksanaan dibidang bencana pada saat rehabilitasi penanganan pengungsi dengan instansi terkait, lembaga serta masyarakat;
- h. Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan di bidang bencana pada saat rehabilitasi penanganan pengungsi;
- i. Mengevaluasi dan mempertanggungjawabkan hasil kerja staf;
- j. Melaksanakan tugas dinas lainnya yang di berikan oleh Pimpinan.

**2. Seksi Rekonstruksi mempunyai tugas :**

- a. Menyiapkan rencana kegiatan Seksi Rekonstruksi;
- b. Menyusun laporan hasil kegiatan Seksi sebagai bahan penyusunan laporan hasilkegiatan Bidang rehabilitasi dan Rekonstruksi;
- c. Mengatur, mendistribusikan dan mengkoordinasikan tugas-tugas staf sesuai denganbidangnya masing-masing;
- d. Memberikan petunjuk dan bimbingan teknis serta pengawasan kepada staf;
- e. Memeriksa hasil kerja staf;
- f. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan program rekonstruksi dalam penanganan pasca bencana;
- g. Melaksanakan koordinasi pelaksanaan di bidang bencana pada saat rekonstruksi dengan instansi terkait, lembaga serta masyarakat;

- h. Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan di bidang penanggulangan bencana pada saat rekonstruksi;
- i. Mengevaluasi dan mempertanggungjawabkan hasil kerja staf;
- j. Melaksanakan tugas dinas lainnya yang di berikan oleh Pimpinan.

Masing-masing Seksi dipimpin oleh Seorang Kepala Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi.

#### D. ASPEK STRATEGIS

Sebagai lembaga Pemerintah, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bima dituntut untuk dapat mewujudkan *Good Governance* atau *Kepemerintahan yang baik*. Pengertian *Kepemerintahan yang baik (good governance)*, dapat diidentifikasi dengan indikator-indikator yang terkandung didalamnya. UNDP (LAN; 2000) mengajukan karakteristik *good governance*, sebagai berikut :

- *Participation* ; Setiap warga negara mempunyai suara dalam pembuatan keputusan, baik secara langsung maupun secara intermediasi institusi legitimasi yang mewakili kepentingannya. Partisipasi seperti ini dibangun atas dasar keabsahan berasosiasi dan berbicara serta berpartisipasi secara konstruktif.
- *Rule of law* ; Kerangka hukum harus adil dan dilaksanakan tanpa pandang bulu, terutama hukum untuk hak azasi manusia.
- *Transparancy* ; Transparansi dibangun atas dasar kebebasan arus informasi. Proses-proses, lembaga dan informasi yang secara langsung dapat diterima oleh mereka yang membutuhkan.
- *Responsive* ; Lembaga-lembaga dan proses-proses harus mencoba untuk melayani setiap stake holders.
- *Consensus Orientation* ; *Good governance* menjadi perantara kepentingan yang berbeda untuk memperoleh pilihan terbaik bagi kepentingan yang lebih luas, baik dalam kebijakan-kebijakan maupun prosedur-prosedur.

- *Equity* ; Semua warga negara, baik laki-laki maupun perempuan mempunyai kesempatan untuk meningkatkan atau menjaga kesejahteraan mereka.
- *Effectiveness and efficiency* ; Proses-proses dan lembaga-lembaga menghasilkan sesuai dengan apa yang telah digariskan dengan menggunakan sumber-sumber yang tersedia sebaik mungkin.
- *Accountability* ; Para pembuat keputusan dalam pemerintahan, sektor swasta dan masyarakat (*civil society*) bertanggung jawab kepada publik dan lembaga-lembaga *stakeholders*. Akuntabilitas ini tergantung pada organisasi dan sifat keputusan yang dibuat, apakah keputusan tersebut untuk kepentingan internal atau eksternal organisasi.
- *Strategic vision* ; Para pemimpin dan publik harus mempunyai perspektif *good governance* dan pengembangan yang luas dan jauh kedepan sejalan dengan apa yang diperlukan untuk pembangunan semacam ini.

Nilai yang terkandung dari pengertian serta karakteristik *good governance* tersebut diatas merupakan nilai-nilai yang universal sifatnya dan sesuai dengan cita-cita perjuangan bangsa Indonesia sebagaimana tertuang dalam PROPENAS 2004-2009, karena itu diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan nyata sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna dan berhasil guna. Kondisi semacam ini perlu adanya akuntabilitas dan tersedianya akses yang sama pada informasi bagi masyarakat luas. Hal ini merupakan fondasi legitimasi dalam sistem demokrasi, mengingat prosedur dan metode pembuatan keputusan harus transparan agar supaya memungkinkan terjadinya partisipasi efektif. Kondisi semacam ini mensyaratkan bagi siapa saja yang terlibat dalam pembuatan keputusan, baik itu pemerintah, sektor swasta maupun masyarakat, harus bertanggung jawab kepada publik serta kepada institusi *stakeholders*. Disamping itu, institusi *governance* harus efisien dan efektif dalam melaksanakan fungsi-fungsinya, responsif terhadap kebutuhan masyarakat, memberikan fasilitas dan peluang ketimbang melakukan kontrol serta melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Selain hal di atas Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bima dihadapkan pada isu – isu strategis yang harus disikapi, isu strategis yang dimaksud antara lain :

- a. Secara Geografis Kota Bima memiliki berbagai potensi bencana yang beragam yang harus disikapi dengan berbagai program dan kegiatan yang focus pada penanggulangan baik pra bencana, tanggap darurat maupun pasca bencana, Bencana tersebut antara lain : Banjir, Tanah Longsor Angin putting beliung, Angin kencang, Kebakaran, Gempa Bumi, dan Bencana Sosial;
- b. Rendahnya tingkat pemahaman masyarakat terhadap penanggulangan bencana masih menitikan harapan besar hanya kepada pemerintah, padahal tanggung jawab penanggulangan bencana adalah merupakan tanggung jawab bersama antara Pemerintah, Masyarakat dan dunia usaha;
- c. Besarnya biaya untuk rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana mengharuskan semua pihak untuk sadar dan lebih bijaksana untuk mengedepankan upaya – upaya mitigasi dan kesiapsiagaan dalam rangka mengurangi risiko akibat bencana. Jika Anggaran program pengurangan risiko bencana diperbesar maka dapat menghemat hingga sampai 7 (Tujuh) kali lipat dibandingkan biaya Rehabilitasi dan Rekonstruksi pasca bencana.

## **E. STRUKTUR ORGANISASI**

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah yang paling muda di Kota Bima yang memiliki Tugas Pokok dan Fungsi Merumuskan dan menetapkan kebijakan penanggulangan Bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat, dan tepat, efektif dan efisien serta pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh.berdasarkan Perda No. 5 Tahun 2010 Tanggal 28 Juli tahun 2010 Tentang Organisasi dan tata kerja Lembaga lain sebagai bagian dari Perangkat Daerah, maka susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bima terdiri dari : (Skema Struktur Organisasi Terlampir):

### **1. UNSUR PENGARAH**

Unsur Pengarah terdiri dari:

- 1) Unsur pengarah sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 huruf b berada dibawah dan

- bertanggungjawab langsung kepada Kepala BPBD;
- 2) Unsur pengarah terdiri dari ketua dan anggota;
  - 3) Ketua unsur pengarah dijabat oleh Kepala BPBD;
  - 4) Unsur pengarah beranggotakan 9 (Sembilan) orang yang terdiri dari atas:
    - a. 5 (lima) orang pejabat pemerintah daerah, yaitu:
      1. Asisten Perekonomian dan Pembangunan;
      2. Kepala Dinas Sosial dan Tenaga Kerja;
      3. Kepala BAPPEDA;
      4. Kepala Dinas Pekerjaan Umum;
      5. Kepala Dinas Kesehatan.
    - b. 4 (empat) orang dari masyarakat professional di daerah.

## **2. UNSUR PELAKSANA**

Unsur Pelaksana terdiri dari :

1. Kepala Pelaksana
2. Sekretariat terdiri dari :
  - 2.1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
  - 2.2. Sub Bagian Keuangan
  - 2.3. Sub Bagian Program dan pelaporan
3. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan terdiri dari :
  - 3.1. Seksi Pencegahan
  - 3.2. Seksi Kesiapsiagaan
4. Bidang Kedaruratan dan Logistik terdiri dari :
  - 4.1. Seksi Tanggap Darurat
  - 4.2. Seksi logistik
5. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi terdiri dari :
  - 5.1. Seksi Rehabilitasi
  - 5.2. Seksi Rekonstruksi

## **F. SISTEMATIKAN PENYUSUNAN**

Sistematika Penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bima Tahun 2015 adalah sebagai berikut :

1. BAB I – Pendahuluan, menjelaskan secara ringkas latar Belakang, Isu Strategis dan Struktur Organisasi.
2. BAB II – Perencanaan Kinerja, memuat ringkasan / ikhtisar perjanjian kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bima tahun 2015.
3. BAB III – Akuntabilitas Kinerja, menjelaskan Capaian Kinerja Organisasi dan Realisasi Anggaran.
4. BAB IV – Penutup, menjelaskan simpulan menyeluruh dari laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bima Tahun 2015 atas capaian organisasi serta langkah di masa mendatang untuk meningkatkan kinerjanya.

#### LAMPIRAN - LAMPIRAN

1. STURUKTUR ORGANISASI BPBD
2. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017
3. REALISASI KEUANGAN
4. REALISASI DANA TAK TERDUGA TAHUN 2017
5. DAFTAR SARANA DAN PRASARANA BPBD

## **BAB II**

### **PERENCANAAN KINERJA**

#### **A. RPJMD REVIEU 2013-2018**



## 1. Kebijakan Umum Daerah

Dalam mewujudkan capaian keberhasilan pembangunan, Pemerintah Daerah Kota Bima menetapkan rangkaian program sesuai dengan Urusan Wajib dan Urusan Pilihan yang dilaksanakan oleh SKPD di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Bima. Penetapan program pembangunan dan penanganan urusan pembangunan yang disesuaikan dengan misi pembangunan daerah adalah :

### **Misi 1:**

**Membentuk manusia yang BERIMAN melalui penguatan serta peningkatan nilai-nilai ajaran agama untuk membentuk karakter manusia yang religius sehingga dapat membendung dan membentengi dari nilai-nilai yang merusak moral dan aqidah serta tetap mengembangkan dan melestarikan nilai-nilai budaya lokal**

#### A. ARAH KEBIJAKAN

1. Meningkatkan kualitas pemahaman, penghayatan, dan pengamalan ajaran agama
2. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana keagamaan
3. Meningkatkan upaya pembinaan lembaga-lembaga keagamaan dan petugas keagamaan
4. Mendorong terwujudnya hubungan yang harmonis antar umat beragama, etnik dan kelompok sosial masyarakat.
5. Menggali dan mengembangkan seni, budaya daerah dan kearifan lokal.

#### B. PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

1. Program Pembinaan dan Peningkatan Pelayanan Keagamaan
2. Program pengembangan wawasan kebangsaan
3. Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat)
4. Program Pengembangan Nilai Budaya
5. Program Pengelolaan Kekayaan Budaya
6. Program Pengelolaan Keragaman Budaya

### **Misi 2:**

**Menciptakan manusia yang MAJU melalui peningkatan kualitas sumberdaya manusia sehingga mempunyai tingkat intelektualitas yang tinggi, memiliki daya saing, dan menguasai teknologi, didukung oleh tingkat kesehatan baik jasmani maupun rohani, mental-spiritual**

#### A. ARAH KEBIJAKAN

1. Bantuan pendidikan bagi siswa miskin
2. Peningkatan penuntasan wajib belajar

3. Pembinaan perpustakaan dan Peningkatan minat baca masyarakat
4. Peningkatan pengetahuan dan ketrampilan guru terhadap penggunaan TIK
5. Peningkatan sarana dan prasarana TIK
6. Peningkatan Angka Harapan Hidup
7. Peningkatan daya beli masyarakat
8. Meningkatkan pemerataan pendidikan
9. Peningkatan kesempatan kerja
10. Peningkatan kualitas tenaga kerja
11. Penguatan peran TKPKD
12. Pengurangan jumlah penduduk miskin
13. Peningkatan pelayanan kesehatan ibu dan anak
14. Peningkatan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan
15. Peningkatan dan pemerataan pelayanan kesehatan dasar bagi penduduk miskin
16. Peningkatan pelayanan gizi keluarga
17. Peningkatan penyehatan lingkungan

#### B. PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

1. Program wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun
2. Program Pendidikan Menengah
3. Program Manajemen Pendidikan
4. Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan
  
5. Program Peningkatan Kualitas dan Produktifitas Tenaga Kerja
6. Program Peningkatan Kesempatan Kerja
7. Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan
8. Program Peningkatan Kualitas dan Produktifitas Tenaga Kerja
9. Program Pendidikan Anak Usia Dini
10. Program Pendidikan Informal
11. Program Manajemen Pendidikan
12. Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) Dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (Pmks) Lainnya
13. Program Pelayanan Dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
14. Program Pembinaan Para penyandang Cacat dan Trauma
15. Program Peningkatan Kesempatan Kerja
16. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan/Kelurahan
17. Program pembangunan infrastruktur pedesaan
18. Program Upaya Kesehatan Masyarakat
19. Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana/prasarana puskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannya
20. Program obat dan perbekalan kesehatan
21. Program Perbaikan Gizi Masyarakat
22. Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan
23. Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan

### **Misi 3:**

**Mewujudkan masyarakat yang ADIL melalui pembangunan yang merata dimana masyarakat memiliki akses dan tingkat pelayanan pemerintahan yang prima**

#### **A. ARAH KEBIJAKAN**

1. Peningkatan pelayanan air bersih
2. Perlindungan sumber mata air
3. Pengembangan data base perumahan
4. Peningkatan penanganan rumah tidak layak huni
5. Pengembangan data base perumahan
6. Peningkatan penanganan rumah tidak layak huni
7. Peningkatan sarana dan prasarana pedesaan
8. Peningkatan prasarana jalan ekonomi
9. Peningkatan system perencanaan dan penganggaran daerah
10. Peningkatan pengawasan dan system pengendalian internal pemerintah
11. Peningkatan kualitas sumber daya aparatur sipil negara
12. Peningkatan penganggaran, penatausahaan dan pelaporan keuangan daerah
13. Peningkatan pendapatan daerah
14. Peningkatan dan percepatan implementasi roadmap reformasi birokrasi.
15. Peningkatan pelayanan perijinan

#### **B. PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH**

1. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah
2. Program penyediaan dan pengolahan air baku
3. Program Pengembangan perumahan
4. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan
5. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan/Kelurahan
6. Program Pembangunan Jalan dan Jembatan
7. Program Pembangunan Sarana Ekonomi Pedesaan
8. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
9. Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah
10. Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan
11. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH
12. Progra, Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
13. Program Peningkatan Pengelolaan Aset/Barang Milik Daerah
14. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

## 15. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Perijinan

### Misi 4:

**Menjadikan masyarakat SEJAHTERA berbasiskan pembangunan ekonomi lokal dengan penyediaan infrastruktur yang memadai dan diikuti perluasan akses ekonomi dalam upaya penguatan struktur ekonomi lokal yang berdaya saing dengan dukungan stabilitas sosial politik dan keamanan**

#### A. ARAH KEBIJAKAN

1. Peningkatan pembangunan pertanian kehutanan perikanan
2. Peningkatan produktifitas sektor perdagangan besar dan eceran
3. Peningkatan pembangunan sektor Perhubungan dan Pergudangan
4. Peningkatan kualitas pelaku usaha ekonomi produktif
5. Perluasan kesempatan kerja dan berusaha
6. Peningkatan pendapatan perkapita
7. Peningkatan penggunaan teknologi produksi
8. Peningkatan pelaksanaan pelatihan ketrampilan
9. Peningkatkan produktifitas pertanian
10. Peningkatan produktifitas perikanan
11. Peningkatan ketahanan pangan
12. Peningkatkan produktifitas pertanian
13. Peningkatan produktifitas perikanan
14. Peningkatan ketahanan pangan
15. Peningkatan kemantapan jalan dan jembatan
16. Peningkatan kualitas sanitasi lingkungan
17. Peningkatan jaringan irigasi
18. Peningkatan sarana dan prasarana perhubungan
19. Peningkatan utilitas perkotaan
20. Penataan kawasan perkotaan
21. Peningkatan peran serta masyarakat dalam pemeliharaan keamanan dan ketertiban
22. Peningkatan koordinasi penyelesaian tindak kriminalitas
23. Peningkatan kerjasama dan koordinasi Pemerintah daerah dengan aparat keamanan
24. Peningkatan pemahaman masyarakat dan anak sekolah tentang bahaya narkoba
25. Peningkatan kerjasama dan koordinasi dengan BNN Daerah dalam pemberantasan peredaran narkoba

#### A. PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

1. Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan
2. Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya
3. Program Peningkatan Ketahanan Pangan
4. Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian Perkebunan Lapangan

5. Program Pembangunan Jalan dan Jembatan
6. Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan
7. Program Pengembangan Perumahan
8. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan
9. Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya
10. Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan
11. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana perhubungan
12. Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan
13. Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh
14. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pertamanan
15. Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal
16. Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (PEKAT)

## 2. Prioritas Pembangunan Daerah

Prioritas pembangunan daerah Kota Bima tahun 2003-2018 yang berkaitan dengan urusan yang ditangani BPBD adalah pada urusan **Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian** adalah sebagai berikut :

- a. Kesejahteraan Sosial;
- b. Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik;
- c. Pembangunan Agama
- d. Infrastruktur dan konektivitas wilayah;
- e. Pembangunan ekonomi
- f. Ketahanan Pangan;
- g. Pembangunan Perumahan dan Permukiman;
- h. Pembangunan Kesehatan
- i. Pembangunan Pendidikan;
- j. Penanggulangan Kemiskinan;
- k. Lingkungan Hidup;
- l. Penanggulangan Bencana;
- m. Ketertiban dan Keamanan.

## **B. RENCANA STRATEGIS TAHUN 2014-2018**

Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah rencana strategis merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh instansi pemerintah agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategic local, nasional dan global.

Rencana strategis adalah dokumen perencanaan tentang program dan kegiatan yang akan dilaksanakan mulai tahun 2014 sampai dengan tahun 2018, dengan demikian tahun 2017 ini merupakan tahun ke IV dari pelaksanaan Rencana strategis Badan Penanggulangan Bencana Kota Bima.

### **1. Visi**

Visi dan Misi merupakan penjabaran dari Visi KOTA BIMA Tahun 2005 – 2025 dan Visi Walikota Tahun 2013 – 2018. Telah diterjemahkan dalam RPJMD Periode ke dua yaitu RPJMD Tahun 2013 – 2018 adalah " "Terwujudnya Kota Bima Sebagai Kota Perdagangan Dan Jasa Yang Beriman, Maju, Adil Dan Sejahtera". Dengan memperhatikan Visi tersebut, tersusunlah Visi dan Misi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Bima Tahun 2014 – 2018 sebagai berikut :

***"TERWUJUDNYA KOTA BIMA YANG TANGGUH DAN MANDIRI MELALUI PENANGANAN BENCANA YANG TANGGAP, CEPAT DAN TEPAT".***

## **2. Misi**

Sejalan dengan Visi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bima maka Misi yang dilaksanakan adalah :

1. Meningkatkan Kapasitas SDM Aparatur dalam penanganan bencana secara cepat dan tepat
2. Meningkatkan Koordinasi dalam Penanganan Bencana dengan Instansi terkait.
3. Meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana melalui peningkatan peran serta stakeholders penanggulangan bencana dalam Pengurangan Resiko bencana;
4. Terwujudnya penanggulangan kedaruratan bencana secara cepat, tepat dan efektif ,terkoordinir dan /terpadu;
5. Terwujudnya pemulihan sarana dan prasarana fisik dan non fisik di wilayah pasca bencana secara terpadu dan menyeluruh.

## **3. Tujuan**

Adapun tujuan dari pada Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bima ini adalah:

1. Meningkatkan ketangguhan Kota terhadap bencana
2. Meningkatnya Kapasitas Aparatur dan Tim Penanggulangan Bencana
3. Terwujudnya penanggulangan bencana yang terencana, terpadu dan menyeluruh
4. Terwujudnya penyelenggaraan penanggulangan kedaruratan bencana secara cepat dan tepat
5. Terwujudnya pemulihan Sarana dan Prasarana Fisik dan Non Fisik Pasca Bencana

Di dalam mewujudkan Visi dan Misi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bima ditempuh melalui strategi utama yaitu : Terwujudnya Ketangguhan Kota dalam penanggulangan bencana

#### 4. Kebijakan

Kebijakan yang dilembagakan meliputi :

1. Kebijakan pengembangan sumber daya aparatur dan tim Penanggulangan bencana melalui peningkatan pelatihan, Gladi/simulasi dan kompensasi
2. Mendorong terwujudnya koordinasi yang efektif dengan semua stakeholder dalam perencanaan, kesiapsiagaan, kedaruratan dan rehabilitasi pasca bencana.
3. Meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana serta peningkatan peran serta masyarakat, dan dunia usaha melalui program – program Pengurangan Resiko bencana dan Kelurahan tangguh bencana
4. Mendorong tersedianya data dan dokumen – dokumen kebencanaan sebagai upaya kesiapsiagaan dalam mendukung terselenggaranya penyelenggaraan penanggulangan bencana
5. Mendorong terwujudnya penyelenggaraan penanggulangan kedaruratan bencana secara cepat, tepat dan efektif ,terkoordinir dan /terpadu;
6. Melakukan upaya – upaya pemulihan sarana dan prasarana baik fisik maupun non fisik di wilayah pasca bencana secara terpadu dan menyeluruh.



### C. PENETAPAN KINERJA TAHUN 2017

Perencanaan Kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis, yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Penyusunan Rencana Kinerja dilaksanakan seiring dengan agenda penyusunan dari kebijakan anggaran serta merupakan komitmen bagi instansi untuk mencapainya dalam tahun tertentu yang tertuang dalam perjanjian kinerja/penetapan kinerja tahun 2017

Dokumen Rencana Kinerja memuat informasi tentang sasaran yang ingin dicapai dalam tahun yang bersangkutan, Indikator Kinerja Sasaran, dan Rencana Capaiannya; Program, Kegiatan, serta Kelompok Indikator Kinerja dan Rencana Capaiannya. Indikator Kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian sasaran yang telah ditetapkan. Penetapan Indikator Kinerja harus didasarkan pada perkiraan yang realistis dengan memperhatikan tujuan dan sasaran yang ditetapkan serta data pendukung yang harus di organisasi.

Untuk merealisasikan sejumlah kegiatan tersebut tentu diperlukan sumber dana sebagai salah satu prasyarat keberhasilan suatu rencana. Dana tersebut juga merupakan salah satu unsur *input* yang harus dipenuhi dan mempunyai tolok ukur tersendiri. Dengan demikian mudah dipahami bahwa dalam menyusun Rencana Strategik dan Rencana Kinerja Tahunan, tidaklah terlepas dari sistem penganggaran pada organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bima.

Pada prinsipnya Penetapan Kinerja Tahunan Tahun 2017 ini akan menguraikan target kinerja yang hendak dicapai oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bima selama Tahun 2017. Target kinerja menggambarkan nilai kuantitatif yang harus dicapai dari semua indikator kinerja yang melekat pada setiap kegiatan maupun di tingkat sasaran. Target kinerja pada tingkat sasaran akan dijadikan tolok ukur keberhasilan organisasi dalam upaya mencapai misi dan visinya. Sedangkan target kinerja dalam tingkat kegiatan digunakan untuk mengukur efisiensi dan efektivitas suatu kegiatan. Perjanjian Kinerja / Penetapan kinerja BPBD Kota Bima Tahun 2017 adalah diuraikan dalam ikhtisar berikut :

**Misi I : Meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana melalui peningkatan peran serta stakeholders penanggulangan bencana dalam Pengurangan Risiko bencana;**

**Tujuan : Meningkatkan ketangghuan kota terhadap bencana**

Sasaran	Indikator	Target
1	2	3
Meningkatnya peran aktif masyarakat dalam pengurangan risiko bencana	Porsentase Kelurahan Tangguh Bencana	66 %

**Misi II : Meningkatkan Kapasitas SDM Aparatur dalam penanganan bencana secara cepat dan tepat**

**Tujuan : Meningkatkan kapasitas Aparatur dan tim Penanggulangan Bencana**

Sasaran	Indikator	Target
1	2	3
Meningkatnya kapasitas aparatur dan tim penanggulangan bencana	Jumlah SDM yang Terlatih	180 Orang

**Misi III : Meningkatkan Koordinasi dalam Penanganan Bencana dengan Instansi terkait.**

**Tujuan : Terwujudnya Penanggulangan bencana yang terencana, terpadu dan menyeluruh**

Sasaran	Indikator	Target
1	2	3
Tersedianya pedoman dalam penanggulangan bencana yang terencana, terpadu dan menyeluruh	Jumlah dokumen penanggulangan bencana yang tersedia menjadi pedoman PB	1 Dok

**Misi IV : Terwujudnya penanggulangan kedaruratan bencana secara cepat, tepat dan efektif ,terkoordinir dan /terpadu;**

**Tujuan : Terwujudnya penyelenggaraan Penanggulangan kedaruratan bencana secara tepat dan tepat**

Sasaran	Indikator	Target
1	2	3
Meningkatnya efektifitas Penyelenggaraan penanggulangan kedaruratan bencana secara cepat dan tepat	Porsentase penanganan kedaruratan bencana	100 %
	Porsentase ketersediaan Sarana dan prasarana penunjang saat bencana	80 %

**Misi V : Terwujudnya pemulihan sarana dan prasarana fisik dan non fisik di wilayah pasca bencana secara terpadu dan menyeluruh.**

**Tujuan : Terwujudnya pemulihan sarana dan prasarana fisik dan non fisik pasca bencana**

Sasaran	Indikator	Target
1	2	3
Terwujudnya pemulihan sarana dan prasarana fisik dan non fisik pasca bencana	Porsentase rehabilitasi dan rekonstruksi sarana prasarana fisik dan non fisik pasca bencana	80 %

Secara lengkap Perjanjian kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bima Tahun 2017 dapat dilihat pada tabel 1 lampiran lakip ini.

## BAB III

### AKUNTABILITAS KINERJA

#### A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) merupakan wujud nyata Instansi Pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan/kegagalan kepada pemberi mandat atas pelaksanaan kegiatan dan program dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran dalam suatu media pelaporan (LAKIP). Penyusunan LAKIP Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bima Tahun 2017 ini didasarkan kepada keluaran dan evaluasi pelaksanaan Rencana Strategis dan Rencana Kinerja Tahun 2017 yang telah ditetapkan sebelumnya setelah berakhirnya pelaksanaan kegiatan pada Tahun Anggaran 2017.

Capaian kinerja organisasi adalah hasil pengukuran dari setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi yang dianalisa dan membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini, membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir, serta membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target Renstra BPBD Kota Bima. Disamping itu juga di analisis penyebab keberhasilan dan kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusinya, analisis efisiensi penggunaan sumber daya serta program dan kegiatan yang menunjang keberhasilan dan kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Sesuai dengan perjanjian Kinerja Pemerintah Kota Bima Tahun 2017, Sasaran Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bima tahun 2017 adalah : Terwujudnya Ketangguhan Kota dalam Penanggulang Bencana.

Untuk mencapai ketangguhan Kota dalam hal penanggulangan bencana terdapat 5 (Lima) indikator utama yang perlu direalisasikan sesuai dengan indikator kinerja Utama yang tertuang dalam IKU pada penetapan kinerja organisasi yang telah ditetapkan pada awal tahun 2017. Pencapaian sasaran strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bima adalah dapat diuraikan secara detail pada analisa pencapaian masing – masing sasaran berikut :

#### 1. Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 1 (S1): Persentase Kelurahan Tangguh Bencana

Secara Geografis Wilayah Kota Bima memiliki potensi bencana yang cukup banyak antara lain, Gempa Bumi, Angin puting beliung, Banjir, tanah longsor, Kebakaran, kekeringan, abrasi pantai dan bencana sosial. Wilayah Kota Bima yang dilewati oleh 7 sungai besar menyebabkan terjadinya luapan banjir yang setiap tahun terjadi, hal ini diperburuk lagi dengan adanya sistem drainase yang kurang bagus termasuk juga terjadinya alih fungsi daerah resapan menjadikan

hampir seluruh kelurahan di wilayah kota Bima mendapat ancaman banjir terutama daerah hilir seperti Kelurahan Paruga, Sarae, Tanjung, Nae, Penaraga, Penatoi, jatiwangi dll.

Ketangguhan dapat diartikan sebagai kesiapan masyarakat untuk menghadapi segala risiko yang terjadi akibat bencana, sehingga dapat memiliki daya lenting untuk kembali bangkit dan mendapat akses baik akses ekonomi, sosial, fisik maupun lingkungan sehingga Upaya membangun ketangguhan masyarakat harus dilakukan secara komprehensif dan menyeluruh dengan melibatkan berbagai pihak baik pemerintah, swasta dan masyarakat,

Menyadari hal tersebut diatas Pemerintah Kota Bima menetapkan Target Kinerja kelurahan tangguh sampai dengan tahun 2018 sebanyak 38 Kelurahan untuk membentuk Kelurahan tangguh tingkat pratama.

Sampai dengan tahun 2017, Sasaran Strategis 1 (S1) Persentase kelurahan tangguh bencana yang dibentuk sebesar 68,4 % dari 38 kelurahan yang akan dibentuk, dimana pada tahun 2016 persentase terbentuk kelurahan tangguh sebesar 53 % atau 20 Kelurahan dari 38 kelurahan yang akan dituntaskan sampai tahun 2018, pada tahun ini kelurahan yang dibentuk sebanyak 6 Kelurahan yaitu 5 kelurahan dari Dana APBD II dan 1 Kelurahan dari Dana APBD I Provinsi. sedangkan kelurahan bentukan dari dana APBN/BNPB tahun ini sebanyak 0 (tidak ada), akan tetapi tahun 2017 ini BPBD mendapat alokasi untuk mengembangkan Kelurahan tangguh tingkat madya di 2 Kelurahan yaitu Kelurahan Sarae dan kelurahan Paruga. sampai dengan tahun 2017 ini Kelurahan tangguh yang dibentuk sebanyak 26 Kelurahan. Tabel ketercapaian Sasaran Strategis 1 dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel. Realisasi Target Kinerja Sasaran Strategis 1 (S1) : Persentase Kelurahan tangguh bencana**

No	Indikator Sasaran	Program/Kegiatan	Target kinerja Keg	Realisasi	Target Kinerja Sasaran	Realisasi				Total	%
						2017	APBD II	APBD I	BNPB		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Persentase Kelurahan Tangguh bencana	1	Program Kesiapsiagaan		66	53	65,8%	2,8	0	68,4	103,64
		1	Pembentukan Kelurahan Tangguh	25 Kel	26 Kel	%	%	Kel	Kel	Kel	

Dari tabel di atas dapat dijelaskan bahwa realisasi kinerja pada target kinerja sasaran Strategis 1 (S1) adalah sebesar 103,64 %, pencapaian sasaran strategis ini diperoleh melalui kegiatan Pembentukan Kelurahan tangguh pada program kesiapsiagaan. 5 Kelurahan dapat direalisasikan melalui anggaran APBD II pada DPA BPBD Kota Bima, melalui APBD I sebanyak 1 Kelurahan dan Bantuan BNPB Pusat tidak ada. Realisasi kelurahan tangguh yang di bentuk tahun 2017 sebanyak 6 Kelurahan sehingga total jumlah kelurahan tangguh bencana yang terbentuk sampai dengan tahun 2017 adalah sebanyak 26 Kelurahan sehingga melebihi target

pada tahun 2017 sebanyak 25 Kelurahan karena adanya bantuan pendanaan dari APBD I provinsi NTB.

Tabel. Perbandingan Jumlah Kelurahan Tangguh Tahun 2014 dan 2015

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	CAPAIAN (%)			Target Sasaran				Ketercapaian (%)				
			2014	2015	2016	2017	2014	2015	2016	2017	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=4/8*100	13=5/9*100	14=6/10*100	15=6/9*100
	Meningkatnya peran aktif masyarakat dalam pengurangan risiko bencana	Persentase Kelurahan tangguh bencana	15,79	39,47	52,63	65,8	15,79	39,47	52,63		100	100	100	

Dari tabel di atas dapat di jelaskan sasaran strategis 1 (S1) mulai tahun 2014, hingga tahun 2016 dapat terealisasi sebesar 100 % sedangkan tahun 2017 ini dapat terealisasi sebesar 103,64 % atau secara kumulatif Kelurahan tangguh terbentuk sebanyak 26 Kelurahan. Realisasi sasaran strategis sampai dengan tahun 2016 dapat terlihat pada tabel berikut :

Tabel. Capaian Renstra pada Sasaran Strategis 1 (S1)

Sasaran Strategis 1 (S1)	Target/ tahun					Total Kelurahan	Realisasi (%)						Total Capaian sd thn 2016	%
	2014	2015	2016	2017	2018		2015	%	2016	%	2017	%		
Jumlah Kelurahan tangguh Bencana	6	15	20	25	38	38	39,47	100	52,63	100	68,4	103,64	26	68,4

Tabel diatas dapat dijelaskan bahwa target sasaran sampai dengan tahun 2018 adalah sebanyak 38 Kelurahan. Maka jika dibandingkan dengan target renstra sampai dengan tahun 2018 sebanyak 38 Kelurahan maka total reaisasi Sasaran strategi (S1) sampai tahun 2017 adalah 68,4% dari target sebesar 100 %.sampai dengan tahun 2018.

Dalam proses pembentukan Kelurahan Tangguh di masyarakat, rangkaian kegiatan yang dilakukan adalah :

- 1, Melakukan PCVA (Partisipatory kapasitas and vulnerability Apraisal) untuk mendapatkan informasi awal tentang kapasitas, kerentanan yang ada di kelurahan
  3. Mengkaji Lebih mendalam tentang Kapasitas dan kerentanan terhadap ancaman yang ada di kelurahan
  4. Bersama masyarakat menyusun SOP dan Rencana Aksi masyarakat
  5. Membentuk Relawan penanggulangan bencana
- Output yang dihasilkan dalam kegiatan tersebut adalah terdiri dari :
- a. Tersusunnya Dokumen Analisa Risiko bencana
  - b. Tersusunnya Dokumen Rencana Aksi Masyarakat
  - c. Penetapan Jalur Evakuasi di Kelurahan/SOP Peringatan Dini Bencana
  - d. Adanya SK Relawan Kelurahan (TSBK)

Tujuannya adalah masyarakat dapat mengenali potensi ancaman yang ada di masyarakat, menganalisa kerentanan yang dimiliki dan kapasitas sebagai sumber daya yang mendukung daya lenting kembali jika terjadi bencana. Sehingga masyarakat secara mandiri melakukan upaya awal untuk penyelamatan diri dan keluarga sebelum pihak lain datang membantu. Kelurahan tangguh yang dibentuk pada tingkat pratama pada tahun 2017 adalah sebanyak 6 Kelurahan 5 Kelurahan dibentuk melalui APBD II dan 1 Kelurahan dibentuk melalui APBD I. sementara Kelurahan tangguh pada tingkat pengembangan yaitu pada tingkat Madia atau utau tingkat utama sebanyak 2 kelurahan yang dibentuk melalui Dana APBN melalui Kegiatan Pengembangan Desa Tangguh pada Kedeputian Pencegahan dan Kesiapsiagaan Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Berikut disajikan Daftar Kelurahan tangguh yang dibentuk sampai dengan tahun 2017

Tabel. Daftar Kelurahan tangguh yang dibentuk sampai dengan tahun 2017

No	Nama Kelurahan/ tahun pembentukan	Tingkat ketangguhan	Sumber Dana Pembentukan	Ket
I	<b>2014</b>			
1	Kel Jatiwangi	Pratama	Donor/OXFAM	Jumlah Kelurahan tangguh yang dibentuk sampai tahun 2017 pada tingkat pratama sebanyak 26 Kelurahan, 6 Kel bersumber dari Donor/OXFAM, 15 Kel bersumber dari APBD II/Kota Bima dan 3 Kel dari Dana APBD I/Provinsi dan 2 Kelurahan dari Dana APBN/BNPB, sedangkan pembentukan Kelurahan pada tingkat pengembangan pada tingkat Madya adalah 2 Kelurahan yang bersumber dari Dana APBN/BNPB
2	Kel Kendo	Pratama	Donor/OXFAM	
3	Kel Kolo	Pratama	Donor/OXFAM	
4	Kel Ntobo	Pratama	Donor/OXFAM	
5	Kel Nungga	Pratama	Donor/OXFAM	
6	Kel Tanjung	Pratama	Donor/OXFAM	
II	<b>2015</b>			
1	Kel Lampe	Pratama	APBD II/Kota	
2	Kel Melayu	Pratama	APBD II/Kota	
3	Kel NaE	Pratama	APBD II/Kota	
4	Kel PenanaE	Pratama	APBD II/Kota	
5	Kel Jatibaru	Pratama	APBD II/Kota	
6	Dodu	Pratama	APBD I/Provinsi	
7	Manggemaci	Pratama	APBD I/Provinsi	
8	SaraE	Pratama	APBN/BNPB	
9	Paruga	Pratama	APBN/BNPB	
III	<b>2016</b>			
1	Kel Lewirato	Pratama	APBD II/Kota	
2	Kel Penatoi	Pratama	APBD II/Kota	

3	Kel Pane	Pratama	APBD II/Kota	
4	Kel Penaraga	Pratama	APBD II/Kota	
5	Kel Dara	Pratama	APBD II/Kota	
IV	<b>2017</b>			
1	Kel Lelamase	Pratama	APBD II/Kota	
2	Kel Santi	Pratama	APBD II/Kota	
3	Kel Mande	Pratama	APBD II/Kota	
4	Kel Sadia	Pratama	APBD II/Kota	
5	Kel Monggonao	Pratama	APBD II/Kota	
6	Kel Matakando	Pratama	APBD I/Provinsi	
7	Kel SaraE	Madya	APBN/BNPB	
8	Kel Paruga	Madya	APBN/BNPB	

Selama tahun 2017, dalam pelaksanaan pembentukan Kelurahan tangguh bencana terdapat Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya yaitu, terbatasnya SDM di BPBD terutama tenaga fasilitator pembentukan kelurahan tangguh, namun antisipasi yang dilakukan adalah menggandeng Forum PRB Mbojo Matenggo untuk menjadi tenaga fasilitator untuk menambah fasilitator yang tersedia di BPBD. selain itu, bagi Kelurahan tangguh yang telah terbentuk sebelumnya menjadi sedikit fakum dalam melaksanakan program kerjanya oleh Relawan/ TSBK karena selain kurangnya pembinaan yang kontinyu dari BPBD juga terdapat beberapa kelurahan yang fakum karena adanya beberapa relawan yang kurang konsisten terhadap tugas kerelawanannya sehingga dapat mengganggu semangat bagi rekannya yang lain.

Selama tahun 2017 BPBD bekerja sama dengan OXFAM melakukan pendampingan bagi TSBK untuk dapat mengembangkan usaha ekonomi makro sebagai salah satu upaya mengurangi dampak perubahan iklim. seperti adanya Kelompok Bank sampah SaraE, Kelompok Ekonomi Makro lainnya seperti Penanaman Pohon buah dan tanaman keras melalui kegiatan HKM dan Penghijauan di kelurahan Nungga dan Lelamase Kerja sama dengan Forum PRB, BPBD dan OXFAM. Dengan demikian BPBD sebagai leading sector penanggulangan bencana agar dapat melakukan koordinasi dengan SKPD lain agar dapat mengkoordinasikan kegiatan TSBK dengan SKPD lain seperti Dinas Koperindag, Dinas Lingkungan Hidup dll, sehingga Forum PRB dan TSBK akan terus eksis dalam melakukan gerakan - gerakan kemanusiaan di Bidang penanggulangan bencana baik pra bencana, saat bencana maupun pasca bencana.

Kegiatan pembentukan kelurahan tangguh dapat terlaksana karena adanya dukungan yang cukup besar dari berbagai pihak, seperti Forum PRB Mbojo Ma Tenggo Kota Bima, Pemerintahan Kelurahan dan masyarakat sebagai yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam pembentukannya, Dukungan BNPB dan BPBD Provinsi NTB juga memberikan kontribusi untuk mempercepat tercapainya target RPJMD untuk menuntaskan Kelurahan tangguh pratama sampai dengan tahun 2018 sebesar 100 % atau sebanyak 38 kelurahan.

Pembentukan Kelurahan tangguh ini juga memberi kontribusi terhadap peningkatan kapasitas daerah dalam penanggulangan bencana baik kapasitas pemerintah maupun Kapasitas masyarakat. Berdasarkan hasil penilaian Kapasitas Daerah yang dilakukan bersama dengan BNPB dengan menggunakan metode scor card bahwa Kota Bima mendapat peningkatan nilai



yang signifikan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2016 Kota Bima mendapat nilai 3 dalam penilaian pada 5 level penilaian ketangguhan Kota. sementara tahun 2017 mendapat nilai 4 dalam 5 level penilaian atau berada pada **Tingkat kapasitas tinggi** dengan indeks kapasitas 0,85. Jika dibandingkan dengan Kabupaten tetangga Kab Bima hanya berada pada level 2 untuk kapasitas daerahnya atau masih kategori rendah.

Ketangguhan masyarakat di tingkat kelurahan menjadi salah satu indikator penting memberikan kontribusi terhadap terbentuknya ketangguhan Kota dalam penanggulangan bencana. Dukungan Pemerintah pusat melalui Program dan kegiatan BNPB cukup memberi kontribusi menambah ketangguhan Kota Bima, seperti adanya kegiatan Mitigasi Partisipatif untuk pembangunan rumah aman bencana dari Kedeputian Pencegahan dan Kesiapsiagaan BNPB.

Pada bulan Desember tahun 2016, Ketangguhan Kota Bima diuji dengan terjadinya Banjir bandang yang sangat besar sepanjang sejarah, kejadian bencana banjir bandang pada tanggal 21 dan 23 desember yang melanda sebagian besar wilayah Kota Bima menyebabkan 105.621 Orang terdampak dan kerugian aset fisik sarana prasarana infrastruktur 2, 1 Triliun rusak, namun dengan adanya ketangguhan Kota yang telah terbentuk maka bencana besar tersebut tidak terdapat korban jiwa, dan hanya dalam jangka waktu yang kurang dari 2 bulan masyarakat dapat segera pulih dari keterpurukan. Pada awal tahun 2017 yang lalu masyarakat bisa kembali beraktivitas normal seperti biasa bahkan fasilitas umum yang rusak seperti Drainase, Jalan, Sungai telah diperbaiki hingga mencapai 90 % melalui program - program pemulihan darurat dari BNPB maupun program Nasional melalui Program KOTAKU yang telah dikoordinasikan oleh BPBD maupun oleh lintas sektor lainnya.

Untuk mendukung ketangguhan Kota ini juga OXFAM melalui Mitra Lokalnya LP2DER melakukan program - program peningkatan kapasitas pemerintah dan masyarakat melalui pelatihan, workshop serta studibanding pada Negara - Negara yang sudah maju dalam hal penanggulangan bencana

Untuk mendukung program Kota Tangguh yang dicanangkan BPBD Kota Bima, tentunya banyak upaya yang dilakukan baik pra bencana, saat bencana /tanggap darurat maupun pasca bencana, sehingga selain Program Kelurahan Tangguh, Program dan kegiatan yang mendukung ketercapaiannya dalam melakukan pelayanan bantuan kepada masyarakat korban bencana adalah melakukan upaya tanggap darurat. Upaya tersebut berupa pemberian bantuan uang tunai, logistik maupun bantuan perbaikan darurat terhadap sarana fisik maupun non fisik sesuai jenis kerusakan atau kerugian yang diderita korban bencana. Kegiatan yang mendukung program ini adalah Kegiatan Pemenuhan sandang pangan, Pemenuhan Air bersih dan sanitasi yang tersedia dalam DPA BPBD Kota Bima dan Anggaran Dana tak terduga yang ada pada DPKAD. serta bantuan darurat melalui dana siap pakai dari BNPB. Program lain yang mendukung program Kota tangguh bencana juga adalah program Penyuluhan penanggulangan bencana berupa kegiatan diklat kepada masyarakat, diklat kepada SKPD terkait dan diklat kepada Tim Penanggulangan bencana dan Peningkatan kapasitas kelembagaan. Program kesiapsiagaan

kegiatan Gladi mekanisme tanggap darurat bencana yang dilakukan 2 kali dalam 1 tahun untuk menguji kesiapan relawan dan tim penanggulangan bencana lainnya dalam menghadapi bencana.

## 2. Sasaran Strategis 2(S2): Meningkatnya Kapasitas Aparatur dan Tim Penanggulangan Bencana.

### 2.1. Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 2(S2): Jumlah Sumber Daya Manusia terlatih

Sumber daya manusia yang trampil merupakan salah satu unsur manajemen organisasi yang paling penting dalam menggerakkan sebuah roda organisasi, jika Sumber daya manusia tidak trampil dalam menjalankan tugas maka penggunaan sumber daya organisasi lainnya seperti Dana Organisasi tidak dapat dipergunakan secara efektif dan efisien.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bima sangat menyadari hal tersebut maka pada strategis 2 (S2) menargetkan 180 Orang yang terlatih dalam hal penanggulangan bencana. Untuk mencapai target (S2) ini, upaya yang dilakukan adalah memberikan Diklat dan penyuluhan baik kepada aparatur Pemerintah maupun kepada Tim Penanggulangan Bencana Lainnya melalui Program penyuluhan dan penanggulangan bencana, dan Program Kesiapsiagaan Program penyuluhan dan penanggulangan bencana ini meliputi Kegiatan :

1. Diklat dan Penyuluhan kepada SKPD terkait,
2. Diklat Kepada Anggota Masyarakat (Tatap muka, brosur, leaflet)
3. Diklat dan Penyuluhan kepada Tim Penanggulangan Bencana (TRC, TAGANA, TIM SAR, dll)
4. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penanggulangan Bencana dan Program Kesiapsiagaan melalui Kegiatan :
5. Gladi tentang mekanisme tanggap darurat bencana

Kegiatan – kegiatan tersebut di atas tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran tahun 2017. Pencapaian sasaran Strategi 2 ini direalisasikan melalui 5 (Empat) kegiatan tersebut diatas Dari Target kinerja sebesar 180 Orang terlatih, dapat terealisasi sebanyak 692 orang atau sebesar 384,44 %. Realiasi kinerja S2 secara lengkap dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel :REALISASI KINERJA STRATEGIS 2 (S2)

No.	Indikator Sasaran	Program/Kegiatan	Target kinerja Keg	Realisasi	Target Kinerja Sasaran	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Jumlah SDM Terlatih	1 <b>Program penyuluhan dan penanggulangan bencana ini meliputi Penanggulangan Bencana</b>			180	335	186,11
		1 Diklat dan Penyuluhan kepada SKPD terkait	40	40			

	2	Diklat dan Penyuluhan kepada anggota Masyarakat	20	20		
	3	Diklat dan penyuluhan kepada Tim Penanggulangan Bencana (TRC,TAGANA,TIM SAR, TIM PEMADAM KEBAKARAN)	120	120		
	4	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan	125	125		
	<b>2</b>	<b>Program Kesiapsiagaan</b>				
	5	Gladi tentang mekanisme tanggap darurat bencana	30	30		

Dari tabel di atas dapat dijelaskan bahwa Program penyuluhan dan penanggulangan bencana serta Program kesiapsiagaan masing – masing dapat menyelesaikan target sebesar 100 %, pada kegiatan Diklat dan penyuluhan kepada SKPD terkait dapat terealisasi sebanyak 40 Orang dari target 40 orang untuk melatih SKPD terkait untuk perhitungan Kerugian dan Kerusakan pasca bencana dan kemudian ditindak lanjuti menjadi Tim Penyusun Dokumen JITU Pasma jika terjadi bencana. Kegiatan Diklat penyuluhan kepada masyarakat outputnya adalah 20 orang tenaga kependidikan untuk menjadi motifator dalam melaksanakan Sekolah aman bencana. Diklat dan penyuluhan kepada Tim PB dapat melatih Tim Relawan sebanyak 120 Orang untuk mendukung kegiatan Kota tangguh. dan Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan ini menyangkut peningkatan Kapasitas bagi Anggota Forum PRB Mbojo Ma Tenggo Kota Bima, TSBK dan Federasi TSBK dan Tim Teknis SKPD dan Tim Koordinasi SKPD, sehingga total Tim yang dikapasitasi sebanyak 125 Orang. disehingga total SDM yang dapat terlatih adalah sebanyak 335 Orang atau sebesar 186,11% melampaui target kinerja sasaran pada target kinerja S2 ini.

Jika dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya, capaian dari tahun ke tahun memiliki peningkatan yang cukup signifikan, akan tetapi pada tahun 2017 memiliki penurunan jika dibandingkan dari capaian tahun 2016. namun masih lebih banyak dari target sasaran tahun 2017 data perbandingan jumlah SDM terlatih tahun 2014 sd tahun 2017 tersaji secara lengkap pada tabel berikut.

Tabel. Perbandingan jumlah SDM terlatih Tahun 2014 sd Tahun 2017

N O	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian Target Sasaran (%)								Capaian (%)			
			2014	2015	2016	2017	2014	2015	2016	2017	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	$12=4/8*100$	$13=5/9*100$	$14=6/10*100$	$15=7/11*100$
	Tersedianya SDM Terlatih dan	Jumlah SDM yang terlatih dan	197	204	692	335	150	180	180	180	131.33	113.33	384,44	186,11

	Profesional	profesional												
--	-------------	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

## 2.2. Hambatan dalam pelaksanaan

Pencapaian pada sasaran strategis 2 (S2) ini sangat tergantung pada ketersediaan dukungan dana baik APBD maupun dari luar. dan juga ketersediaan SDMnya., Keberadaan tenaga terampil bersertifikat keahlian sangat terbatas, sehingga menjadi kendala juga dalam melakukan upaya upaya kedaruratan bencana. sehingga hal ini menjadi Salah satu rekomendasi dalam penilaian kapasitas daerah, sehingga untuk mendukung ketercapaian ini ke depan perlu adanya diklat - diklat bersertifikat keahlian untuk mendukung terlaksananya upaya - upaya dalam penanggulangan bencana. seperti bidang Penataan Gudang dan Logistik, Bidang Data dan Pusdalops, dan sebagainya.

Selama tahun 2017 ini kerjasama dengan OXFAM lebih banyak pada peningkatan SDM untuk antisipasi perubahan iklim, sehingga SDM yang dikapasitasi melalui kerjasama OXFAM dalam rangka mengembangkan usaha mikro bagi Relawan agar dapat mengurangi kerentanan terhadap perubahan iklim.

## 3. Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 3 (S3): Jumlah dokumen penanggulangan bencana tersedia.

Dokumen Penanggulangan Bencana sangat diperlukan untuk mendukung pelaksanaan penanggulangan bencana, dokumen tersebut berupa Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana, SOP (Standar Operasional Prosedur) Penanggulangan Bencana, Dokumen Rencana Kontigensi, Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dan aturan – aturan pendukung lainnya. Pada target sasaran strategis 3 (S3) untuk jumlah dokumen Penanggulangan Bencana yang tersedia pada tahun 2017 sebanyak 1 Dokumen yaitu dokumen Revisi Rencana Penanggulangan Bencana dan Standar Operasional Prosedur (SOP) penanggulangan kedaruratan bencana. Jika dibandingkan dengan target capaian 1 dokumen tersusun maka Pencapaian sasaran pada target sasaran strategis 3 (S3) adalah 100 % yang didukung melalui Program Penataan Peraturan Perundang – undangan pada kegiatan Penyusunan dan penerbitan produk hukum Daerah dan kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan, Secara rinci dapat dilihat pada tabel .

**Tabel. Pencapaian Target Kinerja Sasaran Strategis 3 (S3) : Jumlah dokumen Penanggulangan Bencana yang tersedia**

No.	Indikator Sasaran	Program/Kegiatan	Target kinerja Keg	Realisasi	Target Kinerja Sasaran	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Jumlah dokumen PB yang tersedia	1	<b>Program penataan paraturan perundang-undangan</b>		1	1	100.
		1	Penyusunan dan penerbitan produk hukum daerah	1	1		

Dari tabel di atas dapat dijelaskan bahwa target kinerja sasaran strategis 3 (S3) tahun 2016 adalah sebanyak 1 dokumen penanggulangan bencana yang kemudian terealisasi sebanyak 1 dokumen yaitu dokumen Revisi RPB Tahun 2014-2018 dan SOP tentang penanganan kedaruratan bencana atau tercapai 100%

Tabel. Perbandingan Jumlah Dokumen Tahun 2014 sd 2016

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian				Target Sasaran (%)				Capaian (%)			
			2014	2015	2016	2017	2014	2015	2016	2017	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=4/8*100	13=5/9*100	14=6/10*100	15=7/11*100
	Jumlah Dokumen yang tersedia	Jumlah Dokumen yang tersedia	3	3	1	1	3	2	1	1	100	150	100,00	100,00

Dari uraian tabel di atas dapat di jelaskan, bahwa realisasi pencapaian target kinerja sasaran (S3) pada tahun tahun sebelumnya, selalu tercapain bahkan tren yang semakin meningkat, pada tahun 2015 target kinerja S3 ini dapat terealisasi 100% (Seratus Persen) dari target 1 dokumen

Sampai dengan tahun 2017 realisasi sasaran strategis 3 (S3) ini adalah sebanyak 8 dokumen lebih besar dari pada target renstra sebesar 70 %. Target renstra sampai dengan tahun 2017 adalah sebanyak 7 dokumen yang berarti prosentase ketercapaian rencana strategis adalah 88,89 % dari target 70%.

Proses penyusunan dokumen penanggulangan bencana ini dilakukan pada akhir tahun, karena Kota Bima mendapat musibah bencana banjir pada akhir tahun 2016 sehingga menyebabkan pelaksanaan program/kegiatan tahun 2017 terlambat memulai karena sampai dengan bulan Maret 2017 BPBD masih menangani korban banjir tahun 2016 dan diikuti lagi dengan kejadian banjir maret 2017 yang cukup menyita waktu dan tenaga bagi personel BPBD yang terbatas. sehingga semua kegiatan maenjadi semakin mundur pelaksanaannya.

Penyusunan Dokumen Revisi RPB baru dalam bentuk Dokumen belum di assistensi menjadi Peraturan Walikota Bima sedang dokumen SOP Kedaruratan penanggulangan bencana yang tertunda asistensinya tahun 2016 telah dilegalisasi menjadi Produk Hukum Daerah melalui peraturan walikota Bima Nomor .... Tahun 2017

Kendala lain yang dihadapi dalam proses penyusunan dokumen ini adalah kurangnya SDM yang tersedia, langkah antisipasi yang dilakukan adalah dengan cara BPBD Kota Bima membentuk Tim Teknis Penyusunan Dokumen yang berasal dari Dinas terkait dan menggandeng Forum PRB Mbojo Ma tenggo yang memiliki SDM yang cukup sebagai mitra kerja BPBD dalam upaya pengurangan Risiko Bencana. Upaya tersebut cukup efektif menyelesaikan tugas – tugas teknis, yang kemudian hasil yang dicapai pada tingkat teknis dikoordinasikan kembali pada tingkat lebih tinggi yaitu melalui rapat koordinasi Tim Koordinasi SKPD yang juga dibentuk untuk mempermudah koordinasi lintas SKPD terkait.

Jika dilihat dari sisi penggunaan sumber daya baik dana maupun SDM, ketercapaian target ini didukung melalui kegiatan penerbitan produk hukum daerah dengan biaya yang cukup sehingga dapat menyelesaikan 2 Dokumen meskipun 1 dokumen belum diasistensi untuk dilegalisasi

#### **4. Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 4 (S4): terwujudnya penyelenggaraan penanggulangan kedaruratan bencana secara cepat dan tepat.**

Tanggap darurat adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan sarana. sedangkan tujuan dari fase tanggap darurat adalah :

1. Membatasi korban dan kerusakan
2. Mengurangi penderitaan
3. Mengembalikan kehidupan dan sistem masyarakat
4. Mitigasi kerusakan dan kerugian
5. Sebagai dasar untuk pengembalian kondisi

Tahapan penanggulangan bencana pada fase darurat adalah penanganan kedaruratan bencana atau penanganan saat bencana. pada tahapan ini semua/ seluruh kemampuan sumber daya harus disiapkan untuk memaksimalkan penanganannya baik Sumber Dana, Peralatan maupun Sumber daya manusianya. baik sumber daya dalam daerah maupun sumber daya dari Luar untuk mendukung terlaksananya upaya pemulihan secara cepat.

Berdasarkan Peraturan Kepala BNPB Nomor 11 tahun 2010, Keadaan darurat dapat digolongkan menjadi 3 fase yaitu, masa siaga darurat (1), masa tanggap darurat (2) maupun masa tanggap darurat menuju ke pemulihan (3). Pada keadaan darurat bencana, Pemerintah dalam hal ini Walikota Bima akan mengeluarkan Pernyataan bencana berdasarkan Hasil Kajian Tim Reaksi cepat dan rekomendasi Lembaga terkait seperti BMKG. maka sejak pernyataan bencana diterbitkan maka sejak itulah segala kemampuan dikerahkan untuk membantu menanggulangi secara cepat dan tepat.

Selama tahun 2017 terdapat 26 Kasus kejadian bencana yang beragam jenis dan juga besaran kekuatannya. Bencana yang pernah terjadi selama tahun 2017 adalah Bencana banjir, angin kencang, kebakaran, Gempa bumi, Tanah Longsor. dari semua bencana yang terjadi bencana banjir pada tanggal 21 dan 23 Desember 2016 menyisakan berbagai kerusakan sehingga kegiatan penanganannya terlaksana pada awal tahun 2017

Pencapaian sasaran strategis 4 ini dapat dicapai melalui 2 (Dua) indikator sasaran strategis yaitu :

1. Persentase pemenuhan kebutuhan dasar saat bencana (S4.1)
2. Persentase ketersediaan Sarana dan Prasarana Penunjang saat bencana (S4.2)

#### **4.1. Persentase pemenuhan kebutuhan dasar saat bencana (S4.1)**

Kegiatan pada fase tanggap darurat meliputi : tahapan assesment/ pendataan korban, Koordinasi penanggulangan bencana, Rencana operasi, Evakuasi Korban, pendistribusian bantuan dan evaluasi dan pelaporan. Setelah melakukan upaya evakuasi korban ke tempat evakuasi yang aman terhadap bencana, maka langkah berikutnya adalah pemenuhan kebutuhan dasar bagi korban bencana.

Pemenuhan kebutuhan dasar meliputi : kebutuhan air bersih dan sanitasi, pangan, sandang, pelayanan kesehatan, pelayanan psikososial, dan penampungan dan tempat hunian. Dan pemulihan dengan segera prasarana dan sarana vital, dilakukan dengan memperbaiki dan/atau mengganti kerusakan akibat bencana.

Terpenuhinya kebutuhan dasar bagi korban bencana menjadi salah satu indikator penting dalam upaya meningkatkan efektifitas penanganan bencana. Selama tahun 2017 Badan penanggulangan bencana telah menangani kejadian bencana sebanyak 26 Kasus kejadian bencana, ditambah dengan 1 kejadian bencana banjir bandang yang terjadi di akhir tahun 2016 karena masa tanggap darurat bencana banjir bandang 2016 memasuki tahun anggaran 2017. semua kejadian bencana tersebut dapat terpenuhi semua kebutuhan dasarnya pada masa tanggap darurat terjadi. meskipun disana sini masih terdapat kekurangan namun secara keseluruhan dan secara bertahap dapat terlayani dengan baik kebutuhan dasar masyarakat korban seperti sembako, air bersih, penerangan, kesehatan dan kebutuhan pokok lainnya termasuk pemulihan darurat sarana dan prasarana fisik. sehingga target capaian untuk S4.1 ini dapat terealisasi sebesar 100 % dari target 100 %

Tabel berikut dapat menggambarkan capaian sasaran S4.1

No .	Indikator Sasaran	Program/Kegiatan	Target kinerja Keg	Realisasi	Satuan	% Realisasi	Target Kinerja Sasaran		Realisasi	%	
							7	8			
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	
1	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Dasar Saat Bencana	1 Penanganan kedaruratan bencana			%		100	%	100	100	
		Jumlah Kejadian bencana		26	Kejadian	100					
		Jumlah Kejadian bencana yang bisa ditangani	100	100	%						
		<b>Program pemenuhan kebutuhan dasar</b>									
		1	Pemenuhan Kebutuhan air bersih dan sanitasi	39	39	Titik	100				
		2	Pemenuhan sandang dan pangan	3	3	Jenis	100				
		<b>Program pengkajian secara cepat dan tepat</b>									
1	Analisa cakupan lokasi dan jumlah korban	1	1	Dok	100						

Dari tabel di atas dapat dijelaskan bahwa capaian sasaran strategis 4.1. ini dapat terealisasi 100 %, capaian ini dapat diperoleh melalui capaian Program Pemenuhan kebutuhan dasar pada kegiatan pemenuhan kebutuhan air bersih dan sanitasi dan kegiatan Pemenuhan sandang dan pangan, masing - masing terealisasi 100 %, Kegiatan pemenuhan air bersih dan sanitasi ini dapat terpenuhi melalui dana APBD II dan dana APBD I Provinsi. kegiatan ini outputnya adalah pendropingan air pada daerah yang memiliki krisis air bersih yang merupakan bencana turunan dari banjir bandang akibat rusaknya jaringan perpipaan air minum sehingga harus dilakukan pendropingan air bersih sejak banjir bandang Desember 2016 terjadi hingga saat ini, di 39 titik di 9 kelurahan. begitu juga dengan kegiatan pemenuhan sandang dan pangan, kegiatan ini dilakukan melalui dana APBD pada DPA BPBD tahun 2017 dan didukung melalui Dana dari Provinsi dan BNPB termasuk dukungan dari Swasta dan perseorangan. bantuan sandang pangan dapat berupa Beras, makanan siap saji pakaian, selimut dll. Data Jumlah dan jenis sandang dan pangan yang masuk maupun yang didistribusikan kepada masyarakat tersaji pada Lampiran Lakip ini.

Program pengkajian secara cepat dapat terealisasi 100 % melalui kegiatan Analisa cakupan lokasi dan jumlah korban, output kegiatan ini adalah berupa data dan informasi tentang jumlah dan cakupan lokasi korban bencana sebagai dasar kebijakan dalam penetapan status tanggap darurat dan sebagai data dasar pendistribusian bantuan sandang pangan maupun bantuan lainnya yang diberikan sesuai kebutuhan korban.

Jika dibandingkan dengan capaian pada tahun sebelumnya sasaran strategis 4.1 ini secara berturut - turut dapat terealisasi 100 %, Data perbandingan capaian pemenuhan kebutuhan dasar saat bencana dari tahun 2014 sd 2017 tersaji dibawah ini.



**Tabel. Data perbandingan capaian pemenuhan kebutuhan dasar saat bencana  
Tahun 2014 sd 2017**

N O	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian				Target Sasaran (%)				Capaian (%)			
			2014	2015	2016	2017	2014	2015	2016	2017	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	$\frac{12=4/8*100}{100}$	$\frac{13=5/9*100}{100}$	$\frac{14=6/10*100}{100}$	$\frac{15=7/11*100}{100}$
4	Meningkatnya efektifitas penyelenggaraan penanggulangan kedaruratan bencana secara cepat dan tepat	Porsentase pemenuhan kebutuhan dasar saat bencana	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

Untuk memenuhi kebutuhan dasar bagi korban bencana, BPBD sebagai leading sektor penanggulangan bencana berusaha mengkoodinasikan kepada stakeholder terkait. Sumber pembiayaan yang biasa digunakan untuk memenuhi kebutuhan dasar bagi Korban selama penanganan bencana akhir tahun 2016 sampai dengan tahun 2017 adalah :

1. Dana Siap pakai dari BNPB
2. Dana Tak Terduga dari BPBD Provinsi NTB
3. Dana Tak Terduga dari Pemerintah Kota Bima
4. Dana APBD melalui DPA BPBD
5. Dana CSR dari Kelompok Dunia Usaha
6. Bantuan dari Daerah Lain
7. Dana Bantuan dari masyarakat secara individu.
8. Dana APBN melalui kementerian terkait
9. Dana lainnya yang tidak mengikat

Selama masa tanggap darurat berlangsung dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat selalu mendapat hambatan dalam pelaksanaannya, terutama pada penanganan bencana besar seperti yang terjadi pada penanganan bencana banjir bandang di awal tahun 2017 yang lalu, Hambatan yang selalu terjadi adalah adanya tumpang tindih bantuan, karena kurang koordinasi antara pemberi bantuan dengan Posko Utama atau posko bantuan, biasanya terjadi karena pemberi bantuan langsung mendroping bantuan ke lokasi korban tanpa koordinasi dengan posko bantuan. atau kendala lain biasanya terjadi karena data/ informasi yang kurang detail tentang korban, jumlah keluarga, umur, pendidikan dan lain - lain. Data tersebut dimanfaatkan sebagai pedoman untuk menentukan jumlah dan jenis bantuan, kendala lain yang sangat berarti pula adalah kurangnya personil yang kompeten untuk menangani korban yang sakit.

Terkait pendropingan air bersih terdapat kendala antara lain :

1. Keterbatasan dana APBD II
2. Keterbatasan mobil tangki untuk pendropingan air
3. Kurangnya tandon air untuk penampungan sementara

4. Belum adanya upaya - upaya jangka panjang dalam penanggulangan bencana kekeringan ,

Upaya yang dilakukan untuk mengurangi kegagalan kegiatan tersebut, antara lain :

1. Mengupayakan bantuan dari luar baik dari APBD I maupun BNPB dan Donor lainnya.
2. Membagi tugas dengan SKPD lain untuk memenuhi keterbatasan mobil tangki maupun personil
3. Menggunakan Dana Sisa Bencana banjir bandang yang bersumber dari Bantuan Masyarakat untuk pengadaan tandon dan mendapat bantuan tandon dari BPBD Provinsi NTB
4. Mengkoordinasikan dengan dinas Teknis terkait bersama TAPD untuk mengupayakan Menjadi program prioritas tahun 2019.

#### **4.2. Persentase ketersediaan Sarana dan Prasarana Penunjang saat bencana (S4.2)**

Berdasarkan peraturan menteri dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2007 tentang pedoman penyiapan sarana dan prasarana penanggulangan bencana bahwa Sarana dan prasarana umum meliputi:

- a. peralatan peringatan dini (*early warning system*) sesuai kondisi dan kemampuan daerah;
- b. posko Bencana beserta perlengkapan pendukung seperti peta lokasi bencana, alat komunikasi, tenda darurat, genset (alat penerangan), kantong-kantong mayat dan lain-lain;
- c. kendaraan operasional sesuai dengan kondisi daerah;
- d. peta rawan bencana;
- e. rute dan lokasi evakuasi pengungsi;
- f. prosedur tetap (Protap) penanggulangan bencana;
- g. dapur umum berikut kelengkapan logistiknya;
- h. pos kesehatan dengan tenaga medis dan obat-obatan;
- i. tenda-tenda darurat untuk penampungan dan evakuasi pengungsi, penyiapan *valbed* serta penyiapan tandu dan alat perlengkapan lainnya;
- j. sarana air bersih dan sarana sanitasi/MCK di tempat evakuasi pengungsi dengan memisahkan sarana sanitasi/MCK untuk laki-laki dan perempuan;
- k. peralatan pendataan bagi korban jiwa akibat bencana (meninggal dan luka-luka, pengungsi, bangunan masyarakat, Pemerintah dari Swasta); dan lokasi sementara bagi pengungsi.

Ketersediaan sarana dan prasarana penunjang saat bencana menjadi salah satu indikator penting dalam mensukseskan pelaksanaan penanggulangan kedaruratan bencana, sehingga BPBD pada tahun 2017 ini menetapkan sasaran strategis 4.2 menjadi salah satu indikator penting untuk memperhitungkan kinerja organisasi.

Berdasarkan penggolongan sarana prasarana kebutuhan dasar dalam peraturan menteri dalam negeri tersebut diatas maka secara umum sarana prasarana penunjang saat bencana dapat disederhanakan penggolongannya antara lain :

1. Keberadaan Gudang logistik beserta kelengkapannya
2. Jalur dan Tempat Evakuasi Sementara bagi korban (Tenda, Gedung, lapangan, dll)
3. Pusdalops dan Peralatan peringatan dini (Peta rawan bencana, dll)
4. Peralatan Evakuasi (pelampung, felbet, tali, genset dan lampu sorot, alat pengaman dll)
5. Alat angkut untuk evakuasi berupa Mobil, Perahu karet, motor trailer, truk sampah, dll
6. Peralatan dapur umum, Sarana air bersih dan sanitasi
7. Alat berat seperti, Eksavator amfibi, Loder, dll

pada masa tanggap darurat terjadi, pengerahan peralatan dapat dilakukan baik yang berada di Daerah maupun Luar daerah bahkan peralatan yang dimiliki pihak swasta dikerahkan untuk mendukung penyelenggaraan penanggulangan kedaruratan bencana.

Pelaksanaan penanganan darurat baik siaga darurat, saat tanggap darurat maupun saat pemulihan selama tahun 2017 cukup bagus dalam pelaksanaannya, salah satu indikator pendukung penyelenggaraannya karena adanya sarana dan prasarana pendukung yang memadai. berdasarkan hasil penilaian kebutuhan peralatan penanggulangan bencana peralatan yang masih kurang antara lain :

1. Gudang logistik masih kurang luas dan Rak barang masih terbatas
2. Jumlah eksavator amfibi masih sangat terbatas di Lingkungan Pulau Sumbawa, dan Kota Bima belum memiliki alat berat tersebut sebagai alat untuk membersihkan sampah yang tersangkut di jembatan yang sering menyebabkan luapan banjir.
3. Perangkat Pusdalops masih terbatas.
4. Perahu karet kondisi rusak kurang berfungsi sebagai sarana evakuasi bagi korban banjir
5. Keterbatasan tenaga terlatih yang mengelola logistik dan pergudangan.

Berdasarkan uraian di atas maka secara kuantitatif penilaian indikator sasaran strategis 4.2

ini dapat dijelaskan pada tabel berikut :

Tabel Penilaian Kebutuhan sarana dan prasarana penunjang dan Penanggulangan Bencana

No	Sarana dan prasarana penunjang penyelenggaraan PB	Bobot	Ada/tidak ada		Kepemilikan		Kondisi		Kecukupan		Nilai
			Ada	Tidak ada	milik sendiri	Milik Daerah lain/Swasta	Baik	Kurang baik/Rusak	Cukup	Kurang	
1	Keberadaan Gudang logistik dan kelengkapannya	20	v		v		v			v	15

2	Jalur dan Tempat Evakuasi Sementara bagi korban	15	v		v		v		v		15
3	Pusdalops dan peralatan peringatan dini	15	v		v		v			v	10
4	Peralatan Evakuasi	5	v		v		v		v		5
5	Alat angkut untuk evakuasi berupa Mobil, Perahu karet, dll	15	v		v		v			v	10
6	Peralatan dapur umum, sarana air bersih dan sanitasi	10	v		v		v		v		10
7	Alat berat seperti, Eksavator ampibi, eksavator mini, dll	20	v				v			v	15
		100									80

Berdasarkan tabel di atas. ada 7 kelompok atau jenis sarana dan prasarana penunjang dalam penanggulangan bencana, dari 7 kelompok tersebut memiliki bobot penilaian yang berbeda - beda menurut fungsinya dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana, 7 kelompok tersebut merupakan kebutuhan sarana prasarana minimal yang harus ada untuk mendukung terlaksananya penyelenggaraan kedaruratan bencana. dari bobot total 100 %, Keberadaan sarana prasarana penunjang sampai dengan tahun 2017 sebesar 80 %, nilai tersebut diperoleh dari angka kumulatif dari penilai terhadap Keberadaan 7 kelompok atau jenis kebutuhan sarana dan prasarana penunjang (ada atau tidak ada, kepemilikannya, kondisi sarana dan kecukupannya)

Dari penjelasan tersebut di atas maka capaian terpenuhinya kebutuhan sarana prasarana penunjang sebesar 80 % atau sama dengan target kinerja Sasaran strategis 4.2 tahun 2017 sebesar 80 % atau angka ketercapaiannya sasaran strategi 4.2 ini sebesar 100 %,

Tabel berikut dapat menggambarkan angka capaian sasaran strategis 4.2

No .	Indikator Sasaran	Program/Kegiatan	Target kinerja Keg	Realisasi	Satuan	% Realisasi	Target Kinerja Sasaran	Realisasi	%
2	Persentase ketersediaan Sarana dan	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Penanggulangan Bencana					80 %	80	%

Prasarana Penunjang saat bencana	1	Pengadaan Sarana Prasarana penunjang dalam rangka upaya penanggulangan bencana	11	11	jenis	100				
	2	Penilaian Kebutuhan peralatan BPBD	80	80	%	100				

Pada tahun - tahun sebelumnya, indikator sasaran strategis 4.2 ini tidak pernah menjadi indikator penilaian secara spesifik akan tetapi hanya diperhitungkan sebagai salah satu indikator dalam penilaian bagi sasaran Porsentase penanganan kedaruratan bencana yang dinilai pada Lakip tahun 2016.

#### **Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 5 (S.5): Persentase Rehabilitasi dan Rekonstruksi sarana prasarana fisik dan non fisik pasca bencana**

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bima selain memiliki tugas pokok sebagai komando dan pelaksana dalam penanggulangan bencana, tugas lain yang diemban adalah mengkoordinasikan tugas – tugas penanggulangan bencana dengan Instansi teknis salah satunya adalah mengkoordinasikan tugas rehabilitasi dan rekonstruksi setelah terjadinya bencana dengan SKPD teknis lainnya seperti Dinas PU, Dinas Pertanian, Dinas Perikanan dan kelautan dan lain-lain. dan berkoordinasi dengan Instansi Vertikal ke Provinsi maupun ke pusat serta pemangku kepentingan lainnya.

Untuk mengukur capaian sasaran ini adalah dengan membandingkan antara Jumlah paket sarana prasarana yang rusak dari Dokumen JITU Pasna tahun sebelumnya dengan jumlah sarana dan prasarana fisik dan non fisik yang rusak pasca yang bisa ditangani oleh BPBD maupun dinas teknis lainnya, jika dilihat dari hasil

Selama tahun 2017 paket kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana yang dikoordinasikan adalah paket kegiatan bidang SDA yang ditangani bersama dengan Dinas PU. Paket kegiatan yang dikoordinasikan berdasarkan Dokumen DAle tahun 2016 sebanyak 22 Paket, sementara yang dapat dikerjakan pada tahun 2017 sebanyak 7 Paket, 2 Paket dengan dana APBD II melalui DAU pada Dinas PU Perkim sementara 5 Paket lainnya dikerjakan melalui Dana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana dari BNPB.

Untuk mengukur capaian kinerja pada Prosentasi jumlah sarana dan prasarana fisik dan non fisik yang rusak pasca bencana bisa ditangani adalah jumlah sarana dan prasarana fisik dan non fisik yang rusak akibat bencana dapat ditangani dibagi dengan bencan hasil analisa kerusakan pasca bencana dikali dengan 100 %. Tingkat capaiannya dapat terlihat pada tabel berikut :

**Tabel Pencapaian Sasaran strategis S.5**

NO	JUMLAH PAKET PERBAIKAN YANG DIKOORDINASIKAN BERDASARKAN DATA KERUSAKAN	JUMLAH PAKET YANG DITANGANI DINAS TEKNIS DAN BPBD	CAPAIA N %	Target Sasaran %	Ketercapaian %
1	2	3	4	5	$6=5/4*100$
1	22	7	32	80	39,77

Dari table di atas dapat dijelaskan bahwa Total jumlah paket rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana sebanyak 22 paket yang tersebar di Kota Bima, yang bisa ditangani pada tahun 2017 baik oleh Dinas PU Pertamben maupun oleh BPBD Kota Bima adalah sebanyak 7 Paket yang tersebar di Kota Bima sehingga realisasi sasaran strategis 5 (S5) adalah sebesar 32 % dari target sasaran strategis tahun 2017 sebesar 80%, maka angka ketercapaian sasaran strategis ini adalah 39,77 %

Tabel. Perbandingan Capaian S5 Tahun 2014 Sampai dengan 2017

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	CAPAIAN (%)				Target Sasaran (%)				Ketercapaian (%)			
			2014	2015	2016	2017	2014	2015	2016	2017	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	$12=4/8*100$	$13=5/9*100$	$14=6/10*100$	$15=7/11*100$
	Terwujudnya pemulihan sarana dan prasarana fisik dan non fisik pasca bencana	Persentase rehabilitasi dan rekonstruksi sarana prasarana fisik dan non fisik pasca bencana	5	55	22	32	50	60	70	80	10,00	91,67	30,81	39,77

Jika dibandingkan dengan tahun - tahun sebelumnya, bahwa tingkat realisasi sasaran strategis 5 (S.5) pada tahun 2017 adalah mengalami peningkatan yang signifikan. pada tahun 2014 hanya bisa dicapai sebesar 5 % sementara pada tahun 2017 tercapai sebesar 32 %, hal ini berarti tingkat capaian koordinasi rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana dengan dinas teknis terkait cukup berhasil, meskipun tidak tercapai sebesar 100% Capaian ini tidak terlepas dari dukungan penganggaran yang cukup, 5 paket penanganan pasca bencana adalah dilakukan oleh BPBD sendiri melalui Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana pada Program Rekonstruksi dimana Sumber dananya adalah dari Dana bantuan Hibah Rehabilitasi

dan Rekonstruksi Pasca bencana tahun 2016 dari BNPB . Pada kegiatan monitoring dan evaluasi pada program rekonstruksi, juga mendukung ketercapaian sasaran ini karena output kegiatan monitoring dan evaluasi adalah disamping dokumen hasil analisa kerusakan pasca bencana juga melakukan koordinasi langsung hasil analisa tersebut kepada dinas teknis terkait agar dapat mengakomodir program rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana kedalam Program dan kegiatan dinas terkait baik pada Penggaran Perubahan tahun yang berjalan atau pada program kerja tahun berikutnya.

Program lain yang mendukung adalah Program Penyuluhan dan penanggulangan bencana pada kegiatan Diklat dan penyuluhan kepada SKPD terkait. Diklat ini out putnya adalah memberikan pelatihan bagi SKPD terkait tentang DALA (Perhitungan kerusakan dan kerugian pasca bencana). atau JITU Pasna, Kegiatan ini menghasilkan Tim yang akan melakukan perhitungan kerusakan dan kerugian pasca bencana.

Kegiatan lain yang ikut mendukung Sasaran Staregi 5 (S5) ini adalah kegiatan Analisa Kerusakan sarana dan prasarana. Selama tahun 2017 Kegiatan ini memberi kontribusi pada tersedianya 1 Dokumen JITU Pasca (Perhitungan Kerusakan dan Kerugian Pasca bencana) setelah terjadinya Banjir bandang akhir tahun 2016, sehingga terbitlah Peraturan Walikota Bima tentang Rencana aksi Rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana banjir bandang tahun 2017. Hasil koordinasi tersebut akan menghasilkan sejumlah paket bantuan Rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana baik pada tahun berjalan maupun pada tahun berikutnya.

Dalam proses pelaksanaan program untuk mencapai sasaran strateegis ini secara teknis di lapangan sering menemui kendala seperti keterbatasan anggaran APBD menyebabkan terbatasnya jumlah paket yang bisa ditangani atau berkurangnya volume yang harus dikerjakan. Untuk mengantisipasi hal tersebut maka yang dilakukan adalah dengan membuat daftar prioritas program dan mendorong program dan kegiatan tersebut tetap berkelanjutan masuk pada Rencana Kerja SKPD terkait pada tahun tahun berikutnya. Upaya lain yang dilakukan adalah mengajukan proposal rehabilitasi dan rekonstruksi pasca benca ke BNPB atau Koordinasi kepada pihak Donor baik Dalam Negeri maupun Luar negeri, karena anggaran untuk perbaikan infrastruktur akibat bencana membutuhkan biaya yang cukup besar sementara daerah memiliki keterbatasan anggaran.

### **3. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan**

Pada umumnya, dalam menjalankan roda organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bima, ada beberapa faktor penyebab keberhasilan dan kegagalan untuk mencapai tujuan dan sasaran utama yang telah direncanakan sebelumnya.

Faktor – faktor penentu keberhasilan antara lain :

#### **a. Unsur Pimpinan memiliki strategi vision dalam menjalankan roda organisasi sehingga gerak organisasi BPBD Kota Bima sangat dinamis**

Sejak terbentuknya Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bima melalui Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 05 tahun 2010, Peningkatan aktivitas kegiatan penanggulangan bencana baik Prabencana, saat bencana maupun pasca bencana setiap tahunnya mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Hal ini dapat dilihat dari peningkatan jumlah pagu anggaran DPA BPBD Kota Bima dari tahun 2010 hingga 2017 adalah rata – rata 87 % per tahun, dan peningkatan bantuan dana dari BPBD Provinsi NTB dan BNPB melalui dana Siap pakai untuk kegiatan tanggap darurat kekeringan di Kota Bima dan Dana rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca bencana, disamping itu terdapat peningkatan program dan kegiatan kerjasama Pemerintah Kota Bima melalui BPBD dengan Organisasi donor seperti, Kerjasama dengan OXFAM Indonesia, JICA Jepang, Forum PRB Mbojo Ma Tenggo Kota Bima, Federasi TSBK, TSBK dan pendukung lainnya. Keberhasilan yang diuraikan di atas merupakan keberhasilan bersama atas manajemen organisasi yang cukup baik dari pimpinan BPBD Kota Bima dalam mengerahkan seluruh sumberdaya yang ada baik sumber daya manusia maupun peralatan yang masih terbatas.

#### **b. Perencanaan Organisasi yang sesuai dengan tuntutan paradigma Organisasi**

Selain unsur kepemimpinan, unsur perencanaan yang baik dalam organisasi memberikan pengaruh yang cukup besar untuk keberhasilan organisasi, Dokumen Perencanaan yang strategis dan penilaian yang tepat ke depan akan memberikan dampak ketepatan dalam pengambilan arah kebijakan – kebijakan organisasi. Dokumen Perencanaan yang telah disusun BPBD Kota Bima adalah seperti Rencana Strategis Periode 2014-2018, Rencana kerja tahun 2017, Rencana Penanggulangan Bencana Daerah (RPB) Kota Bima. Dokumen – dokumen tersebut dapat memberikan arah yang jelas dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi BPBD Kota Bima baik sebagai fungsi Pelaksana penanggulangan bencana maupun sebagai fungsi koordinasi dan Komando dalam Penanggulangan bencana di Kota Bima.

#### **c. Sumber daya manusia yang mumpuni**

Jumlah Pegawai BPBD Kota Bima sampai dengan 31 Desember 2017 sebanyak 41 Orang. Berdasarkan tingkat pendidikan pegawai BPBD didominasi oleh pegawai pada



tingkat pendidikan Sarjana S1 sebesar 47,5%, kemudian Tenaga dengan pendidikan SMA sederajat sebanyak 40 % , sebanyak 10 % tenaga dengan pendidikan S2 sementara 2,5 dengan pendidikan D3 .

Berdasarkan penempatan pegawai pada jabatannya, Jabatan Struktural pada BPBD Kota Bima telah terisi penuh oleh aparatur yang mumpuni, sehingga cukup memberikan sumbangsih bagi keberhasilan BPBD sehingga tercapai indikator target yang telah ditetapkan sebelumnya.

**d. Penerapan teknologi yang memadai**

Penguasaan teknologi yang memadai akan berdampak besar terhadap penyelesaian pekerjaan – pekerjaan yang diemban. BPBD Kota Bima dalam menjalankan tugasnya telah menggunakan teknologi informasi yang cukup memadai seperti ketersediaan Wifi, peralatan komputerisasi yang memadai, Simda keuangan, penganggaran dan asset, teknologi jaringan informasi untuk menerima dan melaporkan kejadian dan potensi bencana melalui radio, termasuk melakukan pendataan profil kelurahan menggunakan HP Android kerjasama dengan OXFAM Indonesia. Kesemuanya itu menjadi faktor pendukung keberhasilan BPBD dalam mencapai indikator target pada tahun 2017.

**e. Dukungan donor dan Lembaga Kemitraan Lokal**

Proyek kerjasama membangun ketangguhan masyarakat melalui program pengurangan risiko bencana antara Pemerintah Kota Bima dalam hal ini BPBD Kota Bima dengan OXFAM Indonesia melalui LP2DER sangat mendukung keberhasilan program program peningkatan kapasitas baik kelembagaan BPBD maupun masyarakat. Program kerjasama ini membawa Pemerintah Kota Bima menjadi Nominasi Kota Tangguh bencana dunia yang mewakili Indonesia di kancah internasional, sehingga beberapa kali Kepala Daerah beserta Kepala BPBD mengikuti pertemuan nasional bahkan Internasional di Negara Jepang, Thailan dan Bangkok terkait keberhasilan Kota Bima memulai proses pembentukan Kota Tangguh bencana. Selain dengan OXFAM, BPBD Kota Bima juga bekerjasama dengan JICA (Japan international Corporation Agency) dalam hal peningkatan kapasitas kelembagaan penanggulangan bencana yang beberapa kali juga mengirim Pemerintah daerah untuk belajar langsung ke Negara tersebut termasuk kerjasama dengan Konsulat Amerika untuk pelatihan tenaga medis dan kerjasama dengan pemerintah Australia untuk mengirim pegawai BPBD mengikuti pelatihan Pemadam Kebakaran di Australia.

Dukungan lain juga adalah dari Lembaga Lokal LP2DER Bima, Forum PRB Mbojo Matenggo Kota Bima yang didalamnya memiliki unsur Perguruan tinggi , TSBK, HIPGABI dan Lembaga yang peduli terhadap penanggulangan lainnya. Lembaga

tersebut sangat membantu dalam menyelesaikan kegiatan penyusunan dokumen – dokumen penanggulangan bencana seperti : RPB, Peta Risiko Bencana, RBBK dan dokumen pendukung lainnya dalam rangka menuju kemandirian masyarakat dalam menghadapi bencana.

Faktor – Faktor yang menyebabkan kegagalan organisasi.

**a. Kualifikasi Sumber Daya Manusia**

Pada uraian tentang keberhasilan BPBD, Sumberdaya yang mumpuni cukup tersedia pada struktur organisasi BPBD, namun pada tugas - tugas khusus seperti pengelola gudang dan Operator Pusdalops belum memiliki tenaga yang bersertifikat keahlian untuk menyelesaikan tugas - tugas secara profesional.

**b. Masih kurangnya Koordinasi dengan sektoral**

Tugas Pokok dan Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bima selain sebagai fungsi pelaksana penanggulangan bencana, juga memiliki fungsi koordinasi. Sebagai organisasi yang memiliki fungsi koordinasi dibidang penanggulangan bencana, diharapkan dapat menjalin koordinasi yang lebih baik dengan stakeholder terkait mengingat pekerjaan penanggulangan bencana memerlukan kerjasama yang baik antara tiga pilar yaitu Pemerintah, Swasta dan Dunia Usaha baik pada pra bencana, saat bencana maupun pasca bencana untuk program rehabilitasi dan konstruksi pasca bencana.

**c. Fasilitas Sarana Prasarana Pendukung masih kurang memadai**

Dalam rangka meningkatkan pelayanan bencana, fasilitas sarana prasarana pendukung sangat diperlukan. Berdasarkan analisa kebutuhan sarana prasarana pendukung saat bencana, persentase ketersediaan sarana prasarana penunjang saat bencana selama tahun 2017 sebesar 80%, ini berarti ketersediaannya cukup memadai, sarana prasarana yang masih kurang diantaranya adalah, Gudang Logistik yang kurang luas, Alat berat seperti ekskavator ampibi, Perahu karet masih kurang, Sistem Peringatan Dini untuk semua bencana masih terbatas dll.

Solusi yang dilakukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bima untuk mengurangi ketidakberhasilan di atas adalah :

- a. Mengoptimalkan penggunaan sumberdaya yang ada dan Upaya pemenuhan tenaga trampil dapat dilakukan dengan membentuk Tim Teknis penyusunan dokumen penanggulangan bencana yang anggotanya dari SKPD terkait seperti Bappeda, bagian Hukum Setda, Unsur Perguruan tinggi, Forum PRB Kota Bima, TSBK dan lembaga lainnya untuk secara bersama – sama menyusun dokumen – dokumen penanggulangan Bencana seperti : RPB, Analisa Risiko Bencana, dan dokumen penanggulangan bencana lainnya hingga menjadi legitimasi hukum sebagai dasar dalam pelaksanaan penanggulangan bencana di Kota Bima

- b. Melakukan upaya – upaya diplomasi dengan stakeholder lain melalui legitimasi hukum dalam rangka peningkatan peran masyarakat dan dunia usaha dalam hal penanggulangan bencana dengan diterbitkannya
- c. Melakukan sharing dana dengan donor, dengan mengupayakan pengalokasian anggaran bantuan dari donor pada program dan kegiatan yang tidak dialokasikan dari Anggaran BPBD Kota Bima, APBD Kota maupun dari dari APBN melalui BNPB.
- d. Mengupayakan bantuan dari BNPB dan BPBD Provinsi untuk menambah fasilitas sarana prasarana penanggulangan bencana termasuk bantuan Logistik bencana maupun kerjasama untuk Pengurangan risiko bencana, sehingga pada tahun ini BPBD Kota Bima mendapat alokasi bantuan pembentukan kelurahan tangguh bencana 1 Kelurahan dari BPBD Provinsi untuk Kelurahan tangguh Pratama dan 2 Kelurahan untuk Pengembangan kelurahan tangguh dari BNPB sebanyak 1 Kelurahan serta bantuan Dana melalui program Mitigasi struktural rumah aman bencana.
- e. Untuk menambah wawasan bagi Aparatur pemadam kebakaran maupun Aparatur BPBD umumnya, upaya yang dilakukan adalah dengan mengirim/ mengikutsertakan tenaga PMK dan Aparatur BPBD pada diklat - diklat teknis penanggulangan bencana.

#### **4. Analisis efisiensi penggunaan sumber daya**

Efisiensi kegiatan adalah kemampuan suatu kegiatan untuk menggunakan input yang lebih sedikit tetapi dapat menghasilkan output yang sama, atau input yang sama dapat menghasilkan output yang lebih besar. Fokus perhatian dalam pengukuran efisiensi adalah indikator input dan output dari suatu kegiatan. Angka capaian efisiensi diperoleh dengan membandingkan capaian output dengan capaian input. Angka capaian efisiensi tersebut kemudian dibandingkan dengan standar efisiensi. Dalam laporan ini standar efisiensi yang dipakai adalah indeks efisiensi target/rencana/anggaran, yaitu 1 (satu). Bila angka capaian efisiensi sama atau lebih besar dari standar efisiensi, maka kegiatan yang bersangkutan dianggap efisien. Sebaliknya bila angka capaian efisiensi lebih kecil dari standar efisiensi, maka kegiatan tersebut dianggap tidak efisien.

Selama Tahun 2017, dari sejumlah 14 (empat belas) program dan 41 kegiatan strategis yang dilaksanakan sebesar 100 % telah dapat dilaksanakan dengan efisien.

#### **5. Analisis program dan kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**

Program dan kegiatan yang telah dilakukan selama tahun 2017 sebanyak 14 program dan 41 Kegiatan. Pencapaian target program dan kegiatan ini sangat menunjang keberhasilan

pencapaian target indikator kinerja utama BPBD. dari data tabel pengukuran kinerja organisasi rata - pencapaian dari 5 sasaran strategis adalah sebesar 103,11 % atau mendapat pencapaian sangat bagus 103, 11 % sementara Rata – rata pencapaian 5 indikator sasaran kinerja dari target rencana strategis 5 tahunan sebesar 86,43 %. Pengukuran Kinerja Program dan Kegiatan BPBD Kota Bima tahun 2017 dapat dilihat pada tabel pada lampiran LAKIP ini.

## B. REALISASI ANGGARAN

Dukungan dana yang besar memberikan pengaruh yang cukup besar pula untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan, sehingga dapat berhasil dengan baik, maka secara berkesinambungan dapat menunjang tercapainya target indikator kinerja utama (IKU) BPBD Kota Bima tahun 2017. Anggaran yang tersedia untuk mendukung keberhasilan program dan kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bima tahun 2017 ini adalah sebesar Rp. 6.305.875.476 yang terdiri dari **Belanja Tidak Langsung** sebesar Rp. 2.288.375.476 terdiri dari belanja pegawai sebesar Rp. 2.288.375.476 dan **Belanja Langsung** sebesar Rp. 4.017.500.000,- yang terdiri dari belanja pegawai Rp. 1.204.322.000,- Belanja barang dan jasa Rp. 1.697.110.140,- dan belanja modal sebesar Rp. 1.116.067.860,-

Realisasi belanja tahun 2015 adalah Rp 6.123.335.768,- atau sebesar 97,11% dengan rincian realisasi belanja tidak langsung sebesar Rp. 5.103.480.908,- atau 98,34 % dan belanja langsung sebesar Rp. 1.019.854.860 atau 91,38 %. Laporan realisasi anggaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bima tahun anggaran 2017. Rekapitulasi Realisasi Anggaran BPBD Kota Bima tahun 2015 secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel.**

**Realisasi Anggaran Belanja BPBD Kota Bima tahun 2015**

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Terserap (Rp)	Realisasi (Rp)	% Realisasi
1.	Belanja Tidak Langsung	2.288.375.476	1.930.912.463	1.930.912.463	98.22
	a. Belanja Pegawai	2.288.375.476	1.930.912.463	1.930.912.463	
2.	Belanja Langsung	4.017.500.000	3.437.436.058	3.437.436.058	94.46
	a. Belanja Pegawai	1.204.322.000	763.293.000	763.293.000	

b. Belanja Barang dan jasa	1.697.110.140	1.654.288.198	1.654.288.198	
c. Belanja Modal	1.116.067.860	1.019.854.860	1.019.854.860	
<b>Jumlah</b>	<b>6.305.875.476</b>	<b>6.123.335.768</b>	<b>6.123.335.768</b>	<b>97.11</b>

Sehubungan dengan pengelolaan keuangan tersebut di atas dapat dijelaskan sebagai berikut :

Secara garis besar pelaksanaan aspek keuangan telah sesuai dengan prinsip-prinsip pelaporan yang lazim, dan pertanggung jawabannya telah sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku, hemat, efisien dan efektif serta mengusahakan seminimal mungkin terjadinya penyimpangan atau penyalahgunaan.

Namun demikian, akibat adanya kegiatan yang tidak efisien sebagaimana telah dijelaskan pada bab-bab sebelumnya, maka terdapat pula penggunaan dana yang tidak efisien sebesar Rp. 0 (%).

Berdasarkan hasil audit yang dilakukan oleh Aparat Pengawasan Fungsional Pemerintah yaitu tidak terdapat penggunaan dana yang merugikan keuangan negara.

Analisis pencapaian kinerja keuangan merupakan tingkat pencapaian target dari masing-masing indikator keuangan yang telah ditetapkan dalam dokumen rencana kerja. Pengukuran tingkat pencapaian kinerja keuangan didasarkan pada data hasil pengukuran kinerja keuangan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Bima mencapai 97,11 % hal ini berarti tingkat pencapaian Kinerja Keuangan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Bima memuaskan. Secara rinci dapat dilihat pada tabel Tingkat Pencapaian Kinerja Keuangan Tahun 2015 pada lampiran .

Selain Anggaran yang tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) BPBD juga mengelola dana Tak terduga yang ada di Pos DPKAD Kota Bima dan Dana Siap Pakai dari BNPB. Dana tak terduga dan dana Siap pakai yang dimaksud untuk membiayai kegiatan kebencanaan yang sifatnya Darurat.

Selama tahun 2015 Dana tak terduga yang teralokasidi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bima sebesar Rp.**265.570.000** dan Dana siap pakai dari BNPB untuk Tanggap

darurat kekeringan adalah sebesar Rp. **286,940,000** dan secara rinci dapat dilihat pada Lampiran LAKIP ini.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bima selain mendapatkan Dana Tak Terduga di samping itu juga mendapatkan bantuan dana yang berasal dari kerja sama antar daerah, daerah dengan pihak ke tiga dan daerah dengan instansi vertikal di daerah atau luar negeri. Hal itu dapat di lihat lewat kerjasama dengan Oxfam Indonesia melalui program Ketangguhan Kota. Selain itu juga Badan Penanggulangan Bencana Kota Bima mendapatkan anggaran dari BNPB Pusat melalui program Penguatan kelembagaan Penanggulangan Bencana dan Penanganan Transisi Darurat Kepemulihan, dan yang terakhir bantuan anggaran juga diperoleh dari BPBD Provinsi NTB Lewat Program Penanganan Bencana Kekeringan. Untuk lebih jelasnya dapat di lihat di data kerjasama (Terlampir).

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) merupakan media akuntabilitas yang dapat digunakan sebagai alat komunikasi pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bima, Media ini juga dapat dipakai sebagai umpan balik pengambilan keputusan pihak-pihak terkait dalam melakukan langkah-langkah perbaikan dan peningkatan kinerja di masa-masa yang akan datang.

Kinerja (performance) dapat dianalisis melalui dua aspek yaitu proses bekerja dan hasil prestasi kerja, dimana kinerja juga merupakan perpaduan antara motivasi yang terdapat dalam diri seseorang dan kemampuannya dalam melaksanakan pekerjaan. Pengelolaan kinerja merupakan proses yang dirancang untuk menghubungkan satuan-satuan organisasi sedemikian rupa sehingga tujuan organisasi dan tujuan individu bertemu (Cushway,1994).

Manajemen kinerja didasarkan pada informasi yang diperoleh dari laporan atau sistem laporan kerja. Tujuannya untuk membantu meningkatkan prestasi dengan mengetahui kekuatan dan kelemahan serta melakukan hal-hal yang akan mengembangkan kekuatan untuk mengatasi kelemahan.

Secara garis besar, pencapaian kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bima Tahun 2017, adalah sebagai berikut :

1. Berdasarkan pengukuran dan evaluasi kinerja yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, Selama Tahun 2017, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bima melaksanakan 5 target pencapaian kinerja sasaran mewujudkan ketangguhan Kota dalam penanggulangan bencana melalui 6 indikator utama untuk mencapai Visi dan Misi organisasi dengan rata – rata pencapaian 103,11%;

2. Realisasi Renstra BPBD Kota Bima periode tahun 2014 – 2018 sampai dengan tahun 2017 adalah rata – rata sebesar 86,43 % dari target sampai akhir tahun 2018. Hasil pencapaian realisasi dari target renstra ini sangat luar biasa, sehingga ke depan yang perlu dilakukan adalah meningkatkan realisasi beberapa target indicator organisasi yang belum memperlihatkan hasil di tahun 2017 ini, seperti tingkat koordinasi rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana
3. **Sedangkan kinerja keuangan dapat dicapai sebesar 97,11 % dari rata – rata capaian belanja langsung dan belanja tidak langsung SKPD.**

#### **B. SARAN**

1. Lakip ini diharapkan dapat menjadi gambaran keberhasilan/kegagalan BPBD dalam melaksanakan program dan kegiatan selama tahun 2017, sehingga menjadi bahan pelajaran dalam melaksanakan program dan kegiatan tahun-tahun berikutnya.
2. Kerjasama dari semua komponen baik internal BPBD, maupun instansi terkait untuk terus meningkatkan koordinasi menjadi salah satu faktor keberhasilan BPBD dalam melaksanakan semua program yang telah ditetapkan.

Bima, Pebruari 2018

KEPALA PELAKSANA  
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH  
KOTA BIMA,

**Ir H.Sarafuddin, MM**

Pembina Utama Muda (IV/c)

NIP. 19640715 199203 1 017



## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI .....	ii
I. PENDAHULUAN	
A. LATAR BELAKANG .....	1
B. MAKSUD, TUJUAN DAN LANDASAN HUKUM .....	4
C. KEDUDUKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI.....	5
D. ASPEK STRATEGIS .....	17
E. STRUKTUR ORGANISASI .....	19
F. SISTEMATIKAN PENYUSUNAN .....	21
II. PERENCANAAN KINERJA	
A. RPJMD 2013-2018 .....	22
B. RENCANA STRATEGIS TAHUN 2014-2018 .....	27
C. PENETAPAN KINERJA TAHUN 2015 .....	31
III. AKUNTABILITAS KINERJA	
A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI .....	34
B. REALISASI ANGGARAN .....	59
IV. PENUTUP	
A. KESIMPULAN .....	63
B. SASARAN .....	64
LAMPIRAN – LAMPIRAN	

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. LATAR BELAKANG

Sebagaimana diketahui bahwa Bangsa Indonesia pada umumnya, saat ini dihadapkan pada perubahan lingkungan setrategis yang sangat dinamis dan mempengaruhi birokrasi dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Salah satu perubahan lingkungan strategis dimaksud adalah penerapan paradigma pemerintahan yang baik (Good Governance) yang memberikan peran dan fungsi yang seimbang antara pemerintah, swasta dan masyarakat dengan prinsip-prinsip yang mendasarinya antara lain: Transparansi, partisipasi dan akuntabilitas. Apabila keseimbangan peran dari ketiga alasan tersebut dapat diterapkan maka prinsip dasar dari Good Governance tersebut dapat dirasakan oleh pihak-pihak yang terkait. Hal ini juga memudahkan institusi pemerintah dalam melaksanakan pemerintahan dan mempertanggung jawabkan kinerja kepada masyarakat. Terselenggaranya pemerintahan yang baik (Good Governance) merupakan persyaratan bagi setiap pemerintah untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan seta cita-cita bangsa.

Dalam rangka itu diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggung jawaban yang tepat, jelas, terukur dan legitimate, sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari korupsi, kolosi dan nepotisme sesuai dengan undang-undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolosi dan Nepotisme dan tata cara penyusunannya mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2015 tentang Tata cara reuview Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, sebagai perwujudan pertanggung jawaban keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan maka disusunlah Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Badan Penanggulangan Bencana

Daerah Kota Bima Tahun 2015 sebagai perwujudan Akuntabilitas Kinerja yang tercermin dari hasil pencapaian Kinerja berdasarkan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran yang telah ditetapkan.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ( LAKIP ) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bima tahun 2017 ini disusun berdasarkan Rencana Setrategis tahun ke empat dari Renstra tahun 2014 – 2018.

Dalam melaksanakan tugasnya BPBD didukung oleh 40 pegawai yang terdiri dari 41 Pegawai Negeri Sipil dan 23 pegawai tidak tetap. Jumlah pegawai, pendidikan, golongan dan jabatannya sesuai tabel berikut ;

1. Jumlah PNS dan Non PNS Badan penanggulangan Bencana berjumlah 64 orang dengan rincian sesuai table berikut :

Tabel 3.2. Jumlah Pegawai Badan Penanggulangan Bencana Daerah

No	Pegawai	Jumlah	%
1	PNS	28	70
2	CPNSD	-	0
3	Honoror	12	30
	Total	40	100

2. Susunan Pegawai berdasarkan:

- a. Golongan:

Tabel 3.2. Susunan Pegawai berdasarkan Golongan

No	Golongan	Jumlah	
		PNS/Non PNS	CPNS
1	Golongan IV	5	-
2	Golongan III	17	-
3	Golongan II	6	-
4	Golongan I	-	-
5	Non Golongan	12	

	Total	40	-
--	-------	----	---

b. Jabatan Struktural :

Tabel 3.3. Susunan Pegawai berdasarkan Jabatan Struktural

No	Eselon	Jumlah
1	Eselon II	1
2	Eselon III	4
3	Eselon IV	8
	Jumlah	13

c. Tingkat Pendidikan :

Tabel 3.4. Susunan Pegawai berdasarkan Pendidikan

No	Pegawai	Jumlah	%
1	S3	0	0
2	S2	4	10
3	S1	19	47,5
4	D3	1	2,5
5	SMA/Sederajat	16	40
6	SMP/Sederajat	0	0
7	SD/Sederajat	0	0
	Total	40	100

Disamping sumber daya manusia keberhasilan dan kegagalan suatu kegiatan dipengaruhi juga oleh sarana dan prasarana pendukung. Sarana dan Prasarana pendukung kantor antara lain terlihat pada tabel 8 pada Lampiran LAKIP ini

## **B. MAKSUD, TUJUAN DAN LANDASAN HUKUM**

### **1. Maksud dan Tujuan**

Maksud penyusunan LAKIP BPBD Kota Bima Tahun 2017 adalah Sebagai penjabaran dari visi dan misi BPBD yang terwujud dalam tingkat keberhasilan/kegagalan pelaksanaan kegiatan - kegiatan sesuai dengan Program dan kebijakan yang telah ditetapkan.

Tujuan penyusunan LAKIP BPBD Kota Bima Tahun 2017 adalah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi BPBD dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui pertanggungjawaban secara periodik.

### **2. Landasan Hukum**

1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
3. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme;
4. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
7. Instruksi Presiden RI Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan dan tata cara Reviu atas laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor .... tentang Revisi RPJMD Kota Bima tahun 2013-2018;
13. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pembentukan Lembaga Lain Sebagai Bagian dari Perangkat Daerah;
14. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Kota Bima;
15. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bima (Lembaran Daerah Kota Bima tahun 2016 Nomor 183, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bima Nomor 88);
16. Peraturan Walikota Kota Bima Nomor 58 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bima Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2017 Nomor 386).

### **C. KEDUDUKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI**

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 05 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain Sebagai Bagian dari Perangkat Daerah ( BPBD) sebagai berikut:

Badan Penanggulangan Bencana Daerah merupakan unsur pelaksana otonomi daerah dipimpin oleh seorang Kepala Pelaksana yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Daerah melalui Kepala BPBD (Sekretaris Daerah – ex-officio). (Peraturan Kepala BNPB No. 3 tahun 2008)

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bima sebagai Lembaga Teknis Daerah diposisikan sebagai institusi yang melaksanakan penanggulangan bencana daerah, membantu WaliKota Bima dalam:

- a. Perumusan kebijakan teknis dibidang Penanggulangan Bencana Daerah;

- b. Perumusan dan penyusunan kebijakan program pengembangan dibidang Penanggulangan Bencana Daerah;
- c. Pembinaan dan Pengawasan di bidang Penanggulangan Bencana Daerah;
- d. Menyelenggarakan pendidikan dan latihan keterampilan teknis dan manajemen sesuai dengan ruang lingkup tugasnya;
- e. Pengolaan dan pemberian Bantuan sesuai dengan ruang lingkup tugasnya;
- f. Pemetaan kawasan Rawan Bencana;
- g. Pembinaan terhadap seluruh perangkat .

Untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi tersebut Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bima mempunyai tugas :

#### **1. UNSUR PENGARAH**

Unsur Pengarah dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BPBD (Sekretaris Daerah – ex-officio), mempunyai tugas :

- 1) Unsur Pengarah mempunyai tugas memberikan masukan dan saran kepada Kepala BPBD dalam hal penanggulangan bencana;
- 2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), unsur pengarah menyelenggarakan fungsi:
  - a) Perumusan kebijakan penanggulangan bencana daerah;
  - b) Pemantauan
  - c) Evaluasi dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.

## 2. KEPALA PELAKSANA

Kepala Pelaksana Badan dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BPBD (Sekretaris Daerah – ex-officio). (Peraturan Kepala BNPB No. 3 tahun 2008). Kepala Pelaksana mempunyai tugas :

- a. Menetapkan program kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- b. Membuat perumusan kebijakan teknis Bidang Penanggulangan Bencana Daerah;
- c. Melaksanakan pembinaan ketatausahaan;
- d. Mengatur, mendistribusikan dan mengkoordinasi tugas-tugas staf sesuai dengan bidangnya masing-masing;
- e. Memberikan petunjuk dan bimbingan serta pengawasan kepada staf;
- f. Memeriksa hasil kerja staf ;
- g. Menetapkan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencanayang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi, serta rekonstruksi secara adil dan setara;
- h. Menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- i. Menyusun, menetapkan dan menginformasikan peta rawan bencana;
- j. Menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana;
- k. Melaksanakan penanggulangan bencana secara terintegrasi yang meliputi pra bencana, saat tanggap darurat dan pasca bencana;
- l. Melaksanakan pendidikan dan pelatihan penanggulangan bencana;
- m. Mengevaluasi dan mempertanggungjawabkan hasil kerja staf ;
- n. melaporkan pertanggungjawaban kinerja kepada Walikota;
- o. Melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan oleh Pimpinan.
- p. Membentuk Satuan Tugas Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana.



### **3. SEKRETARIAT**

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris Badan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

#### **Sekretariat mempunyai tugas :**

- a. Menyusun program kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- b. Menyusun laporan pertanggungjawaban kinerja Badan berdasarkan laporan hasil kegiatan masing -masing Bidang dan Sekretariat;
- c. Mengatur, mendistribusikan dan mengkoordinasikan tugas-tugas staf sesuai dengan Sub Bagian masing-masing;
- d. Memberikan petunjuk dan bimbingan teknis serta pengawasan kepada staf ;
- e. Memeriksa hasil kerja staf ;
- f. Memeriksa pelayanan teknis dan administrasi kepada seluruh bidang dalam lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- g. Melaksanakan pengelolaan urusan umum dan kepegawaian;
- h. Melaksanakan pengelolaan urusan keuangan;
- i. Mengevaluasi dan mempertanggungjawabkan hasil kerja staf ;
- j. Melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan oleh Pimpinan.

#### **Sekretariat terdiri dari :**

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
2. Sub Bagian Keuangan;
3. Sub Bagian Program.

#### **1. Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas :**

- a. Menyiapkan rencana kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- b. Menyusun laporan hasil kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagai bahan penyusunan laporan hasil kegiatan sekretariat;
- c. Mengatur, mendistribusikan dan mengkoordinasikan tugas-tugas staf sesuai dengan bidangnya masing-masing;
- d. Memberikan petunjuk dan bimbingan teknis serta pengawasan kepada staf ;

- e. Memeriksa hasil kerja staf ;
- f. Menyiapkan rencana kebutuhan, pengembangan dan mutasi pegawai di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- g. Melaksanakan urusan surat-menyurat dan pengadaan naskah dinas;
- h. Melaksanakan pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan kantor;
- i. Melaksanakan urusan hubungan masyarakat, perjalanan dinas dan keprotokolan;
- j. Menyiapkan data dan membuat laporan kepegawaian;
- k. Melakukan upaya-upaya peningkatan kesejahteraan dan disiplin pegawai;
- l. Mengevaluasi dan mempertanggungjawabkan hasil kerja staf ;
- m. Melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan oleh Pimpinan.

**2. Sub. Bagian Keuangan mempunyai tugas :**

- a. Menyiapkan rencana kegiatan Sub Bagian Keuangan;
- b. Menyusun laporan hasil kegiatan Sub Bagian Keuangan sebagai bahan penyusunan laporan hasil kegiatan Sekretariat;
- c. Mengatur, mendistribusikan dan mengkoordinasikan tugas-tugas staf sesuai dengan bidangnya masing-masing;
- d. Memberikan petunjuk dan bimbingan teknis serta pengawasan kepada staf ;
- e. Memeriksa hasil kerja staf ;
- f. Menyusun rencana anggaran biaya langsung dan tak langsung;
- g. Menyelenggarakan tata usaha keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku dan pedoman yang telah ditetapkan;
- h. Membuat laporan pertanggungjawaban keuangan;
- i. Mengevaluasi dan mempertanggungjawabkan hasil kerja staf ;
- j. Melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan oleh Pimpinan.

**3. Sub. Bagian Program mempunyai tugas :**

- a. Menyiapkan rencana hasil kegiatan Sub. Bagian sebagai bahan penyusunan rencana kegiatan sekretariat;
- b. Menyusun laporan hasil kegiatan Sub. Bagian sebagai bahan penyusunan laporan hasil kegiatan sekretariat;
- c. Mengatur, mendistribusikan, dan mengkoordinasikan tugas-tugas staf sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing;
- d. Memberikan petunjuk dan bimbingan teknis serta pengawasan kepada staf ;
- e. Memeriksa hasil kerja staf ;
- f. Mengadakan koordinasi dengan kepala Sub Bagian dan Bidang untuk kerhamonisan kerja;
- g. Melakukan pengumpulan, analisis dan penyajian data dibidang penanggulangan bencana;
- h. Menyiapkan bahan perumusan rencana dan program kerja berdasarkan rencana kegiatan masing-masing Bidang dan Sekretariat;
- i. Menyiapkan bahan laporan badan sebagai bahan pertanggungjawaban kepada Walikota;
- j. Menyiapkan bahan pembinaan organisasi dan tatalaksana dalam peningkatan kinerja badan;
- k. Membuat hasil laporan kegiatan sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban hasil kerja staf ;
- l. Mengevaluasi dan mempertanggungjawabkan hasil kerja staf ;
- m. Melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan oleh Pimpinan.

Masing-masing Sub. Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub. Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretariat Badan.

#### **4. BIDANG-BIDANG**

##### **4.1 Pencegahan dan Kesiapsiagaan mempunyai tugas :**

- a. Menyiapkan rencana kegiatan Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan;
- b. Menyusun laporan hasil kegiatan bidang berdasarkan laporan hasil kegiatan masing- masing Kepala Seksi dilingkungan Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan sebagai bahan penyusunan laporan pertanggungjawaban kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- c. Mengatur, mendistribusikan dan mengkoordinasikan tugas-tugas staf sesuai dengan bidangnya masing-masing;
- d. Memberikan petunjuk dan bimbingan teknis serta pengawasan kepada staf ;
- e. Memeriksa hasil kerja staf ;
- f. Melakukan serangkaian kegiatan sebagai upaya untuk menghilangkan dan atau mengurangi ancaman bencana;
- g. Melaksanakan serangkaian kegiatan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat dan berdaya guna;
- h. Mengevaluasi dan mempertanggungjawabkan hasil kerja staf ;
- i. Melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan oleh Pimpinan.

Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Pelaksana.

Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan terdiri dari :

##### **1. Seksi Pencegahan;**

##### **2. Seksi Kesiapsiagaan.**

###### **1.Seksi Pencegahan mempunyai tugas :**

- a. Menyiapkan rencana Kegiatan Seksi Pencegahan;
- b. Menyusun laporan hasil kegiatan Seksi sebagai bahan penyusunan laporan hasil kegiatan Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan;
- c. Mengatur, mendistribusikan dan mengkoordinasikan tugas-tugas staf sesuai dengan bidangnya masing-masing;

- d. Memberikan petunjuk dan bimbingan teknis serta pengawasan kepada staf ;
- e. Memeriksa hasil kerja staf ;
- f. Melakukan identifikasi dan pengenalan secara pasti terhadap sumber bahaya atau ancaman bencana;
- g. Melaksanakan kontrol terhadap penguasaan dan pengelolaan sumber daya alam yang secara tiba-tiba dan/atau berangsur berpotensi menjadi sumber bahaya bencana;
- h. Melakukan pemantauan penggunaan teknologi yang secara tiba-tiba dan/atau berangsur berpotensi menjadi sumber ancaman atau bahaya bencana;
- i. Melakukan koordinasi pengelolaan tata ruang dan lingkungan hidup;
- j. Melaksanakan penguatan ketahanan sosial masyarakat;
- k. Mengevaluasi dan mempertanggungjawabkan hasil kerja staf ;
- l. Melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan oleh Pimpinan.

**2. Seksi Kesiapsiagaan mempunyai tugas :**

- a. Menyiapkan rencana kegiatan Seksi Kesiapsiagaan;
- b. Menyusun laporan hasil kegiatan Seksi sebagai bahan penyusunan laporan hasil kegiatan Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan;
- c. Mengatur, mendistribusikan dan mengkoordinasikan tugas-tugas staf sesuai dengan bidangnya masing-masing;
- d. Memberikan petunjuk dan bimbingan teknis serta pengawasan kepada staf ;
- e. Memeriksa hasil kerja staf ;
- f. Menyiapkan penyusunan dan uji coba rencana penanggulangan kedaruratan bencana;
- g. Menyiapkan pengorganisasian, pemasangan dan pengujian peringatan dini;

- h. Menyiapkan penyediaan dan penyiapan barang pasokan pemenuhan kebutuhan dasar;
  - i. Menyiapkan pengorganisasian, penyuluhan, pelatihan dan gladi tentang mekanisme tanggap darurat;
  - j. Menyiapkan lokasi evakuasi;
  - k. Melakukan penyusunan data akurat, informasi dan pemutahiran prosedur tetap tanggap darurat bencana;
  - l. Melaksanakan penyediaan dan penyiapan bahan, barang dan peralatan untuk pemenuhan pemulihan prasarana dan sarana;
  - m. Mengevaluasi dan mempertanggungjawabkan hasil kerja staf ;
  - n. Melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan oleh Pimpinan.
- Masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan.

#### **4.2 Bidang Kedaruratan dan Logistik mempunyai tugas :**

- a. Menyiapkan rencana kegiatan Bidang Kedaruratan dan Logistik;
- b. Menyusun laporan hasil kegiatan bidang berdasarkan laporan hasil kegiatan masing masing Kepala Seksi di lingkungan Bidang Kedaruratan dan Logistik sebagai bahan penyusunan laporan pertanggungjawaban kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- c. Mengatur, mendistribusikan dan mengkoordinasikan tugas-tugas staf sesuai dengan bidangnya masing-masing;
- d. Memberikan petunjuk dan bimbingan teknis serta pengawasan kepada staf ;
- e. Memeriksa hasil kerja staf ;
- f. Melakukan dan mengkoordinasikan serangkaian kegiatan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak yang ditimbulkan;
- g. Melakukan upaya memberikan bantuan untuk memenuhi kebutuhan dasar pada saat keadaan darurat;

- h. Mengevaluasi dan mempertanggungjawabkan hasil kerja staf ;
- i. Melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan oleh Pimpinan.

Bidang Kedaruratan dan Logistik dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pelaksana.

Bidang Kedaruratan dan Logistik terdiri dari :

**1. Seksi Tanggap Darurat;**

**2. Seksi Logistik**

**1. Seksi Tanggap Darurat mempunyai tugas :**

- a. Menyiapkan rencana kegiatan Seksi Tanggap Darurat;
- b. Menyusun laporan hasil kegiatan Seksi sebagai bahan penyusunan laporan hasil kegiatan Bidang Tanggap Darurat;
- c. Mengatur, mendistribusikan dan mengkoordinasikan tugas-tugas staf sesuai dengan bidangnya masing-masing;
- d. Memberikan petunjuk dan bimbingan teknis serta pengawasan kepada staf;
- e. Memeriksa hasil kerja staf;
- f. Menyiapkan penyusunan dan uji coba rencana penanggulangan kedaruratan bencana;
- g. Menyiapkan serangkaian kegiatan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak yang ditimbulkan;
- h. Mengkoordinasikan serangkaian kegiatan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak yang ditimbulkan;
- i. Mengevaluasi dan mempertanggungjawabkan hasil kerja staf ;
- j. Melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan oleh Pimpinan.

**2. Seksi Logistik mempunyai tugas :**

- a. Menyiapkan rencana kegiatan Seksi logistik;
- b. Menyusun laporan hasil kegiatan Seksi sebagai bahan penyusunan laporan hasil kegiatan Bidang Kedaruratan dan Logistik;
- c. Mengatur, mendistribusikan dan mengkoordinasikan tugas-tugas staf sesuai dengan bidangnya masing-masing;

- d. Memberikan petunjuk dan bimbingan teknis serta pengawasan kepada staf
  - e. Memeriksa hasil kerja staf;
  - f. Menyiapkan pelaksanaan distribusi logistik;
  - g. Melaksanakan pengaturan distribusi logistik;
  - h. Mengevaluasi dan mempertanggungjawabkan hasil kerja staf;
  - i. Melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan oleh Pimpinan.
- Masing-masing Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik.

#### **4.3 Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi mempunyai tugas :**

- a. Menyusun rencana kegiatan Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi;
- b. Menyusun laporan hasil kegiatan bidang berdasarkan laporan hasil masing-masing Kepala Seksi dilingkungan Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi sebagai bahan penyusunan laporan pertanggungjawaban kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- c. Mengatur, mendistribusikan dan mengkoordinasikan tugas-tugas staf sesuai dengan bidangnya masing-masing;
- d. Memberikan petunjuk dan bimbingan teknis serta pengawasan kepada staf;
- e. Memeriksa hasil kerja staf;
- f. Melaksanakan koordinasi pelaksanaan di bidang penanggulangan bencana pada saat pasca bencana dalam hal penanganan pengungsi dengan instansi terkait, lembaga serta masyarakat;
- g. Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan di bidang penanggulangan bencana pada saat pasca bencana;
- h. Mengevaluasi dan mempertanggungjawabkan hasil kerja staf;
- i. Melaksanakan tugas dinas lainnya yang di berikan oleh Pimpinan.

Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.

Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi terdiri dari :



**1. Seksi Rehabilitasi;**

**2. Seksi Rekonstruksi.**

**1. Seksi Rehabilitasi mempunyai tugas :**

- a. Menyiapkan rencana kegiatan Seksi Rehabilitasi ;
- b. Menyusun laporan hasil kegiatan Seksi sebagai bahan penyusunan laporan hasil kegiatan Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi;
- c. Mengatur, mendistribusikan dan mengkoordinasikan tugas-tugas staf sesuai dengan bidangnya masing-masing;
- d. Memberikan petunjuk dan bimbingan teknis serta pengawasan kepada staf;
- e. Memeriksa hasil kerja staf;
- f. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan program rehabilitasi dan penanganan pasca bencana;
- g. Melaksanakan koordinasi pelaksanaan dibidang bencana pada saat rehabilitasi penanganan pengungsi dengan instansi terkait, lembaga serta masyarakat;
- h. Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan di bidang bencana pada saat rehabilitasi penanganan pengungsi;
- i. Mengevaluasi dan mempertanggungjawabkan hasil kerja staf;
- j. Melaksanakan tugas dinas lainnya yang di berikan oleh Pimpinan.

**2. Seksi Rekonstruksi mempunyai tugas :**

- a. Menyiapkan rencana kegiatan Seksi Rekonstruksi;
- b. Menyusun laporan hasil kegiatan Seksi sebagai bahan penyusunan laporan hasilkegiatan Bidang rehabilitasi dan Rekonstruksi;
- c. Mengatur, mendistribusikan dan mengkoordinasikan tugas-tugas staf sesuai denganbidangnya masing-masing;
- d. Memberikan petunjuk dan bimbingan teknis serta pengawasan kepada staf;
- e. Memeriksa hasil kerja staf;
- f. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan program rekonstruksi dalam penanganan pasca bencana;
- g. Melaksanakan koordinasi pelaksanaan di bidang bencana pada saat rekonstruksi dengan instansi terkait, lembaga serta masyarakat;

- h. Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan di bidang penanggulangan bencana pada saat rekonstruksi;
- i. Mengevaluasi dan mempertanggungjawabkan hasil kerja staf;
- j. Melaksanakan tugas dinas lainnya yang di berikan oleh Pimpinan.

Masing-masing Seksi dipimpin oleh Seorang Kepala Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi.

#### D. ASPEK STRATEGIS

Sebagai lembaga Pemerintah, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bima dituntut untuk dapat mewujudkan *Good Governance* atau *Kepemerintahan yang baik*. Pengertian *Kepemerintahan yang baik (good governance)*, dapat diidentifikasi dengan indikator-indikator yang terkandung didalamnya. UNDP (LAN; 2000) mengajukan karakteristik *good governance*, sebagai berikut :

- *Participation* ; Setiap warga negara mempunyai suara dalam pembuatan keputusan, baik secara langsung maupun secara intermediasi institusi legitimasi yang mewakili kepentingannya. Partisipasi seperti ini dibangun atas dasar keabsahan berasosiasi dan berbicara serta berpartisipasi secara konstruktif.
- *Rule of law* ; Kerangka hukum harus adil dan dilaksanakan tanpa pandang bulu, terutama hukum untuk hak azasi manusia.
- *Transparancy* ; Transparansi dibangun atas dasar kebebasan arus informasi. Proses-proses, lembaga dan informasi yang secara langsung dapat diterima oleh mereka yang membutuhkan.
- *Responsive* ; Lembaga-lembaga dan proses-proses harus mencoba untuk melayani setiap stake holders.
- *Consensus Orientation* ; *Good governance* menjadi perantara kepentingan yang berbeda untuk memperoleh pilihan terbaik bagi kepentingan yang lebih luas, baik dalam kebijakan-kebijakan maupun prosedur-prosedur.

- *Equity* ; Semua warga negara, baik laki-laki maupun perempuan mempunyai kesempatan untuk meningkatkan atau menjaga kesejahteraan mereka.
- *Effectiveness and efficiency* ; Proses-proses dan lembaga-lembaga menghasilkan sesuai dengan apa yang telah digariskan dengan menggunakan sumber-sumber yang tersedia sebaik mungkin.
- *Accountability* ; Para pembuat keputusan dalam pemerintahan, sektor swasta dan masyarakat (*civil society*) bertanggung jawab kepada publik dan lembaga-lembaga *stakeholders*. Akuntabilitas ini tergantung pada organisasi dan sifat keputusan yang dibuat, apakah keputusan tersebut untuk kepentingan internal atau eksternal organisasi.
- *Strategic vision* ; Para pemimpin dan publik harus mempunyai perspektif *good governance* dan pengembangan yang luas dan jauh kedepan sejalan dengan apa yang diperlukan untuk pembangunan semacam ini.

Nilai yang terkandung dari pengertian serta karakteristik *good governance* tersebut diatas merupakan nilai-nilai yang universal sifatnya dan sesuai dengan cita-cita perjuangan bangsa Indonesia sebagaimana tertuang dalam PROPENAS 2004-2009, karena itu diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan nyata sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna dan berhasil guna. Kondisi semacam ini perlu adanya akuntabilitas dan tersedianya akses yang sama pada informasi bagi masyarakat luas. Hal ini merupakan fondasi legitimasi dalam sistem demokrasi, mengingat prosedur dan metode pembuatan keputusan harus transparan agar supaya memungkinkan terjadinya partisipasi efektif. Kondisi semacam ini mensyaratkan bagi siapa saja yang terlibat dalam pembuatan keputusan, baik itu pemerintah, sektor swasta maupun masyarakat, harus bertanggung jawab kepada publik serta kepada institusi *stakeholders*. Disamping itu, institusi *governance* harus efisien dan efektif dalam melaksanakan fungsi-fungsinya, responsif terhadap kebutuhan masyarakat, memberikan fasilitas dan peluang ketimbang melakukan kontrol serta melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Selain hal di atas Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bima dihadapkan pada isu – isu strategis yang harus disikapi, isu strategis yang dimaksud antara lain :

- a. Secara Geografis Kota Bima memiliki berbagai potensi bencana yang beragam yang harus disikapi dengan berbagai program dan kegiatan yang focus pada penanggulangan baik pra bencana, tanggap darurat maupun pasca bencana, Bencana tersebut antara lain : Banjir, Tanah Longsor Angin putting beliung, Angin kencang, Kebakaran, Gempa Bumi, dan Bencana Sosial;
- b. Rendahnya tingkat pemahaman masyarakat terhadap penanggulangan bencana masih menitikan harapan besar hanya kepada pemerintah, padahal tanggung jawab penanggulangan bencana adalah merupakan tanggung jawab bersama antara Pemerintah, Masyarakat dan dunia usaha;
- c. Besarnya biaya untuk rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana mengharuskan semua pihak untuk sadar dan lebih bijaksana untuk mengedepankan upaya – upaya mitigasi dan kesiapsiagaan dalam rangka mengurangi risiko akibat bencana. Jika Anggaran program pengurangan risiko bencana diperbesar maka dapat menghemat hingga sampai 7 (Tujuh) kali lipat dibandingkan biaya Rehabilitasi dan Rekonstruksi pasca bencana.

## **E. STRUKTUR ORGANISASI**

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah yang paling muda di Kota Bima yang memiliki Tugas Pokok dan Fungsi Merumuskan dan menetapkan kebijakan penanggulangan Bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat, dan tepat, efektif dan efisien serta pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh.berdasarkan Perda No. 5 Tahun 2010 Tanggal 28 Juli tahun 2010 Tentang Organisasi dan tata kerja Lembaga lain sebagai bagian dari Perangkat Daerah, maka susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bima terdiri dari : (Skema Struktur Organisasi Terlampir):

### **1. UNSUR PENGARAH**

Unsur Pengarah terdiri dari:

- 1) Unsur pengarah sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 huruf b berada dibawah dan

- bertanggungjawab langsung kepada Kepala BPBD;
- 2) Unsur pengarah terdiri dari ketua dan anggota;
  - 3) Ketua unsur pengarah dijabat oleh Kepala BPBD;
  - 4) Unsur pengarah beranggotakan 9 (Sembilan) orang yang terdiri dari atas:
    - a. 5 (lima) orang pejabat pemerintah daerah, yaitu:
      1. Asisten Perekonomian dan Pembangunan;
      2. Kepala Dinas Sosial dan Tenaga Kerja;
      3. Kepala BAPPEDA;
      4. Kepala Dinas Pekerjaan Umum;
      5. Kepala Dinas Kesehatan.
    - b. 4 (empat) orang dari masyarakat professional di daerah.

## **2. UNSUR PELAKSANA**

Unsur Pelaksana terdiri dari :

1. Kepala Pelaksana
2. Sekretariat terdiri dari :
  - 2.1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
  - 2.2. Sub Bagian Keuangan
  - 2.3. Sub Bagian Program dan pelaporan
3. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan terdiri dari :
  - 3.1. Seksi Pencegahan
  - 3.2. Seksi Kesiapsiagaan
4. Bidang Kedaruratan dan Logistik terdiri dari :
  - 4.1. Seksi Tanggap Darurat
  - 4.2. Seksi logistik
5. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi terdiri dari :
  - 5.1. Seksi Rehabilitasi
  - 5.2. Seksi Rekonstruksi

## **F. SISTEMATIKA PENYUSUNAN**

Sistematika Penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bima Tahun 2015 adalah sebagai berikut :

1. BAB I – Pendahuluan, menjelaskan secara ringkas latar Belakang, Isu Strategis dan Struktur Organisasi.
2. BAB II – Perencanaan Kinerja, memuat ringkasan / ikhtisar perjanjian kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bima tahun 2015.
3. BAB III – Akuntabilitas Kinerja, menjelaskan Capaian Kinerja Organisasi dan Realisasi Anggaran.
4. BAB IV – Penutup, menjelaskan simpulan menyeluruh dari laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bima Tahun 2015 atas capaian organisasi serta langkah di masa mendatang untuk meningkatkan kinerjanya.

#### LAMPIRAN - LAMPIRAN

1. STURUKTUR ORGANISASI BPBD
2. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017
3. REALISASI KEUANGAN
4. REALISASI DANA TAK TERDUGA TAHUN 2017
5. DAFTAR SARANA DAN PRASARANA BPBD

## **BAB II**

### **PERENCANAAN KINERJA**

#### **A. RPJMD REVIEU 2013-2018**

## 1. Kebijakan Umum Daerah

Dalam mewujudkan capaian keberhasilan pembangunan, Pemerintah Daerah Kota Bima menetapkan rangkaian program sesuai dengan Urusan Wajib dan Urusan Pilihan yang dilaksanakan oleh SKPD di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Bima. Penetapan program pembangunan dan penanganan urusan pembangunan yang disesuaikan dengan misi pembangunan daerah adalah :

### **Misi 1:**

**Membentuk manusia yang BERIMAN melalui penguatan serta peningkatan nilai-nilai ajaran agama untuk membentuk karakter manusia yang religius sehingga dapat membendung dan membentengi dari nilai-nilai yang merusak moral dan aqidah serta tetap mengembangkan dan melestarikan nilai-nilai budaya lokal**

#### A. ARAH KEBIJAKAN

1. Meningkatkan kualitas pemahaman, penghayatan, dan pengamalan ajaran agama
2. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana keagamaan
3. Meningkatkan upaya pembinaan lembaga-lembaga keagamaan dan petugas keagamaan
4. Mendorong terwujudnya hubungan yang harmonis antar umat beragama, etnik dan kelompok sosial masyarakat.
5. Menggali dan mengembangkan seni, budaya daerah dan kearifan lokal.

#### B. PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

1. Program Pembinaan dan Peningkatan Pelayanan Keagamaan
2. Program pengembangan wawasan kebangsaan
3. Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat)
4. Program Pengembangan Nilai Budaya
5. Program Pengelolaan Kekayaan Budaya
6. Program Pengelolaan Keragaman Budaya

### **Misi 2:**

**Menciptakan manusia yang MAJU melalui peningkatan kualitas sumberdaya manusia sehingga mempunyai tingkat intelektualitas yang tinggi, memiliki daya saing, dan menguasai teknologi, didukung oleh tingkat kesehatan baik jasmani maupun rohani, mental-spiritual**

#### A. ARAH KEBIJAKAN

1. Bantuan pendidikan bagi siswa miskin
2. Peningkatan penuntasan wajib belajar

3. Pembinaan perpustakaan dan Peningkatan minat baca masyarakat
4. Peningkatan pengetahuan dan ketrampilan guru terhadap penggunaan TIK
5. Peningkatan sarana dan prasarana TIK
6. Peningkatan Angka Harapan Hidup
7. Peningkatan daya beli masyarakat
8. Meningkatkan pemerataan pendidikan
9. Peningkatan kesempatan kerja
10. Peningkatan kualitas tenaga kerja
11. Penguatan peran TKPKD
12. Pengurangan jumlah penduduk miskin
13. Peningkatan pelayanan kesehatan ibu dan anak
14. Peningkatan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan
15. Peningkatan dan pemerataan pelayanan kesehatan dasar bagi penduduk miskin
16. Peningkatan pelayanan gizi keluarga
17. Peningkatan penyehatan lingkungan

#### B. PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

1. Program wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun
2. Program Pendidikan Menengah
3. Program Manajemen Pendidikan
4. Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan
5. Program Peningkatan Kualitas dan Produktifitas Tenaga Kerja
6. Program Peningkatan Kesempatan Kerja
7. Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan
8. Program Peningkatan Kualitas dan Produktifitas Tenaga Kerja
9. Program Pendidikan Anak Usia Dini
10. Program Pendidikan Informal
11. Program Manajemen Pendidikan
12. Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) Dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (Pmks) Lainnya
13. Program Pelayanan Dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
14. Program Pembinaan Para penyandang Cacat dan Trauma
15. Program Peningkatan Kesempatan Kerja
16. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan/Kelurahan
17. Program pembangunan infrastruktur pedesaan
18. Program Upaya Kesehatan Masyarakat
19. Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana/prasarana puskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannya
20. Program obat dan perbekalan kesehatan
21. Program Perbaikan Gizi Masyarakat
22. Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan
23. Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan



### **Misi 3:**

**Mewujudkan masyarakat yang ADIL melalui pembangunan yang merata dimana masyarakat memiliki akses dan tingkat pelayanan pemerintahan yang prima**

#### **A. ARAH KEBIJAKAN**

1. Peningkatan pelayanan air bersih
2. Perlindungan sumber mata air
3. Pengembangan data base perumahan
4. Peningkatan penanganan rumah tidak layak huni
5. Pengembangan data base perumahan
6. Peningkatan penanganan rumah tidak layak huni
7. Peningkatan sarana dan prasarana pedesaan
8. Peningkatan prasarana jalan ekonomi
9. Peningkatan system perencanaan dan penganggaran daerah
10. Peningkatan pengawasan dan system pengendalian internal pemerintah
11. Peningkatan kualitas sumber daya aparatur sipil negara
12. Peningkatan penganggaran, penatausahaan dan pelaporan keuangan daerah
13. Peningkatan pendapatan daerah
14. Peningkatan dan percepatan implementasi roadmap reformasi birokrasi.
15. Peningkatan pelayanan perijinan

#### **B. PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH**

1. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah
2. Program penyediaan dan pengolahan air baku
3. Program Pengembangan perumahan
4. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan
5. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan/Kelurahan
6. Program Pembangunan Jalan dan Jembatan
7. Program Pembangunan Sarana Ekonomi Pedesaan
8. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
9. Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah
10. Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan
11. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH
12. Progra, Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
13. Program Peningkatan Pengelolaan Aset/Barang Milik Daerah
14. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

## 15. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Perijinan

### Misi 4:

**Menjadikan masyarakat SEJAHTERA berbasiskan pembangunan ekonomi lokal dengan penyediaan infrastruktur yang memadai dan diikuti perluasan akses ekonomi dalam upaya penguatan struktur ekonomi lokal yang berdaya saing dengan dukungan stabilitas sosial politik dan keamanan**

#### A. ARAH KEBIJAKAN

1. Peningkatan pembangunan pertanian kehutanan perikanan
2. Peningkatan produktifitas sektor perdagangan besar dan eceran
3. Peningkatan pembangunan sektor Perhubungan dan Pergudangan
4. Peningkatan kualitas pelaku usaha ekonomi produktif
5. Perluasan kesempatan kerja dan berusaha
6. Peningkatan pendapatan perkapita
7. Peningkatan penggunaan teknologi produksi
8. Peningkatan pelaksanaan pelatihan ketrampilan
9. Peningkatkan produktifitas pertanian
10. Peningkatan produktifitas perikanan
11. Peningkatan ketahanan pangan
12. Peningkatkan produktifitas pertanian
13. Peningkatan produktifitas perikanan
14. Peningkatan ketahanan pangan
15. Peningkatan kemantapan jalan dan jembatan
16. Peningkatan kualitas sanitasi lingkungan
17. Peningkatan jaringan irigasi
18. Peningkatan sarana dan prasarana perhubungan
19. Peningkatan utilitas perkotaan
20. Penataan kawasan perkotaan
21. Peningkatan peran serta masyarakat dalam pemeliharaan keamanan dan ketertiban
22. Peningkatan koordinasi penyelesaian tindak kriminalitas
23. Peningkatan kerjasama dan koordinasi Pemerintah daerah dengan aparat keamanan
24. Peningkatan pemahaman masyarakat dan anak sekolah tentang bahaya narkoba
25. Peningkatan kerjasama dan koordinasi dengan BNN Daerah dalam pemberantasan peredaran narkoba

#### A. PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

1. Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan
2. Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya
3. Program Peningkatan Ketahanan Pangan
4. Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian Perkebunan Lapangan

5. Program Pembangunan Jalan dan Jembatan
6. Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan
7. Program Pengembangan Perumahan
8. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan
9. Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya
10. Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan
11. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana perhubungan
12. Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan
13. Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh
14. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pertamanan
15. Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal
16. Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (PEKAT)

## 2. Prioritas Pembangunan Daerah

Prioritas pembangunan daerah Kota Bima tahun 2003-2018 yang berkaitan dengan urusan yang ditangani BPBD adalah pada urusan **Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian** adalah sebagai berikut :

- a. Kesejahteraan Sosial;
- b. Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik;
- c. Pembangunan Agama
- d. Infrastruktur dan konektifitas wilayah;
- e. Pembangunan ekonomi
- f. Ketahanan Pangan;
- g. Pembangunan Perumahan dan Permukiman;
- h. Pembangunan Kesehatan
- i. Pembangunan Pendidikan;
- j. Penanggulangan Kemiskinan;
- k. Lingkungan Hidup;
- l. Penanggulangan Bencana;
- m. Ketertiban dan Keamanan.

## **B. RENCANA STRATEGIS TAHUN 2014-2018**

Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah rencana strategis merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh instansi pemerintah agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategic local, nasional dan global.

Rencana strategis adalah dokumen perencanaan tentang program dan kegiatan yang akan dilaksanakan mulai tahun 2014 sampai dengan tahun 2018, dengan demikian tahun 2017 ini merupakan tahun ke IV dari pelaksanaan Rencana strategis Badan Penanggulangan Bencana Kota Bima.

### **1. Visi**

Visi dan Misi merupakan penjabaran dari Visi KOTA BIMA Tahun 2005 – 2025 dan Visi Walikota Tahun 2013 – 2018. Telah diterjemahkan dalam RPJMD Periode ke dua yaitu RPJMD Tahun 2013 – 2018 adalah " "Terwujudnya Kota Bima Sebagai Kota Perdagangan Dan Jasa Yang Beriman, Maju, Adil Dan Sejahtera". Dengan memperhatikan Visi tersebut, tersusunlah Visi dan Misi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Bima Tahun 2014 – 2018 sebagai berikut :

***"TERWUJUDNYA KOTA BIMA YANG TANGGUH DAN MANDIRI MELALUI PENANGANAN BENCANA YANG TANGGAP, CEPAT DAN TEPAT".***

## **2. Misi**

Sejalan dengan Visi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bima maka Misi yang dilaksanakan adalah :

1. Meningkatkan Kapasitas SDM Aparatur dalam penanganan bencana secara cepat dan tepat
2. Meningkatkan Koordinasi dalam Penanganan Bencana dengan Instansi terkait.
3. Meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana melalui peningkatan peran serta stakeholders penanggulangan bencana dalam Pengurangan Resiko bencana;
4. Terwujudnya penanggulangan kedaruratan bencana secara cepat, tepat dan efektif ,terkoordinir dan /terpadu;
5. Terwujudnya pemulihan sarana dan prasarana fisik dan non fisik di wilayah pasca bencana secara terpadu dan menyeluruh.

## **3. Tujuan**

Adapun tujuan dari pada Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bima ini adalah:

1. Meningkatkan ketangguhan Kota terhadap bencana
2. Meningkatnya Kapasitas Aparatur dan Tim Penanggulangan Bencana
3. Terwujudnya penanggulangan bencana yang terencana, terpadu dan menyeluruh
4. Terwujudnya penyelenggaraan penanggulangan kedaruratan bencana secara cepat dan tepat
5. Terwujudnya pemulihan Sarana dan Prasarana Fisik dan Non Fisik Pasca Bencana

Di dalam mewujudkan Visi dan Misi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bima ditempuh melalui strategi utama yaitu : Terwujudnya Ketangguhan Kota dalam penanggulangan bencana

#### 4. Kebijakan

Kebijakan yang dilembagakan meliputi :

1. Kebijakan pengembangan sumber daya aparatur dan tim Penanggulangan bencana melalui peningkatan pelatihan, Gladi/simulasi dan kompensasi
2. Mendorong terwujudnya koordinasi yang efektif dengan semua stakeholder dalam perencanaan, kesiapsiagaan, kedaruratan dan rehabilitasi pasca bencana.
3. Meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana serta peningkatan peran serta masyarakat, dan dunia usaha melalui program – program Pengurangan Resiko bencana dan Kelurahan tangguh bencana
4. Mendorong tersedianya data dan dokumen – dokumen kebencanaan sebagai upaya kesiapsiagaan dalam mendukung terselenggaranya penyelenggaraan penanggulangan bencana
5. Mendorong terwujudnya penyelenggaraan penanggulangan kedaruratan bencana secara cepat, tepat dan efektif ,terkoordinir dan /terpadu;
6. Melakukan upaya – upaya pemulihan sarana dan prasarana baik fisik maupun non fisik di wilayah pasca bencana secara terpadu dan menyeluruh.

### C. PENETAPAN KINERJA TAHUN 2017

Perencanaan Kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis, yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Penyusunan Rencana Kinerja dilaksanakan seiring dengan agenda penyusunan dari kebijakan anggaran serta merupakan komitmen bagi instansi untuk mencapainya dalam tahun tertentu yang tertuang dalam perjanjian kinerja/penetapan kinerja tahun 2017

Dokumen Rencana Kinerja memuat informasi tentang sasaran yang ingin dicapai dalam tahun yang bersangkutan, Indikator Kinerja Sasaran, dan Rencana Capaiannya; Program, Kegiatan, serta Kelompok Indikator Kinerja dan Rencana Capaiannya. Indikator Kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian sasaran yang telah ditetapkan. Penetapan Indikator Kinerja harus didasarkan pada perkiraan yang realistis dengan memperhatikan tujuan dan sasaran yang ditetapkan serta data pendukung yang harus di organisasi.

Untuk merealisasikan sejumlah kegiatan tersebut tentu diperlukan sumber dana sebagai salah satu prasyarat keberhasilan suatu rencana. Dana tersebut juga merupakan salah satu unsur *input* yang harus dipenuhi dan mempunyai tolok ukur tersendiri. Dengan demikian mudah dipahami bahwa dalam menyusun Rencana Strategik dan Rencana Kinerja Tahunan, tidaklah terlepas dari sistem penganggaran pada organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bima.

Pada prinsipnya Penetapan Kinerja Tahunan Tahun 2017 ini akan menguraikan target kinerja yang hendak dicapai oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bima selama Tahun 2017. Target kinerja menggambarkan nilai kuantitatif yang harus dicapai dari semua indikator kinerja yang melekat pada setiap kegiatan maupun di tingkat sasaran. Target kinerja pada tingkat sasaran akan dijadikan tolok ukur keberhasilan organisasi dalam upaya mencapai misi dan visinya. Sedangkan target kinerja dalam tingkat kegiatan digunakan untuk mengukur efisiensi dan efektivitas suatu kegiatan. Perjanjian Kinerja / Penetapan kinerja BPBD Kota Bima Tahun 2017 adalah diuraikan dalam ikhtisar berikut :

**Misi I : Meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana melalui peningkatan peran serta stakeholders penanggulangan bencana dalam Pengurangan Risiko bencana;**

**Tujuan : Meningkatkan ketangghuan kota terhadap bencana**

Sasaran	Indikator	Target
1	2	3
Meningkatnya peran aktif masyarakat dalam pengurangan risiko bencana	Porsentase Kelurahan Tangguh Bencana	66 %

**Misi II : Meningkatkan Kapasitas SDM Aparatur dalam penanganan bencana secara cepat dan tepat**

**Tujuan : Meningkatkan kapasitas Aparatur dan tim Penanggulangan Bencana**

Sasaran	Indikator	Target
1	2	3
Meningkatnya kapasitas aparatur dan tim penanggulangan bencana	Jumlah SDM yang Terlatih	180 Orang

**Misi III : Meningkatkan Koordinasi dalam Penanganan Bencana dengan Instansi terkait.**

**Tujuan : Terwujudnya Penanggulangan bencana yang terencana, terpadu dan menyeluruh**

Sasaran	Indikator	Target
1	2	3
Tersedianya pedoman dalam penanggulangan bencana yang terencana, terpadu dan menyeluruh	Jumlah dokumen penanggulangan bencana yang tersedia menjadi pedoman PB	1 Dok

**Misi IV : Terwujudnya penanggulangan kedaruratan bencana secara cepat, tepat dan efektif ,terkoordinir dan /terpadu;**

**Tujuan : Terwujudnya penyelenggaraan Penanggulangan kedaruratan bencana secara tepat dan tepat**



Sasaran	Indikator	Target
1	2	3
Meningkatnya efektifitas Penyelenggaraan penanggulangan kedaruratan bencana secara cepat dan tepat	Porsentase penanganan kedaruratan bencana	100 %
	Porsentase ketersediaan Sarana dan prasarana penunjang saat bencana	80 %

**Misi V : Terwujudnya pemulihan sarana dan prasarana fisik dan non fisik di wilayah pasca bencana secara terpadu dan menyeluruh.**

**Tujuan : Terwujudnya pemulihan sarana dan prasarana fisik dan non fisik pasca bencana**

Sasaran	Indikator	Target
1	2	3
Terwujudnya pemulihan sarana dan prasarana fisik dan non fisik pasca bencana	Porsentase rehabilitasi dan rekonstruksi sarana prasarana fisik dan non fisik pasca bencana	80 %

Secara lengkap Perjanjian kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bima Tahun 2017 dapat dilihat pada tabel 1 lampiran lakip ini.

## BAB III

### AKUNTABILITAS KINERJA

#### A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) merupakan wujud nyata Instansi Pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan/kegagalan kepada pemberi mandat atas pelaksanaan kegiatan dan program dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran dalam suatu media pelaporan (LAKIP). Penyusunan LAKIP Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bima Tahun 2017 ini didasarkan kepada keluaran dan evaluasi pelaksanaan Rencana Strategis dan Rencana Kinerja Tahun 2017 yang telah ditetapkan sebelumnya setelah berakhirnya pelaksanaan kegiatan pada Tahun Anggaran 2017.

Capaian kinerja organisasi adalah hasil pengukuran dari setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi yang dianalisa dan membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini, membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir, serta membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target Renstra BPBD Kota Bima. Disamping itu juga di analisis penyebab keberhasilan dan kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusinya, analisis efisiensi penggunaan sumber daya serta program dan kegiatan yang menunjang keberhasilan dan kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Sesuai dengan perjanjian Kinerja Pemerintah Kota Bima Tahun 2017, Sasaran Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bima tahun 2017 adalah : Terwujudnya Ketangguhan Kota dalam Penanggulang Bencana.

Untuk mencapai ketangguhan Kota dalam hal penanggulangan bencana terdapat 5 (Lima) indikator utama yang perlu direalisasikan sesuai dengan indikator kinerja Utama yang tertuang dalam IKU pada penetapan kinerja organisasi yang telah ditetapkan pada awal tahun 2017. Pencapaian sasaran strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bima adalah dapat diuraikan secara detail pada analisa pencapaian masing – masing sasaran berikut :

#### 1. Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 1 (S1): Persentase Kelurahan Tangguh Bencana

Secara Geografis Wilayah Kota Bima memiliki potensi bencana yang cukup banyak antara lain, Gempa Bumi, Angin puting beliung, Banjir, tanah longsor, Kebakaran, kekeringan, abrasi pantai dan bencana sosial. Wilayah Kota Bima yang dilewati oleh 7 sungai besar menyebabkan terjadinya luapan banjir yang setiap tahun terjadi, hal ini diperburuk lagi dengan adanya sistem drainase yang kurang bagus termasuk juga terjadinya alih fungsi daerah resapan menjadikan

hampir seluruh kelurahan di wilayah kota Bima mendapat ancaman banjir terutama daerah hilir seperti Kelurahan Paruga, Sarae, Tanjung, Nae, Penaraga, Penatoi, jatiwangi dll.

Ketangguhan dapat diartikan sebagai kesiapan masyarakat untuk menghadapi segala risiko yang terjadi akibat bencana, sehingga dapat memiliki daya lenting untuk kembali bangkit dan mendapat akses baik akses ekonomi, sosial, fisik maupun lingkungan sehingga Upaya membangun ketangguhan masyarakat harus dilakukan secara komprehensif dan menyeluruh dengan melibatkan berbagai pihak baik pemerintah, swasta dan masyarakat,

Menyadari hal tersebut diatas Pemerintah Kota Bima menetapkan Target Kinerja kelurahan tangguh sampai dengan tahun 2018 sebanyak 38 Kelurahan untuk membentuk Kelurahan tangguh tingkat pratama.

Sampai dengan tahun 2017, Sasaran Strategis 1 (S1) Persentase kelurahan tangguh bencana yang dibentuk sebesar 68,4 % dari 38 kelurahan yang akan dibentuk, dimana pada tahun 2016 persentase terbentuk kelurahan tangguh sebesar 53 % atau 20 Kelurahan dari 38 kelurahan yang akan dituntaskan sampai tahun 2018, pada tahun ini kelurahan yang dibentuk sebanyak 6 Kelurahan yaitu 5 kelurahan dari Dana APBD II dan 1 Kelurahan dari Dana APBD I Provinsi. sedangkan kelurahan bentukan dari dana APBN/BNPB tahun ini sebanyak 0 (tidak ada), akan tetapi tahun 2017 ini BPBD mendapat alokasi untuk mengembangkan Kelurahan tangguh tingkat madya di 2 Kelurahan yaitu Kelurahan Sarae dan kelurahan Paruga. sampai dengan tahun 2017 ini Kelurahan tangguh yang dibentuk sebanyak 26 Kelurahan. Tabel ketercapaian Sasaran Strategis 1 dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel. Realisasi Target Kinerja Sasaran Strategis 1 (S1) : Persentase Kelurahan tangguh bencana**

No	Indikator Sasaran	Program/Kegiatan	Target kinerja Keg	Realisasi	Target Kinerja Sasaran	Realisasi				Total	%
						2017	APBD II	APBD I	BNPB		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Persentase Kelurahan Tangguh bencana	1	Program Kesiapsiagaan		66	53	65,8%	2,8	0	68,4	103,64
		1	Pembentukan Kelurahan Tangguh	25 Kel	26 Kel	%	%	Kel	Kel	Kel	

Dari tabel di atas dapat dijelaskan bahwa realisasi kinerja pada target kinerja sasaran Strategis 1 (S1) adalah sebesar 103,64 %, pencapaian sasaran strategis ini diperoleh melalui kegiatan Pembentukan Kelurahan tangguh pada program kesiapsiagaan. 5 Kelurahan dapat direalisasikan melalui anggaran APBD II pada DPA BPBD Kota Bima, melalui APBD I sebanyak 1 Kelurahan dan Bantuan BNPB Pusat tidak ada. Realisasi kelurahan tangguh yang di bentuk tahun 2017 sebanyak 6 Kelurahan sehingga total jumlah kelurahan tangguh bencana yang terbentuk sampai dengan tahun 2017 adalah sebanyak 26 Kelurahan sehingga melebihi target

pada tahun 2017 sebanyak 25 Kelurahan karena adanya bantuan pendanaan dari APBD I provinsi NTB.

Tabel. Perbandingan Jumlah Kelurahan Tangguh Tahun 2014 dan 2015

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	CAPAIAN (%)			Target Sasaran				Ketercapaian (%)				
			2014	2015	2016	2017	2014	2015	2016	2017	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=4/8*100	13=5/9*100	14=6/10*100	15=6/9*100
	Meningkatnya peran aktif masyarakat dalam pengurangan risiko bencana	Persentase Kelurahan tangguh bencana	15,79	39,47	52,63	65,8	15,79	39,47	52,63		100	100	100	

Dari tabel di atas dapat di jelaskan sasaran strategis 1 (S1) mulai tahun 2014, hingga tahun 2016 dapat terealisasi sebesar 100 % sedangkan tahun 2017 ini dapat terealisasi sebesar 103,64 % atau secara kumulatif Kelurahan tangguh terbentuk sebanyak 26 Kelurahan. Realisasi sasaran strategis sampai dengan tahun 2016 dapat terlihat pada tabel berikut :

Tabel. Capaian Renstra pada Sasaran Strategis 1 (S1)

Sasaran Strategis 1 (S1)	Target/ tahun					Total Kelurahan	Realisasi (%)						Total Capaian sd thn 2016	%
	2014	2015	2016	2017	2018		2015	%	2016	%	2017	%		
Jumlah Kelurahan tangguh Bencana	6	15	20	25	38	38	39,47	100	52,63	100	68,4	103,64	26	68,4

Tabel diatas dapat dijelaskan bahwa target sasaran sampai dengan tahun 2018 adalah sebanyak 38 Kelurahan. Maka jika dibandingkan dengan target renstra sampai dengan tahun 2018 sebanyak 38 Kelurahan maka total reaisasi Sasaran strategi (S1) sampai tahun 2017 adalah 68,4% dari target sebesar 100 %.sampai dengan tahun 2018.

Dalam proses pembentukan Kelurahan Tangguh di masyarakat, rangkaian kegiatan yang dilakukan adalah :

- 1, Melakukan PCVA (Partisipatory kapasitas and vulnerability Apraisal) untuk mendapatkan informasi awal tentang kapasitas, kerentanan yang ada di kelurahan
  3. Mengkaji Lebih mendalam tentang Kapasitas dan kerentanan terhadap ancaman yang ada di kelurahan
  4. Bersama masyarakat menyusun SOP dan Rencana Aksi masyarakat
  5. Membentuk Relawan penanggulangan bencana
- Output yang dihasilkan dalam kegiatan tersebut adalah terdiri dari :
- a. Tersusunnya Dokumen Analisa Risiko bencana
  - b. Tersusunnya Dokumen Rencana Aksi Masyarakat
  - c. Penetapan Jalur Evakuasi di Kelurahan/SOP Peringatan Dini Bencana
  - d. Adanya SK Relawan Kelurahan (TSBK)

Tujuannya adalah masyarakat dapat mengenali potensi ancaman yang ada di masyarakat, menganalisa kerentanan yang dimiliki dan kapasitas sebagai sumber daya yang mendukung daya lenting kembali jika terjadi bencana. Sehingga masyarakat secara mandiri melakukan upaya awal untuk penyelamatan diri dan keluarga sebelum pihak lain datang membantu. Kelurahan tangguh yang dibentuk pada tingkat pratama pada tahun 2017 adalah sebanyak 6 Kelurahan 5 Kelurahan dibentuk melalui APBD II dan 1 Kelurahan dibentuk melalui APBD I. sementara Kelurahan tangguh pada tingkat pengembangan yaitu pada tingkat Madia atau utau tingkat utama sebanyak 2 kelurahan yang dibentuk melalui Dana APBN melalui Kegiatan Pengembangan Desa Tangguh pada Kedeputian Pencegahan dan Kesiapsiagaan Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Berikut disajikan Daftar Kelurahan tangguh yang dibentuk sampai dengan tahun 2017

Tabel. Daftar Kelurahan tangguh yang dibentuk sampai dengan tahun 2017

No	Nama Kelurahan/ tahun pembentukan	Tingkat ketangguhan	Sumber Dana Pembentukan	Ket
I	<b>2014</b>			
1	Kel Jatiwangi	Pratama	Donor/OXFAM	Jumlah Kelurahan tangguh yang dibentuk sampai tahun 2017 pada tingkat pratama sebanyak 26 Kelurahan, 6 Kel bersumber dari Donor/OXFAM, 15 Kel bersumber dari APBD II/Kota Bima dan 3 Kel dari Dana APBD I/Provinsi dan 2 Kelurahan dari Dana APBN/BNPB, sedangkan pembentukan Kelurahan pada tingkat pengembangan pada tingkat Madya adalah 2 Kelurahan yang bersumber dari Dana APBN/BNPB
2	Kel Kendo	Pratama	Donor/OXFAM	
3	Kel Kolo	Pratama	Donor/OXFAM	
4	Kel Ntobo	Pratama	Donor/OXFAM	
5	Kel Nungga	Pratama	Donor/OXFAM	
6	Kel Tanjung	Pratama	Donor/OXFAM	
II	<b>2015</b>			
1	Kel Lampe	Pratama	APBD II/Kota	
2	Kel Melayu	Pratama	APBD II/Kota	
3	Kel NaE	Pratama	APBD II/Kota	
4	Kel PenanaE	Pratama	APBD II/Kota	
5	Kel Jatibaru	Pratama	APBD II/Kota	
6	Dodu	Pratama	APBD I/Provinsi	
7	Manggemaci	Pratama	APBD I/Provinsi	
8	SaraE	Pratama	APBN/BNPB	
9	Paruga	Pratama	APBN/BNPB	
III	<b>2016</b>			
1	Kel Lewirato	Pratama	APBD II/Kota	
2	Kel Penatoi	Pratama	APBD II/Kota	

3	Kel Pane	Pratama	APBD II/Kota	
4	Kel Penaraga	Pratama	APBD II/Kota	
5	Kel Dara	Pratama	APBD II/Kota	
IV	<b>2017</b>			
1	Kel Lelamase	Pratama	APBD II/Kota	
2	Kel Santi	Pratama	APBD II/Kota	
3	Kel Mande	Pratama	APBD II/Kota	
4	Kel Sadia	Pratama	APBD II/Kota	
5	Kel Monggonao	Pratama	APBD II/Kota	
6	Kel Matakando	Pratama	APBD I/Provinsi	
7	Kel SaraE	Madya	APBN/BNPB	
8	Kel Paruga	Madya	APBN/BNPB	

Selama tahun 2017, dalam pelaksanaan pembentukan Kelurahan tangguh bencana terdapat Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya yaitu, terbatasnya SDM di BPBD terutama tenaga fasilitator pembentukan kelurahan tangguh, namun antisipasi yang dilakukan adalah menggandeng Forum PRB Mbojo Matenggo untuk menjadi tenaga fasilitator untuk menambah fasilitator yang tersedia di BPBD. selain itu, bagi Kelurahan tangguh yang telah terbentuk sebelumnya menjadi sedikit fakum dalam melaksanakan program kerjanya oleh Relawan/ TSBK karena selain kurangnya pembinaan yang kontinyu dari BPBD juga terdapat beberapa kelurahan yang fakum karena adanya beberapa relawan yang kurang konsisten terhadap tugas kerelawanannya sehingga dapat mengganggu semangat bagi rekannya yang lain.

Selama tahun 2017 BPBD bekerja sama dengan OXFAM melakukan pendampingan bagi TSBK untuk dapat mengembangkan usaha ekonomi makro sebagai salah satu upaya mengurangi dampak perubahan iklim. seperti adanya Kelompok Bank sampah SaraE, Kelompok Ekonomi Makro lainnya seperti Penanaman Pohon buah dan tanaman keras melalui kegiatan HKM dan Penghijauan di kelurahan Nungga dan Lelamase Kerja sama dengan Forum PRB, BPBD dan OXFAM. Dengan demikian BPBD sebagai leading sector penanggulangan bencana agar dapat melakukan koordinasi dengan SKPD lain agar dapat mengkoordinasikan kegiatan TSBK dengan SKPD lain seperti Dinas Koperindag, Dinas Lingkungan Hidup dll, sehingga Forum PRB dan TSBK akan terus eksis dalam melakukan gerakan - gerakan kemanusiaan di Bidang penanggulangan bencana baik pra bencana, saat bencana maupun pasca bencana.

Kegiatan pembentukan kelurahan tangguh dapat terlaksana karena adanya dukungan yang cukup besar dari berbagai pihak, seperti Forum PRB Mbojo Ma Tenggo Kota Bima, Pemerintahan Kelurahan dan masyarakat sebagai yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam pembentukannya, Dukungan BNPB dan BPBD Provinsi NTB juga memberikan kontribusi untuk mempercepat tercapainya target RPJMD untuk menuntaskan Kelurahan tangguh pratama sampai dengan tahun 2018 sebesar 100 % atau sebanyak 38 kelurahan.

Pembentukan Kelurahan tangguh ini juga memberi kontribusi terhadap peningkatan kapasitas daerah dalam penanggulangan bencana baik kapasitas pemerintah maupun Kapasitas masyarakat. Berdasarkan hasil penilaian Kapasitas Daerah yang dilakukan bersama dengan BNPB dengan menggunakan metode scor card bahwa Kota Bima mendapat peningkatan nilai

yang signifikan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2016 Kota Bima mendapat nilai 3 dalam penilaian pada 5 level penilaian ketangguhan Kota. sementara tahun 2017 mendapat nilai 4 dalam 5 level penilaian atau berada pada **Tingkat kapasitas tinggi** dengan indeks kapasitas 0,85. Jika dibandingkan dengan Kabupaten tetangga Kab Bima hanya berada pada level 2 untuk kapasitas daerahnya atau masih kategori rendah.

Ketangguhan masyarakat di tingkat kelurahan menjadi salah satu indikator penting memberikan kontribusi terhadap terbentuknya ketangguhan Kota dalam penanggulangan bencana. Dukungan Pemerintah pusat melalui Program dan kegiatan BNPB cukup memberi kontribusi menambah ketangguhan Kota Bima, seperti adanya kegiatan Mitigasi Partisipatif untuk pembangunan rumah aman bencana dari Kedeputusan Pencegahan dan Kesiapsiagaan BNPB.

Pada bulan Desember tahun 2016, Ketangguhan Kota Bima diuji dengan terjadinya Banjir bandang yang sangat besar sepanjang sejarah, kejadian bencana banjir bandang pada tanggal 21 dan 23 desember yang melanda sebagian besar wilayah Kota Bima menyebabkan 105.621 Orang terdampak dan kerugian aset fisik sarana prasarana infrastruktur 2, 1 Triliun rusak, namun dengan adanya ketangguhan Kota yang telah terbentuk maka bencana besar tersebut tidak terdapat korban jiwa, dan hanya dalam jangka waktu yang kurang dari 2 bulan masyarakat dapat segera pulih dari keterpurukan. Pada awal tahun 2017 yang lalu masyarakat bisa kembali beraktivitas normal seperti biasa bahkan fasilitas umum yang rusak seperti Drainase, Jalan, Sungai telah diperbaiki hingga mencapai 90 % melalui program - program pemulihan darurat dari BNPB maupun program Nasional melalui Program KOTAKU yang telah dikoordinasikan oleh BPBD maupun oleh lintas sektor lainnya.

Untuk mendukung ketangguhan Kota ini juga OXFAM melalui Mitra Lokalnya LP2DER melakukan program - program peningkatan kapasitas pemerintah dan masyarakat melalui pelatihan, workshop serta studibanding pada Negara - Negara yang sudah maju dalam hal penanggulangan bencana

Untuk mendukung program Kota Tangguh yang dicanangkan BPBD Kota Bima, tentunya banyak upaya yang dilakukan baik pra bencana, saat bencana /tanggap darurat maupun pasca bencana, sehingga selain Program Kelurahan Tangguh, Program dan kegiatan yang mendukung ketercapaiannya dalam melakukan pelayanan bantuan kepada masyarakat korban bencana adalah melakukan upaya tanggap darurat. Upaya tersebut berupa pemberian bantuan uang tunai, logistik maupun bantuan perbaikan darurat terhadap sarana fisik maupun non fisik sesuai jenis kerusakan atau kerugian yang diderita korban bencana. Kegiatan yang mendukung program ini adalah Kegiatan Pemenuhan sandang pangan, Pemenuhan Air bersih dan sanitasi yang tersedia dalam DPA BPBD Kota Bima dan Anggaran Dana tak terduga yang ada pada DPKAD. serta bantuan darurat melalui dana siap pakai dari BNPB. Program lain yang mendukung program Kota tangguh bencana juga adalah program Penyuluhan penanggulangan bencana berupa kegiatan diklat kepada masyarakat, diklat kepada SKPD terkait dan diklat kepada Tim Penanggulangan bencana dan Peningkatan kapasitas kelembagaan. Program kesiapsiagaan

kegiatan Gladi mekanisme tanggap darurat bencana yang dilakukan 2 kali dalam 1 tahun untuk menguji kesiapan relawan dan tim penanggulangan bencana lainnya dalam menghadapi bencana.

## 2. Sasaran Strategis 2(S2): Meningkatnya Kapasitas Aparatur dan Tim Penanggulangan Bencana.

### 2.1. Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 2(S2): Jumlah Sumber Daya Manusia terlatih

Sumber daya manusia yang trampil merupakan salah satu unsur manajemen organisasi yang paling penting dalam menggerakkan sebuah roda organisasi, jika Sumber daya manusia tidak trampil dalam menjalankan tugas maka penggunaan sumber daya organisasi lainnya seperti Dana Organisasi tidak dapat dipergunakan secara efektif dan efisien.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bima sangat menyadari hal tersebut maka pada strategis 2 (S2) menargetkan 180 Orang yang terlatih dalam hal penanggulangan bencana. Untuk mencapai target (S2) ini, upaya yang dilakukan adalah memberikan Diklat dan penyuluhan baik kepada aparatur Pemerintah maupun kepada Tim Penanggulangan Bencana Lainnya melalui Program penyuluhan dan penanggulangan bencana, dan Program Kesiapsiagaan Program penyuluhan dan penanggulangan bencana ini meliputi Kegiatan :

1. Diklat dan Penyuluhan kepada SKPD terkait,
2. Diklat Kepada Anggota Masyarakat (Tatap muka, brosur, leaflet)
3. Diklat dan Penyuluhan kepada Tim Penanggulangan Bencana (TRC, TAGANA, TIM SAR, dll)
4. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penanggulangan Bencana dan Program Kesiapsiagaan melalui Kegiatan :
5. Gladi tentang mekanisme tanggap darurat bencana

Kegiatan – kegiatan tersebut di atas tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran tahun 2017. Pencapaian sasaran Strategi 2 ini direalisasikan melalui 5 (Empat) kegiatan tersebut diatas Dari Target kinerja sebesar 180 Orang terlatih, dapat terealisasi sebanyak 692 orang atau sebesar 384,44 %. Realiasi kinerja S2 secara lengkap dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel :REALISASI KINERJA STRATEGIS 2 (S2)

No.	Indikator Sasaran	Program/Kegiatan	Target kinerja Keg	Realisasi	Target Kinerja Sasaran	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Jumlah SDM Terlatih	1 <b>Program penyuluhan dan penanggulangan bencana ini meliputi Penanggulangan Bencana</b>			180	335	186,11
		1 Diklat dan Penyuluhan kepada SKPD terkait	40	40			



	2	Diklat dan Penyuluhan kepada anggota Masyarakat	20	20		
	3	Diklat dan penyuluhan kepada Tim Penanggulangan Bencana (TRC,TAGANA,TIM SAR, TIM PEMADAM KEBAKARAN)	120	120		
	4	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan	125	125		
	<b>2</b>	<b>Program Kesiapsiagaan</b>				
	5	Gladi tentang mekanisme tanggap darurat bencana	30	30		

Dari tabel di atas dapat dijelaskan bahwa Program penyuluhan dan penanggulangan bencana serta Program kesiapsiagaan masing – masing dapat menyelesaikan target sebesar 100 %, pada kegiatan Diklat dan penyuluhan kepada SKPD terkait dapat terealisasi sebanyak 40 Orang dari target 40 orang untuk melatih SKPD terkait untuk perhitungan Kerugian dan Kerusakan pasca bencana dan kemudian ditindak lanjuti menjadi Tim Penyusun Dokumen JITU Pasma jika terjadi bencana. Kegiatan Diklat penyuluhan kepada masyarakat outputnya adalah 20 orang tenaga kependidikan untuk menjadi motifator dalam melaksanakan Sekolah aman bencana. Diklat dan penyuluhan kepada Tim PB dapat melatih Tim Relawan sebanyak 120 Orang untuk mendukung kegiatan Kota tangguh. dan Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan ini menyangkut peningkatan Kapasitas bagi Anggota Forum PRB Mbojo Ma Tenggo Kota Bima, TSBK dan Federasi TSBK dan Tim Teknis SKPD dan Tim Koordinasi SKPD, sehingga total Tim yang dikapasitasi sebanyak 125 Orang. disehingga total SDM yang dapat terlatih adalah sebanyak 335 Orang atau sebesar 186,11% melampaui target kinerja sasaran pada target kinerja S2 ini.

Jika dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya, capaian dari tahun ke tahun memiliki peningkatan yang cukup signifikan, akan tetapi pada tahun 2017 memiliki penurunan jika dibandingkan dari capaian tahun 2016. namun masih lebih banyak dari target sasaran tahun 2017 data perbandingan jumlah SDM terlatih tahun 2014 sd tahun 2017 tersaji secara lengkap pada tabel berikut.

Tabel. Perbandingan jumlah SDM terlatih Tahun 2014 sd Tahun 2017

N O	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian							Target Sasaran (%)				Capaian (%)			
			2014	2015	2016	2017	2014	2015	2016	2017	2014	2015	2016	2017			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	$12=4/8*100$	$13=5/9*100$	$14=6/10*100$	$15=7/11*100$			
	Tersedianya SDM Terlatih dan	Jumlah SDM yang terlatih dan	197	204	692	335	150	180	180	180	131.33	113.33	384,44	186,11			

	Profesional	profesional												
--	-------------	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

## 2.2. Hambatan dalam pelaksanaan

Pencapaian pada sasaran strategis 2 (S2) ini sangat tergantung pada ketersediaan dukungan dana baik APBD maupun dari luar. dan juga ketersediaan SDMnya., Keberadaan tenaga terampil bersertifikat keahlian sangat terbatas, sehingga menjadi kendala juga dalam melakukan upaya upaya kedaruratan bencana. sehingga hal ini menjadi Salah satu rekomendasi dalam penilaian kapasitas daerah, sehingga untuk mendukung ketercapaian ini ke depan perlu adanya diklat - diklat bersertifikat keahlian untuk mendukung terlaksananya upaya - upaya dalam penanggulangan bencana. seperti bidang Penataan Gudang dan Logistik, Bidang Data dan Pusdalops, dan sebagainya.

Selama tahun 2017 ini kerjasama dengan OXFAM lebih banyak pada peningkatan SDM untuk antisipasi perubahan iklim, sehingga SDM yang dikapasitasi melalui kerjasama OXFAM dalam rangka mengembangkan usaha mikro bagi Relawan agar dapat mengurangi kerentanan terhadap perubahan iklim.

## 3. Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 3 (S3): Jumlah dokumen penanggulangan bencana tersedia.

Dokumen Penanggulangan Bencana sangat diperlukan untuk mendukung pelaksanaan penanggulangan bencana, dokumen tersebut berupa Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana, SOP (Standar Operasional Prosedur) Penanggulangan Bencana, Dokumen Rencana Kontigensi, Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dan aturan – aturan pendukung lainnya. Pada target sasaran strategis 3 (S3) untuk jumlah dokumen Penanggulangan Bencana yang tersedia pada tahun 2017 sebanyak 1 Dokumen yaitu dokumen Revisi Rencana Penanggulangan Bencana dan Standar Operasional Prosedur (SOP) penanggulangan kedaruratan bencana. Jika dibandingkan dengan target capaian 1 dokumen tersusun maka Pencapaian sasaran pada target sasaran strategis 3 (S3) adalah 100 % yang didukung melalui Program Penataan Peraturan Perundang – undangan pada kegiatan Penyusunan dan penerbitan produk hukum Daerah dan kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan, Secara rinci dapat dilihat pada tabel .

### Tabel. Pencapaian Target Kinerja Sasaran Strategis 3 (S3) : Jumlah dokumen Penanggulangan Bencana yang tersedia

No.	Indikator Sasaran	Program/Kegiatan	Target kinerja Keg	Realisasi	Target Kinerja Sasaran	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Jumlah dokumen PB yang tersedia	1	<b>Program penataan paraturan perundang-undangan</b>		1	1	100.
		1	Penyusunan dan penerbitan produk hukum daerah	1	1		

Dari tabel di atas dapat dijelaskan bahwa target kinerja sasaran strategis 3 (S3) tahun 2016 adalah sebanyak 1 dokumen penanggulangan bencana yang kemudian terealisasi sebanyak 1 dokumen yaitu dokumen Revisi RPB Tahun 2014-2018 dan SOP tentang penanganan kedaruratan bencana atau tercapai 100%

Tabel. Perbandingan Jumlah Dokumen Tahun 2014 sd 2016

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian				Target Sasaran (%)				Capaian (%)			
			2014	2015	2016	2017	2014	2015	2016	2017	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=4/8*100	13=5/9*100	14=6/10*100	15=7/11*100
	Jumlah Dokumen yang tersedia	Jumlah Dokumen yang tersedia	3	3	1	1	3	2	1	1	100	150	100,00	100,00

Dari uraian tabel di atas dapat di jelaskan, bahwa realisasi pencapaian target kinerja sasaran (S3) pada tahun tahun sebelumnya, selalu tercapain bahkan tren yang semakin meningkat, pada tahun 2015 target kinerja S3 ini dapat terealisasi 100% (Seratus Persen) dari target 1 dokumen

Sampai dengan tahun 2017 realisasi sasaran strategis 3 (S3) ini adalah sebanyak 8 dokumen lebih besar dari pada target renstra sebesar 70 %. Target renstra sampai dengan tahun 2017 adalah sebanyak 7 dokumen yang berarti prosentase ketercapaian rencana strategis adalah 88,89 % dari target 70%.

Proses penyusunan dokumen penanggulangan bencana ini dilakukan pada akhir tahun, karena Kota Bima mendapat musibah bencana banjir pada akhir tahun 2016 sehingga menyebabkan pelaksanaan program/kegiatan tahun 2017 terlambat memulai karena sampai dengan bulan Maret 2017 BPBD masih menangani korban banjir tahun 2016 dan diikuti lagi dengan kejadian banjir maret 2017 yang cukup menyita waktu dan tenaga bagi personel BPBD yang terbatas. sehingga semua kegiatan maenjadi semakin mundur pelaksanaannya.

Penyusunan Dokumen Revisi RPB baru dalam bentuk Dokumen belum di assistensi menjadi Peraturan Walikota Bima sedang dokumen SOP Kedaruratan penanggulangan bencana yang tertunda asistensinya tahun 2016 telah dilegalisasi menjadi Produk Hukum Daerah melalui peraturan walikota Bima Nomor 62 Tahun 2017

Kendala lain yang dihadapi dalam proses penyusunan dokumen ini adalah kurangnya SDM yang tersedia, langkah antisipasi yang dilakukan adalah dengan cara BPBD Kota Bima membentuk Tim Teknis Penyusunan Dokumen yang berasal dari Dinas terkait dan menggandeng Forum PRB Mbojo Ma tenggo yang memiliki SDM yang cukup sebagai mitra kerja BPBD dalam upaya pengurangan Risiko Bencana. Upaya tersebut cukup efektif menyelesaikan tugas – tugas teknis, yang kemudian hasil yang dicapai pada tingkat teknis dikoordinasikan kembali pada tingkat lebih tinggi yaitu melalui rapat koordinasi Tim Koordinasi SKPD yang juga dibentuk untuk mempermudah koordinasi lintas SKPD terkait.

Jika dilihat dari sisi penggunaan sumber daya baik dana maupun SDM, ketercapaian target ini didukung melalui kegiatan penerbitan produk hukum daerah dengan biaya yang cukup sehingga dapat menyelesaikan 2 Dokumen meskipun 1 dokumen belum diasistensi untuk dilegalisasi

#### **4. Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 4 (S4): terwujudnya penyelenggaraan penanggulangan kedaruratan bencana secara cepat dan tepat.**

Tanggap darurat adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan sarana. sedangkan tujuan dari fase tanggap darurat adalah :

1. Membatasi korban dan kerusakan
2. Mengurangi penderitaan
3. Mengembalikan kehidupan dan sistem masyarakat
4. Mitigasi kerusakan dan kerugian
5. Sebagai dasar untuk pengembalian kondisi

Tahapan penanggulangan bencana pada fase darurat adalah penanganan kedaruratan bencana atau penanganan saat bencana. pada tahapan ini semua/ seluruh kemampuan sumber daya harus disiapkan untuk memaksimalkan penanganannya baik Sumber Dana, Peralatan maupun Sumber daya manusianya. baik sumber daya dalam daerah maupun sumber daya dari Luar untuk mendukung terlaksananya upaya pemulihan secara cepat.

Berdasarkan Peraturan Kepala BNPB Nomor 11 tahun 2010, Keadaan darurat dapat digolongkan menjadi 3 fase yaitu, masa siaga darurat (1), masa tanggap darurat (2) maupun masa tanggap darurat menuju ke pemulihan (3). Pada keadaan darurat bencana, Pemerintah dalam hal ini Walikota Bima akan mengeluarkan Pernyataan bencana berdasarkan Hasil Kajian Tim Reaksi cepat dan rekomendasi Lembaga terkait seperti BMKG. maka sejak pernyataan bencana diterbitkan maka sejak itulah segala kemampuan dikerahkan untuk membantu menanggulangi secara cepat dan tepat.

Selama tahun 2017 terdapat 26 Kasus kejadian bencana yang beragam jenis dan juga besaran kekuatannya. Bencana yang pernah terjadi selama tahun 2017 adalah Bencana banjir, angin kencang, kebakaran, Gempa bumi, Tanah Longsor. dari semua bencana yang terjadi bencana banjir pada tanggal 21 dan 23 Desember 2016 menyisakan berbagai kerusakan sehingga kegiatan penanganannya terlaksana pada awal tahun 2017

Pencapaian sasaran strategis 4 ini dapat dicapai melalui 2 (Dua) indikator sasaran strategis yaitu :

1. Persentase pemenuhan kebutuhan dasar saat bencana (S4.1)
2. Persentase ketersediaan Sarana dan Prasarana Penunjang saat bencana (S4.2)

#### **4.1. Persentase pemenuhan kebutuhan dasar saat bencana (S4.1)**

Kegiatan pada fase tanggap darurat meliputi : tahapan assesment/ pendataan korban, Koordinasi penanggulangan bencana, Rencana operasi, Evakuasi Korban, pendistribusian bantuan dan evaluasi dan pelaporan. Setelah melakukan upaya evakuasi korban ke tempat evakuasi yang aman terhadap bencana, maka langkah berikutnya adalah pemenuhan kebutuhan dasar bagi korban bencana.

Pemenuhan kebutuhan dasar meliputi : kebutuhan air bersih dan sanitasi, pangan, sandang, pelayanan kesehatan, pelayanan psikososial, dan penampungan dan tempat hunian. Dan pemulihan dengan segera prasarana dan sarana vital, dilakukan dengan memperbaiki dan/atau mengganti kerusakan akibat bencana.

Terpenuhinya kebutuhan dasar bagi korban bencana menjadi salah satu indikator penting dalam upaya meningkatkan efektifitas penanganan bencana. Selama tahun 2017 Badan penanggulangan bencana telah menangani kejadian bencana sebanyak 26 Kasus kejadian bencana, ditambah dengan 1 kejadian bencana banjir bandang yang terjadi di akhir tahun 2016 karena masa tanggap darurat bencana banjir bandang 2016 memasuki tahun anggaran 2017. semua kejadian bencana tersebut dapat terpenuhi semua kebutuhan dasarnya pada masa tanggap darurat terjadi. meskipun disana sini masih terdapat kekurangan namun secara keseluruhan dan secara bertahap dapat terlayani dengan baik kebutuhan dasar masyarakat korban seperti sembako, air bersih, penerangan, kesehatan dan kebutuhan pokok lainnya termasuk pemulihan darurat sarana dan prasarana fisik. sehingga target capaian untuk S4.1 ini dapat terealisasi sebesar 100 % dari target 100 %

Tabel berikut dapat menggambarkan capaian sasaran S4.1

No .	Indikator Sasaran	Program/Kegiatan	Target kinerja Keg	Realisasi	Satuan	% Realisasi	Target Kinerja Sasaran		Realisasi	%	
							7	8			
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	
1	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Dasar Saat Bencana	1 Penanganan kedaruratan bencana			%		100	%	100	100	
		Jumlah Kejadian bencana		26	Kejadian	100					
		Jumlah Kejadian bencana yang bisa ditangani	100	100	%						
		<b>Program pemenuhan kebutuhan dasar</b>									
		1	Pemenuhan Kebutuhan air bersih dan sanitasi	39	39	Titik	100				
		2	Pemenuhan sandang dan pangan	3	3	Jenis	100				
		<b>Program pengkajian secara cepat dan tepat</b>									
1	Analisa cakupan lokasi dan jumlah korban	1	1	Dok	100						

Dari tabel di atas dapat dijelaskan bahwa capaian sasaran strategis 4.1. ini dapat terealisasi 100 %, capaian ini dapat diperoleh melalui capaian Program Pemenuhan kebutuhan dasar pada kegiatan pemenuhan kebutuhan air bersih dan sanitasi dan kegiatan Pemenuhan sandang dan pangan, masing - masing terealisasi 100 %, Kegiatan pemenuhan air bersih dan sanitasi ini dapat terpenuhi melalui dana APBD II dan dana APBD I Provinsi. kegiatan ini outputnya adalah pendropingan air pada daerah yang memiliki krisis air bersih yang merupakan bencana turunan dari banjir bandang akibat rusaknya jaringan perpipaan air minum sehingga harus dilakukan pendropingan air bersih sejak banjir bandang Desember 2016 terjadi hingga saat ini, di 39 titik di 9 kelurahan. begitu juga dengan kegiatan pemenuhan sandang dan pangan, kegiatan ini dilakukan melalui dana APBD pada DPA BPBD tahun 2017 dan didukung melalui Dana dari Provinsi dan BNPB termasuk dukungan dari Swasta dan perseorangan. bantuan sandang pangan dapat berupa Beras, makanan siap saji pakaian, selimut dll. Data Jumlah dan jenis sandang dan pangan yang masuk maupun yang didistribusikan kepada masyarakat tersaji pada Lampiran Lakip ini.

Program pengkajian secara cepat dapat terealisasi 100 % melalui kegiatan Analisa cakupan lokasi dan jumlah korban, output kegiatan ini adalah berupa data dan informasi tentang jumlah dan cakupan lokasi korban bencana sebagai dasar kebijakan dalam penetapan status tanggap darurat dan sebagai data dasar pendistribusian bantuan sandang pangan maupun bantuan lainnya yang diberikan sesuai kebutuhan korban.

Jika dibandingkan dengan capaian pada tahun sebelumnya sasaran strategis 4.1 ini secara berturut - turut dapat terealisasi 100 %, Data perbandingan capaian pemenuhan kebutuhan dasar saat bencana dari tahun 2014 sd 2017 tersaji dibawah ini.

**Tabel. Data perbandingan capaian pemenuhan kebutuhan dasar saat bencana Tahun 2014 sd 2017**

N O	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian				Target Sasaran (%)				Capaian (%)			
			2014	2015	2016	2017	2014	2015	2016	2017	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	$\frac{12=4/8*100}{100}$	$\frac{13=5/9*100}{100}$	$\frac{14=6/10*100}{100}$	$\frac{15=7/11*100}{100}$
4	Meningkatnya efektifitas penyelenggaraan penanggulangan kedaruratan bencana secara cepat dan tepat	Porsentase pemenuhan kebutuhan dasar saat bencana	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

Untuk memenuhi kebutuhan dasar bagi korban bencana, BPBD sebagai leading sektor penanggulangan bencana berusaha mengkoodinasikan kepada stakeholder terkait. Sumber pembiayaan yang biasa digunakan untuk memenuhi kebutuhan dasar bagi Korban selama penanganan bencana akhir tahun 2016 sampai dengan tahun 2017 adalah :

1. Dana Siap pakai dari BNPB
2. Dana Tak Terduga dari BPBD Provinsi NTB
3. Dana Tak Terduga dari Pemerintah Kota Bima
4. Dana APBD melalui DPA BPBD
5. Dana CSR dari Kelompok Dunia Usaha
6. Bantuan dari Daerah Lain
7. Dana Bantuan dari masyarakat secara individu.
8. Dana APBN melalui kementerian terkait
9. Dana lainnya yang tidak mengikat

Selama masa tanggap darurat berlangsung dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat selalu mendapat hambatan dalam pelaksanaannya, terutama pada penanganan bencana besar seperti yang terjadi pada penanganan bencana banjir bandang di awal tahun 2017 yang lalu, Hambatan yang selalu terjadi adalah adanya tumpang tindih bantuan, karena kurang koordinasi antara pemberi bantuan dengan Posko Utama atau posko bantuan, biasanya terjadi karena pemberi bantuan langsung mendroping bantuan ke lokasi korban tanpa koordinasi dengan posko bantuan. atau kendala lain biasanya terjadi karena data/ informasi yang kurang detail tentang korban, jumlah keluarga, umur, pendidikan dan lain - lain. Data tersebut dimanfaatkan sebagai pedoman untuk menentukan jumlah dan jenis bantuan, kendala lain yang sangat berarti pula adalah kurangnya personil yang kompeten untuk menangani korban yang sakit.

Terkait pendropingan air bersih terdapat kendala antara lain :

1. Keterbatasan dana APBD II
2. Keterbatasan mobil tangki untuk pendropingan air
3. Kurangnya tandon air untuk penampungan sementara

4. Belum adanya upaya - upaya jangka panjang dalam penanggulangan bencana kekeringan ,

Upaya yang dilakukan untuk mengurangi kegagalan kegiatan tersebut, antara lain :

1. Mengupayakan bantuan dari luar baik dari APBD I maupun BNPB dan Donor lainnya.
2. Membagi tugas dengan SKPD lain untuk memenuhi keterbatasan mobil tangki maupun personil
3. Menggunakan Dana Sisa Bencana banjir bandang yang bersumber dari Bantuan Masyarakat untuk pengadaan tandon dan mendapat bantuan tandon dari BPBD Provinsi NTB
4. Mengkoordinasikan dengan dinas Teknis terkait bersama TAPD untuk mengupayakan Menjadi program prioritas tahun 2019.

#### **4.2. Persentase ketersediaan Sarana dan Prasarana Penunjang saat bencana (S4.2)**

Berdasarkan peraturan menteri dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2007 tentang pedoman penyiapan sarana dan prasarana penanggulangan bencana bahwa Sarana dan prasarana umum meliputi:

- a. peralatan peringatan dini (*early warning system*) sesuai kondisi dan kemampuan daerah;
- b. posko Bencana beserta perlengkapan pendukung seperti peta lokasi bencana, alat komunikasi, tenda darurat, genset (alat penerangan), kantong-kantong mayat dan lain-lain;
- c. kendaraan operasional sesuai dengan kondisi daerah;
- d. peta rawan bencana;
- e. rute dan lokasi evakuasi pengungsi;
- f. prosedur tetap (Protap) penanggulangan bencana;
- g. dapur umum berikut kelengkapan logistiknya;
- h. pos kesehatan dengan tenaga medis dan obat-obatan;
- i. tenda-tenda darurat untuk penampungan dan evakuasi pengungsi, penyiapan *valbed* serta penyiapan tandu dan alat perlengkapan lainnya;
- j. sarana air bersih dan sarana sanitasi/MCK di tempat evakuasi pengungsi dengan memisahkan sarana sanitasi/MCK untuk laki-laki dan perempuan;
- k. peralatan pendataan bagi korban jiwa akibat bencana (meninggal dan luka-luka, pengungsi, bangunan masyarakat, Pemerintah dari Swasta); dan lokasi sementara bagi pengungsi.

Ketersediaan sarana dan prasarana penunjang saat bencana menjadi salah satu indikator penting dalam mensukseskan pelaksanaan penanggulangan kedaruratan bencana, sehingga BPBD pada tahun 2017 ini menetapkan sasaran strategis 4.2 menjadi salah satu indikator penting untuk memperhitungkan kinerja organisasi.

Berdasarkan penggolongan sarana prasarana kebutuhan dasar dalam peraturan menteri dalam negeri tersebut diatas maka secara umum sarana prasarana penunjang saat bencana dapat disederhanakan penggolongannya antara lain :



1. Keberadaan Gudang logistik beserta kelengkapannya
2. Jalur dan Tempat Evakuasi Sementara bagi korban (Tenda, Gedung, lapangan, dll)
3. Pusdalops dan Peralatan peringatan dini (Peta rawan bencana, dll)
4. Peralatan Evakuasi (pelampung, felbet, tali, genset dan lampu sorot, alat pengaman dll)
5. Alat angkut untuk evakuasi berupa Mobil, Perahu karet, motor trailer, truk sampah, dll
6. Peralatan dapur umum, Sarana air bersih dan sanitasi
7. Alat berat seperti, Eksavator amfibi, Loder, dll

pada masa tanggap darurat terjadi, pengerahan peralatan dapat dilakukan baik yang berada di Daerah maupun Luar daerah bahkan peralatan yang dimiliki pihak swasta dikerahkan untuk mendukung penyelenggaraan penanggulangan kedaruratan bencana.

Pelaksanaan penanganan darurat baik siaga darurat, saat tanggap darurat maupun saat pemulihan selama tahun 2017 cukup bagus dalam pelaksanaannya, salah satu indikator pendukung penyelenggaraannya karena adanya sarana dan prasarana pendukung yang memadai. berdasarkan hasil penilaian kebutuhan peralatan penanggulangan bencana peralatan yang masih kurang antara lain :

1. Gudang logistik masih kurang luas dan Rak barang masih terbatas
2. Jumlah eksavator amfibi masih sangat terbatas di Lingkungan Pulau Sumbawa, dan Kota Bima belum memiliki alat berat tersebut sebagai alat untuk membersihkan sampah yang tersangkut di jembatan yang sering menyebabkan luapan banjir.
3. Perangkat Pusdalops masih terbatas.
4. Perahu karet kondisi rusak kurang berfungsi sebagai sarana evakuasi bagi korban banjir
5. Keterbatasan tenaga terlatih yang mengelola logistik dan pergudangan.

Berdasarkan uraian di atas maka secara kuantitatif penilaian indikator sasaran strategis 4.2

ini dapat dijelaskan pada tabel berikut :

Tabel Penilaian Kebutuhan sarana dan prasarana penunjang dan Penanggulangan Bencana

No	Sarana dan prasarana penunjang penyelenggaraan PB	Bobot	Ada/tidak ada		Kepemilikan		Kondisi		Kecukupan		Nilai
			Ada	Tidak ada	milik sendiri	Milik Daerah lain/Swasta	Baik	Kurang baik/Rusak	Cukup	Kurang	
1	Keberadaan Gudang logistik dan kelengkapannya	20	v		v		v			v	15

2	Jalur dan Tempat Evakuasi Sementara bagi korban	15	v		v		v		v		15
3	Pusdalops dan peralatan peringatan dini	15	v		v		v			v	10
4	Peralatan Evakuasi	5	v		v		v		v		5
5	Alat angkut untuk evakuasi berupa Mobil, Perahu karet, dll	15	v		v		v			v	10
6	Peralatan dapur umum, sarana air bersih dan sanitasi	10	v		v		v		v		10
7	Alat berat seperti, Eksavator ampibi, eksavator mini, dll	20	v				v			v	15
		100									80

Berdasarkan tabel di atas. ada 7 kelompok atau jenis sarana dan prasarana penunjang dalam penanggulangan bencana, dari 7 kelompok tersebut memiliki bobot penilaian yang berbeda - beda menurut fungsinya dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana, 7 kelompok tersebut merupakan kebutuhan sarana prasarana minimal yang harus ada untuk mendukung terlaksananya penyelenggaraan kedaruratan bencana. dari bobot total 100 %, Keberadaan sarana prasarana penunjang sampai dengan tahun 2017 sebesar 80 %, nilai tersebut diperoleh dari angka kumulatif dari penilai terhadap Keberadaan 7 kelompok atau jenis kebutuhan sarana dan prasarana penunjang (ada atau tidak ada, kepemilikannya, kondisi sarana dan kecukupannya)

Dari penjelasan tersebut di atas maka capaian terpenuhinya kebutuhan sarana prasarana penunjang sebesar 80 % atau sama dengan target kinerja Sasaran strategis 4.2 tahun 2017 sebesar 80 % atau angka ketercapaiannya sasaran strategi 4.2 ini sebesar 100 %,

Tabel berikut dapat menggambarkan angka capaian sasaran strategis 4.2

No .	Indikator Sasaran	Program/Kegiatan	Target kinerja Keg	Realisasi	Satuan	% Realisasi	Target Kinerja Sasaran	Realisasi	%
2	Persentase ketersediaan Sarana dan	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Penanggulangan Bencana					80 %	80	%

Prasarana Penunjang saat bencana	1	Pengadaan Sarana Prasarana penunjang dalam rangka upaya penanggulangan bencana	11	11	jenis	100				
	2	Penilaian Kebutuhan peralatan BPBD	80	80	%	100				

Pada tahun - tahun sebelumnya, indikator sasaran strategis 4.2 ini tidak pernah menjadi indikator penilaian secara spesifik akan tetapi hanya diperhitungkan sebagai salah satu indikator dalam penilaian bagi sasaran Porsentase penanganan kedaruratan bencana yang dinilai pada Lakip tahun 2016.

#### **Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 5 (S.5): Persentase Rehabilitasi dan Rekonstruksi sarana prasarana fisik dan non fisik pasca bencana**

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bima selain memiliki tugas pokok sebagai komando dan pelaksana dalam penanggulangan bencana, tugas lain yang diemban adalah mengkoordinasikan tugas – tugas penanggulangan bencana dengan Instansi teknis salah satunya adalah mengkoordinasikan tugas rehabilitasi dan rekonstruksi setelah terjadinya bencana dengan SKPD teknis lainnya seperti Dinas PU, Dinas Pertanian, Dinas Perikanan dan kelautan dan lain-lain. dan berkoordinasi dengan Instansi Vertikal ke Provinsi maupun ke pusat serta pemangku kepentingan lainnya.

Untuk mengukur capaian sasaran ini adalah dengan membandingkan antara Jumlah paket sarana prasarana yang rusak dari Dokumen JITu Pasna tahun sebelumnya dengan jumlah sarana dan prasarana fisik dan non fisik yang rusak pasca yang bisa ditangani oleh BPBD maupun dinas teknis lainnya, jika dilihat dari hasil

Selama tahun 2017 paket kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana yang dikoordinasikan adalah paket kegiatan bidang SDA yang ditangani bersama dengan Dinas PU. Paket kegiatan yang dikoordinasikan berdasarkan Dokumen DAra tahun 2016 sebanyak 22 Paket, sementara yang dapat dikerjakan pada tahun 2017 sebanyak 7 Paket, 2 Paket dengan dana APBD II melalui DAU pada Dinas PU Perkim sementara 5 Paket lainnya dikerjakan melalui Dana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana dari BNPB.

Untuk mengukur capaian kinerja pada Prosentasi jumlah sarana dan prasarana fisik dan non fisik yang rusak pasca bencana bisa ditangani adalah jumlah sarana dan prasarana fisik dan non fisik yang rusak akibat bencana dapat ditangani dibagi dengan bencan hasil analisa kerusakan pasca bencana dikali dengan 100 %. Tingkat capaiannya dapat terlihat pada tabel berikut :

**Tabel Pencapaian Sasaran strategis S.5**

NO	JUMLAH PAKET PERBAIKAN YANG DIKOORDINASIKAN BERDASARKAN DATA KERUSAKAN	JUMLAH PAKET YANG DITANGANI DINAS TEKNIS DAN BPBD	CAPAIA N %	Target Sasaran %	Ketercapaian %
1	2	3	4	5	$6=5/4*100$
1	22	7	32	80	39,77

Dari table di atas dapat dijelaskan bahwa Total jumlah paket rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana sebanyak 22 paket yang tersebar di Kota Bima, yang bisa ditangani pada tahun 2017 baik oleh Dinas PU Pertamben maupun oleh BPBD Kota Bima adalah sebanyak 7 Paket yang tersebar di Kota Bima sehingga realisasi sasaran strategis 5 (S5) adalah sebesar 32 % dari target sasaran strategis tahun 2017 sebesar 80%, maka angka ketercapaian sasaran strategis ini adalah 39,77 %

Tabel. Perbandingan Capaian S5 Tahun 2014 Sampai dengan 2017

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	CAPAIAN (%)				Target Sasaran (%)				Ketercapaian (%)			
			2014	2015	2016	2017	2014	2015	2016	2017	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	$12=4/8*100$	$13=5/9*100$	$14=6/10*100$	$15=7/11*100$
	Terwujudnya pemulihan sarana dan prasarana fisik dan non fisik pasca bencana	Persentase rehabilitasi dan rekonstruksi sarana prasarana fisik dan non fisik pasca bencana	5	55	22	32	50	60	70	80	10,00	91,67	30,81	39,77

Jika dibandingkan dengan tahun - tahun sebelumnya, bahwa tingkat realisasi sasaran strategis 5 (S.5) pada tahun 2017 adalah mengalami peningkatan yang signifikan. pada tahun 2014 hanya bisa dicapai sebesar 5 % sementara pada tahun 2017 tercapai sebesar 32 %, hal ini berarti tingkat capaian koordinasi rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana dengan dinas teknis terkait cukup berhasil, meskipun tidak tercapai sebesar 100% Capaian ini tidak terlepas dari dukungan penganggaran yang cukup, 5 paket penanganan pasca bencana adalah dilakukan oleh BPBD sendiri melalui Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana pada Program Rekonstruksi dimana Sumber dananya adalah dari Dana bantuan Hibah Rehabilitasi

dan Rekonstruksi Pasca bencana tahun 2016 dari BNPB . Pada kegiatan monitoring dan evaluasi pada program rekonstruksi, juga mendukung ketercapaian sasaran ini karena output kegiatan monitoring dan evaluasi adalah disamping dokumen hasil analisa kerusakan pasca bencana juga melakukan koordinasi langsung hasil analisa tersebut kepada dinas teknis terkait agar dapat mengakomodir program rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana kedalam Program dan kegiatan dinas terkait baik pada Penggaran Perubahan tahun yang berjalan atau pada program kerja tahun berikutnya.

Program lain yang mendukung adalah Program Penyuluhan dan penanggulangan bencana pada kegiatan Diklat dan penyuluhan kepada SKPD terkait. Diklat ini out putnya adalah memberikan pelatihan bagi SKPD terkait tentang DALA (Perhitungan kerusakan dan kerugian pasca bencana). atau JITU Pasna, Kegiatan ini menghasilkan Tim yang akan melakukan perhitungan kerusakan dan kerugian pasca bencana.

Kegiatan lain yang ikut mendukung Sasaran Staregi 5 (S5) ini adalah kegiatan Analisa Kerusakan sarana dan prasarana. Selama tahun 2017 Kegiatan ini memberi kontribusi pada tersedianya 1 Dokumen JITU Pasca (Perhitungan Kerusakan dan Kerugian Pasca bencana) setelah terjadinya Banjir bandang akhir tahun 2016, sehingga terbitlah Peraturan Walikota Bima tentang Rencana aksi Rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana banjir bandang tahun 2017. Hasil koordinasi tersebut akan menghasilkan sejumlah paket bantuan Rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana baik pada tahun berjalan maupun pada tahun berikutnya.

Dalam proses pelaksanaan program untuk mencapai sasaran strateegis ini secara teknis di lapangan sering menemui kendala seperti keterbatasan anggaran APBD menyebabkan terbatasnya jumlah paket yang bisa ditangani atau berkurangnya volume yang harus dikerjakan. Untuk mengantisipasi hal tersebut maka yang dilakukan adalah dengan membuat daftar prioritas program dan mendorong program dan kegiatan tersebut tetap berkelanjutan masuk pada Rencana Kerja SKPD terkait pada tahun tahun berikutnya. Upaya lain yang dilakukan adalah mengajukan proposal rehabilitasi dan rekonstruksi pasca benca ke BNPB atau Koordinasi kepada pihak Donor baik Dalam Negeri maupun Luar negeri, karena anggaran untuk perbaikan infrastruktur akibat bencana membutuhkan biaya yang cukup besar sementara daerah memiliki keterbatasan anggaran.

### **3. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan**

Pada umumnya, dalam menjalankan roda organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bima, ada beberapa faktor penyebab keberhasilan dan kegagalan untuk mencapai tujuan dan sasaran utama yang telah direncanakan sebelumnya.

Faktor – faktor penentu keberhasilan antara lain :

#### **a. Unsur Pimpinan memiliki strategi vision dalam menjalankan roda organisasi sehingga gerak organisasi BPBD Kota Bima sangat dinamis**

Sejak terbentuknya Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bima melalui Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 05 tahun 2010, Peningkatan aktivitas kegiatan penanggulangan bencana baik Prabencana, saat bencana maupun pasca bencana setiap tahunnya mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Hal ini dapat dilihat dari peningkatan jumlah pagu anggaran DPA BPBD Kota Bima dari tahun 2010 hingga 2017 adalah rata – rata 87 % per tahun, dan peningkatan bantuan dana dari BPBD Provinsi NTB dan BNPB melalui dana Siap pakai untuk kegiatan tanggap darurat kekeringan di Kota Bima dan Dana rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca bencana, disamping itu terdapat peningkatan program dan kegiatan kerjasama Pemerintah Kota Bima melalui BPBD dengan Organisasi donor seperti, Kerjasama dengan OXFAM Indonesia, JICA Jepang, Forum PRB Mbojo Ma Tenggo Kota Bima, Federasi TSBK, TSBK dan pendukung lainnya. Keberhasilan yang diuraikan di atas merupakan keberhasilan bersama atas manajemen organisasi yang cukup baik dari pimpinan BPBD Kota Bima dalam mengerahkan seluruh sumberdaya yang ada baik sumber daya manusia maupun peralatan yang masih terbatas.

#### **b. Perencanaan Organisasi yang sesuai dengan tuntutan paradigma Organisasi**

Selain unsur kepemimpinan, unsur perencanaan yang baik dalam organisasi memberikan pengaruh yang cukup besar untuk keberhasilan organisasi, Dokumen Perencanaan yang strategis dan penilaian yang tepat ke depan akan memberikan dampak ketepatan dalam pengambilan arah kebijakan – kebijakan organisasi. Dokumen Perencanaan yang telah disusun BPBD Kota Bima adalah seperti Rencana Strategis Periode 2014-2018, Rencana kerja tahun 2017, Rencana Penanggulangan Bencana Daerah (RPB) Kota Bima. Dokumen – dokumen tersebut dapat memberikan arah yang jelas dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi BPBD Kota Bima baik sebagai fungsi Pelaksana penanggulangan bencana maupun sebagai fungsi koordinasi dan Komando dalam Penanggulangan bencana di Kota Bima.

#### **c. Sumber daya manusia yang mumpuni**

Jumlah Pegawai BPBD Kota Bima sampai dengan 31 Desember 2017 sebanyak 41 Orang. Berdasarkan tingkat pendidikan pegawai BPBD didominasi oleh pegawai pada

tingkat pendidikan Sarjana S1 sebesar 47,5%, kemudian Tenaga dengan pendidikan SMA sederajat sebanyak 40 % , sebanyak 10 % tenaga dengan pendidikan S2 sementara 2,5 dengan pendidikan D3 .

Berdasarkan penempatan pegawai pada jabatannya, Jabatan Struktural pada BPBD Kota Bima telah terisi penuh oleh aparatur yang mumpuni, sehingga cukup memberikan sumbangsih bagi keberhasilan BPBD sehingga tercapai indikator target yang telah ditetapkan sebelumnya.

**d. Penerapan teknologi yang memadai**

Penguasaan teknologi yang memadai akan berdampak besar terhadap penyelesaian pekerjaan – pekerjaan yang diemban. BPBD Kota Bima dalam menjalankan tugasnya telah menggunakan teknologi informasi yang cukup memadai seperti ketersediaan Wifi, peralatan komputerisasi yang memadai, Simda keuangan, penganggaran dan asset, teknologi jaringan informasi untuk menerima dan melaporkan kejadian dan potensi bencana melalui radio, termasuk melakukan pendataan profil kelurahan menggunakan HP Android kerjasama dengan OXFAM Indonesia. Kesemuanya itu menjadi faktor pendukung keberhasilan BPBD dalam mencapai indikator target pada tahun 2017.

**e. Dukungan donor dan Lembaga Kemitraan Lokal**

Proyek kerjasama membangun ketangguhan masyarakat melalui program pengurangan risiko bencana antara Pemerintah Kota Bima dalam hal ini BPBD Kota Bima dengan OXFAM Indonesia melalui LP2DER sangat mendukung keberhasilan program program peningkatan kapasitas baik kelembagaan BPBD maupun masyarakat. Program kerjasama ini membawa Pemerintah Kota Bima menjadi Nominasi Kota Tangguh bencana dunia yang mewakili Indonesia di kancah internasional, sehingga beberapa kali Kepala Daerah beserta Kepala BPBD mengikuti pertemuan nasional bahkan Internasional di Negara Jepang, Thailan dan Bangkok terkait keberhasilan Kota Bima memulai proses pembentukan Kota Tangguh bencana. Selain dengan OXFAM, BPBD Kota Bima juga bekerjasama dengan JICA (Japan international Corporation Agency) dalam hal peningkatan kapasitas kelembagaan penanggulangan bencana yang beberapa kali juga mengirim Pemerintah daerah untuk belajar langsung ke Negara tersebut termasuk kerjasama dengan Konsulat Amerika untuk pelatihan tenaga medis dan kerjasama dengan pemerintah Australia untuk mengirim pegawai BPBD mengikuti pelatihan Pemadam Kebakaran di Australia.

Dukungan lain juga adalah dari Lembaga Lokal LP2DER Bima, Forum PRB Mbojo Matenggo Kota Bima yang didalamnya memiliki unsur Perguruan tinggi , TSBK, HIPGABI dan Lembaga yang peduli terhadap penanggulangan lainnya. Lembaga

tersebut sangat membantu dalam menyelesaikan kegiatan penyusunan dokumen – dokumen penanggulangan bencana seperti : RPB, Peta Risiko Bencana, RBBK dan dokumen pendukung lainnya dalam rangka menuju kemandirian masyarakat dalam menghadapi bencana.

Faktor – Faktor yang menyebabkan kegagalan organisasi.

**a. Kualifikasi Sumber Daya Manusia**

Pada uraian tentang keberhasilan BPBD, Sumberdaya yang mumpuni cukup tersedia pada struktur organisasi BPBD, namun pada tugas - tugas khusus seperti pengelola gudang dan Operator Pusdalops belum memiliki tenaga yang bersertifikat keahlian untuk menyelesaikan tugas - tugas secara profesional.

**b. Masih kurangnya Koordinasi dengan sektoral**

Tugas Pokok dan Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bima selain sebagai fungsi pelaksana penanggulangan bencana, juga memiliki fungsi koordinasi. Sebagai organisasi yang memiliki fungsi koordinasi dibidang penanggulangan bencana, diharapkan dapat menjalin koordinasi yang lebih baik dengan stakeholder terkait mengingat pekerjaan penanggulangan bencana memerlukan kerjasama yang baik antara tiga pilar yaitu Pemerintah, Swasta dan Dunia Usaha baik pada pra bencana, saat bencana maupun pasca bencana untuk program rehabilitasi dan konstruksi pasca bencana.

**c. Fasilitas Sarana Prasarana Pendukung masih kurang memadai**

Dalam rangka meningkatkan pelayanan bencana, fasilitas sarana prasarana pendukung sangat diperlukan. Berdasarkan analisa kebutuhan sarana prasarana pendukung saat bencana, persentase ketersediaan sarana prasarana penunjang saat bencana selama tahun 2017 sebesar 80%, ini berarti ketersediaannya cukup memadai, sarana prasarana yang masih kurang diantaranya adalah, Gudang Logistik yang kurang luas, Alat berat seperti ekskavator ampibi, Perahu karet masih kurang, Sistem Peringatan Dini untuk semua bencana masih terbatas dll.

Solusi yang dilakukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bima untuk mengurangi ketidakberhasilan di atas adalah :

- a. Mengoptimalkan penggunaan sumberdaya yang ada dan Upaya pemenuhan tenaga trampil dapat dilakukan dengan membentuk Tim Teknis penyusunan dokumen penanggulangan bencana yang anggotanya dari SKPD terkait seperti Bappeda, bagian Hukum Setda, Unsur Perguruan tinggi, Forum PRB Kota Bima, TSBK dan lembaga lainnya untuk secara bersama – sama menyusun dokumen – dokumen penanggulangan Bencana seperti : RPB, Analisa Risiko Bencana, dan dokumen penanggulangan bencana lainnya hingga menjadi legitimasi hukum sebagai dasar dalam pelaksanaan penanggulangan bencana di Kota Bima



- b. Melakukan upaya – upaya diplomasi dengan stakeholder lain melalui legitimasi hukum dalam rangka peningkatan peran masyarakat dan dunia usaha dalam hal penanggulangan bencana dengan diterbitkannya
- c. Melakukan sharing dana dengan donor, dengan mengupayakan pengalokasian anggaran bantuan dari donor pada program dan kegiatan yang tidak dialokasikan dari Anggaran BPBD Kota Bima, APBD Kota maupun dari dari APBN melalui BNPB.
- d. Mengupayakan bantuan dari BNPB dan BPBD Provinsi untuk menambah fasilitas sarana prasarana penanggulangan bencana termasuk bantuan Logistik bencana maupun kerjasama untuk Pengurangan risiko bencana, sehingga pada tahun ini BPBD Kota Bima mendapat alokasi bantuan pembentukan kelurahan tangguh bencana 1 Kelurahan dari BPBD Provinsi untuk Kelurahan tangguh Pratama dan 2 Kelurahan untuk Pengembangan kelurahan tangguh dari BNPB sebanyak 1 Kelurahan serta bantuan Dana melalui program Mitigasi struktural rumah aman bencana.
- e. Untuk menambah wawasan bagi Aparatur pemadam kebakaran maupun Aparatur BPBD umumnya, upaya yang dilakukan adalah dengan mengirim/ mengikutsertakan tenaga PMK dan Aparatur BPBD pada diklat - diklat teknis penanggulangan bencana.

#### **4. Analisis efisiensi penggunaan sumber daya**

Efisiensi kegiatan adalah kemampuan suatu kegiatan untuk menggunakan input yang lebih sedikit tetapi dapat menghasilkan output yang sama, atau input yang sama dapat menghasilkan output yang lebih besar. Fokus perhatian dalam pengukuran efisiensi adalah indikator input dan output dari suatu kegiatan. Angka capaian efisiensi diperoleh dengan membandingkan capaian output dengan capaian input. Angka capaian efisiensi tersebut kemudian dibandingkan dengan standar efisiensi. Dalam laporan ini standar efisiensi yang dipakai adalah indeks efisiensi target/rencana/anggaran, yaitu 1 (satu). Bila angka capaian efisiensi sama atau lebih besar dari standar efisiensi, maka kegiatan yang bersangkutan dianggap efisien. Sebaliknya bila angka capaian efisiensi lebih kecil dari standar efisiensi, maka kegiatan tersebut dianggap tidak efisien.

Selama Tahun 2017, dari sejumlah 14 (empat belas) program dan 41 kegiatan strategis yang dilaksanakan sebesar 100 % telah dapat dilaksanakan dengan efisien.

#### **5. Analisis program dan kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**

Program dan kegiatan yang telah dilakukan selama tahun 2017 sebanyak 14 program dan 41 Kegiatan. Pencapaian target program dan kegiatan ini sangat menunjang keberhasilan

pencapaian target indikator kinerja utama BPBD. dari data tabel pengukuran kinerja organisasi rata - pencapaian dari 5 sasaran strategis adalah sebesar 103,11 % atau mendapat pencapaian sangat bagus 103, 11 % sementara Rata – rata pencapaian 5 indikator sasaran kinerja dari target rencana strategis 5 tahunan sebesar 86,43 %. Pengukuran Kinerja Program dan Kegiatan BPBD Kota Bima tahun 2017 dapat dilihat pada tabel pada lampiran LAKIP ini.

## B. REALISASI ANGGARAN

Dukungan dana yang besar memberikan pengaruh yang cukup besar pula untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan, sehingga dapat berhasil dengan baik, maka secara berkesinambungan dapat menunjang tercapainya target indikator kinerja utama (IKU) BPBD Kota Bima tahun 2017. Anggaran yang tersedia untuk mendukung keberhasilan program dan kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bima tahun 2017 ini yang tersedia pada DPA BPBD Tahun Anggaran 2017 adalah sebesar Rp. 18.433.722.468,16 yang terdiri dari **Belanja Tidak Langsung** sebesar Rp. 2.004.726.405,41 terdiri dari belanja pegawai sebesar Rp. 2.004.726.405,41,-. Sementara **Belanja Langsung** sebesar Rp.16.428.996.062,75,- yang terdiri dari belanja pegawai Rp. 1.115.437.000,- Belanja barang dan jasa Rp.3.733.494.062,75,- dan belanja modal sebesar Rp.11.580.065.000,-. Anggaran BPBD tahun 2017 ini cukup besar jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Kenaikan pagu anggaran ini disebabkan karena adanya Dana bantuan Hibah Rehabilitasi dan Rekontruksi pasca bencana tahun 2016 dari BNPB yang dilaksanakan pada tahun Anggaran 2017. Dana tersebut sebesar Rp. 12.000.000.000,- untuk melakukan rehabilitasi dan rekonstruksi jaringan irigasi pasca banjir

Realisasi belanja tahun 2017 adalah Rp 16.262.389.744,- atau sebesar 88,22 % dengan rincian realisasi belanja tidak langsung sebesar Rp. 1.955.373.808,- atau 97,54 % dan belanja langsung sebesar Rp. 14.307.015.936 atau 91,38 %. Laporan realisasi anggaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bima tahun anggaran 2017. secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel.**  
**Realisasi Anggaran Belanja BPBD Kota Bima tahun 2017**

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Terserap (Rp)	Realisasi (Rp)	% Realisasi
1.	Belanja Tidak Langsung	2.004.726.405,41	1.955.373.808,-	1.955.373.808,-	97,54 %
	a. Belanja Pegawai	2.004.726.405,41	1.955.373.808,-	1.955.373.808,-	
2.	Belanja Langsung	16.428.996.062,75,	14.307.015.936	14.307.015.936	87,08%
	a. Belanja Pegawai	1.115.437.000,-	1.115.437.000	1.115.437.000	
	b. Belanja Barang dan jasa	3.733.494.062,75	3.410.078.936	3.410.078.936	
	c. Belanja Modal	11.580.065.000,-	9.781.500.000,-	9.781.500.000,-	
	<b>Jumlah</b>	<b>18.433.722.468,16</b>	<b>16.262.389.744</b>	<b>16.262.389.744</b>	<b>88,22%</b>

Selain anggaran yang tertuang dalam Dokumen pelaksanaan anggaran BPBD Tahun 2017, Anggaran lain yang mendukung terselenggaranya kegiatan penanggulangan bencana antara lain :

1. Dana Tak terduga dari pemerintah Kota Bima yang tersedia pada BPKAD
2. Dana tak terduga dari Provinsi NTB
3. Dana Bantuan Bencana banjir bandang tahun 2016 yang masih tersedia pada tahun anggaran 2017
4. Dana bantuan dari BNPB melalui program Mitigasi Partisipatif dan Program Pengembangan Desa Tangguh bencana.

Secara garis besar pelaksanaan aspek keuangan **telah** sesuai dengan prinsip-prinsip pelaporan yang lazim, dan pertanggung jawabannya **telah** sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku, hemat, efisien dan efektif serta mengusahakan seminimal mungkin terjadinya penyimpangan atau penyalahgunaan.

Namun demikian, akibat adanya kegiatan yang tidak efisien sebagaimana telah dijelaskan pada bab-bab sebelumnya, maka terdapat pula penggunaan dana yang tidak efisien sebesar Rp. 0 (%).

Berdasarkan hasil audit yang dilakukan oleh Aparat Pengawasan Fungsional Pemerintah yaitu **tidak terdapat** penggunaan dana yang merugikan keuangan negara.

Analisis pencapaian kinerja keuangan merupakan tingkat pencapaian target dari masing-masing indikator keuangan yang telah ditetapkan dalam dokumen rencana kerja. Pengukuran tingkat pencapaian kinerja keuangan didasarkan pada data hasil pengukuran kinerja keuangan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Bima mencapai 88,22 % hal ini berarti tingkat pencapaian Kinerja Keuangan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Bima memuaskan. Secara rinci dapat dilihat pada tabel Tingkat Pencapaian Kinerja Keuangan Tahun 2017 pada lampiran .

Selain Anggaran yang tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) BPBD juga mengelola dana Tak terduga yang ada di Pos DPKAD Kota Bima dan Dana Siap Pakai dari BNPB. Dana tak terduga dan dana Siap pakai yang dimaksud untuk membiayai kegiatan kebencanaan yang sifatnya Darurat.

Selama tahun 2017 Dana tak terduga yang bersumber dari BPBD Provinsi NTB sebesar Rp. 36.740.000 dapat terealisasi sebesar Rp. 36.740.000,- atau sebesar 100%, dana tersebut dipergunakan untuk siaga darurat kekeringan di Kota Bima untuk mendukung pendropingan air bersih untuk memenuhi kebutuhan air bersih di 19 titik yang tersebar di Kota Bima.

Dana tak terduga dari Pemerintah Kota Bima sebesar Rp. 118.425.000 dapat terealisasi sebesar 118.425.000 atau sebesar 100 %. Dana tersebut dialokasikan untuk mendukung kegiatan untuk keperluan mendesak pembersihan jembatan Padolo I, Jembatan Padolo III serta Jembatan Rabasalo

Dana bantuan dari BNPB untuk program Mitigasi struktral pembangunan sekolah aman bencana sebesar Rp.113.260.000 dan dapat terealisasi sebesar Rp. 166.611.100. atau sebesar 86,30%. dan tersisa sebesar Rp.26.445.900 sedangkan dana bantuan untuk pengembangan desa tangguh bencana sebesar Rp.113.260.000 dapat terealisasi sebesar Rp. 112.382.000 atau sebesar 99,22 % dan tersisa sebesar 878.000 dikembalikan pada kas negara.

Dana bantuan bencana banjir bandang tahun 2016 yang bersumber dari Dana Non DSP sebesar Rp. 2.173.087.111 dapat terealisasi sebesar 1.125.355.795 atau sebesar 51,79 %, sehingga tersisa sebesar Rp. 1.047.731.316. Sisa penggunaan penyelenggaraan tanggap darurat banjir bandang 2016 pada bulan maret 2017 dipergunakan kembali untuk penanggulangan bencana banjir yang terjadi pada bulan maret 2017 sebesar Rp. 760.530.000 dan Sebesar Rp. 306.072.019 dipindahbukukan pada APBD kemudian masuk pada DPA Perubahan BPBD Tahun 2017. secara rinci data realisasi dana - dana lain selain yang tersedia dalam DPA BPBD tahun 2017 dapat dilihat pada Lampiran LAKIP ini.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bima selain mendapatkan bantuan dana dari Provinsi maupun BNPB, juga mendapat bantuan berupa bantuan program dan kegiatan atau bantuan peralatan dan logistik. bantuan - bantuan tersebut juga dapat mendukung tercapainya sasaran strategis organisasi yang telah ditetapkan.

Bantuan program juga berasal dari Donor yaitu Program Pembentukan Rumah sakit aman bencana yang dikerjasamakan dengan MDMC Muhammadiyah jakarta, selain itu Program kerja sama dengan OXFAM dalam bentuk kerjasama program Antisipasi perubahan iklim yang

merupakan rangkaian kerjasama untuk mendukung ketangguhan Kota yang telah berjalan sejak tahun 2015 hingga tahun 2017 dan akan berlanjut pada akhir tahun 2018.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) merupakan media akuntabilitas yang dapat digunakan sebagai alat komunikasi pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bima, Media ini juga dapat dipakai sebagai umpan balik pengambilan keputusan pihak-pihak terkait dalam melakukan langkah-langkah perbaikan dan peningkatan kinerja di masa-masa yang akan datang.

Kinerja (performance) dapat dianalisis melalui dua aspek yaitu proses bekerja dan hasil prestasi kerja, dimana kinerja juga merupakan perpaduan antara motivasi yang terdapat dalam diri seseorang dan kemampuannya dalam melaksanakan pekerjaan. Pengelolaan kinerja merupakan proses yang dirancang untuk menghubungkan satuan-satuan organisasi sedemikian rupa sehingga tujuan organisasi dan tujuan individu bertemu (Cushway,1994).

Manajemen kinerja didasarkan pada informasi yang diperoleh dari laporan atau sistem laporan kerja. Tujuannya untuk membantu meningkatkan prestasi dengan mengetahui kekuatan dan kelemahan serta melakukan hal-hal yang akan mengembangkan kekuatan untuk mengatasi kelemahan.

Secara garis besar, pencapaian kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bima Tahun 2017, adalah sebagai berikut :

1. Berdasarkan pengukuran dan evaluasi kinerja yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, Selama Tahun 2017, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bima melaksanakan 5 target pencapaian kinerja sasaran mewujudkan ketangguhan Kota dalam penanggulangan bencana melalui 6 indikator utama untuk mencapai Visi dan Misi organisasi dengan rata – rata pencapaian 103,11%;

2. Realisasi Renstra BPBD Kota Bima periode tahun 2014 – 2018 sampai dengan tahun 2017 adalah rata – rata sebesar 86,43 % dari target sampai akhir tahun 2018. Hasil pencapaian realisasi dari target renstra ini sangat luar biasa, sehingga ke depan yang perlu dilakukan adalah meningkatkan realisasi beberapa target indicator organisasi yang belum memperlihatkan hasil di tahun 2017 ini, seperti tingkat koordinasi rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana
3. Sedangkan kinerja keuangan dapat dicapai sebesar 88,22 % dari rata – rata capaian belanja langsung dan belanja tidak langsung SKPD.

## **B. SARAN**

1. Lakip ini diharapkan dapat menjadi gambaran keberhasilan/kegagalan BPBD dalam melaksanakan program dan kegiatan selama tahun 2017, sehingga menjadi bahan pelajaran dalam melaksanakan program dan kegiatan tahun-tahun berikutnya.
2. Kerjasama dari semua komponen baik internal BPBD, maupun instansi terkait untuk terus meningkatkan koordinasi menjadi salah satu faktor keberhasilan BPBD dalam melaksanakan semua program yang telah ditetapkan.

Bima, Pebruari 2018

KEPALA PELAKSANA  
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH  
KOTA BIMA,

**Ir H.Sarafuddin, MM**

Pembina Utama Muda (IV/c)

NIP. 19640715 199203 1 017



# LAMPIRAN

**TARGET dan REALISASI RENSTRA 2014 -2018**  
**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA BIMA**

VISI	MISI	TUJUAN MISI	INDIKATOR TUJUAN	TARGET	SASARAN MISI				TARGET					TARGET PENCAPAIAN						
					SASARAN	INDIKATOR	PENJELASAN	SATUAN	2014	2015	2016	2017	2018	Target Renstra	Capaian tahun sebelumnya (2016)	% Capaian tahun sebelumnya	capaian tahun 2017	% Capaian tahun 2017	Capaian sampai dengan tahun 2017	% Capaian sampai dengan tahun 2017
1	2	3			4	5	6	7	8	9	10	11	12	14			15			16
<b>TERWUJUDNYA KOTA BIMA YANG TANGGUH DAN MANDIRI MELALUI PENANGANAN BENCANA YANG TANGGAP, CEPAT DAN TEPAT</b>	Meningkatkan Kesadaran, kemampuan dan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana melalui peningkatan peran serta stakeholder penanggulangan bencana dalam Pengurangan Resiko Bencana	Meningkatkan ketangguhan Kota terhadap bencana	Kriteria Kota Tangguh	Pratama	Meningkatkan Peran aktif Masyarakat dalam Penanganan Risiko Bencana	Persentase Kelurahan Tangguh bencana	Persentase Kelurahan tangguh Bencana pratama	%	15	39	53	66	100	100	53	100	68,4	103,6	68,4	68,4



--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

	tuhan dasarnya dibagi jumlah Korban Bencanax 100%													
Persentase ketersediaan Sarana dan Prasarana Penunjang saat bencana	Jumlah Sarana dan Prasarana penunjang saat bencana yang tersedia dibagi jumlah sarana prasarana yang harus ada x 100%	%				80	85	85	70	70,00	80	100	80	94,12

Terwujudnya pemulihan sarana dan prasarana fisik dan non fisik di wilayah pasca bencana secara terpadu dan menyeluruh	Terselenggaranya pemulihan sarana dan prasarana fisik dan non fisik pasca bencana		90	Terwujudnya pemulihan sarana dan prasarana fisik dan non fisik pasca bencana	Persentase rehabilitasi dan rekonstruksi sarana dan prasarana fisik dan non fisik pasca bencana	Jumlah sarana dan prasarana yang bisa ditanjangi/ jumlah sarana dan prasarana yang terdampak bencana x 100	%	50	60	70	80	90	90	22	22,00	32	32	32	35,56
															125,35		103,11		86,43

Raba Bma, Pebruari 2018

Kepala Pelaksana BPBD Kota Bima

Ir. H. Sarafuddin, MM

Nip. 19680715 199203 1 017